

DISERTASI

PENGARUH STRUKTUR PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KOTA TERHADAP KEMANDIRIAN WILAYAH DAN PERKEMBANGAN KEGIATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KOTA SAMARINDA



H. ABD. RACHIM AF.

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PENGARUH STRUKTUR PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAH KOTA TERHADAP KEMANDIRIAN WILAYAH DAN
PERKEMBANGAN KEGIATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
KOTA SAMARINDA**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
dalam Program Studi Ilmu Ekonomi
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada hari : Kamis
Tanggal : 19 Mei 2005
Pukul 10.⁰⁰ WIB**

Oleh :

**H. ABD. RACHIM AF.
NIM. 090014198 D**

LEMBAR PENGESAHAN

**DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 MEI 2005**

Oleh

Promotor



Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE.
NIP. 130 355 369

Ko Promotor



Prof. Dr. H. Effendie, SE.
NIP. 130 531 816

Telah Diuji pada Ujian Tertutup
Tanggal : 18 April 2005

PANITIA PENGUJI DISERTASI

- Ketua : Prof. Dr. H. Imam Syakir, SE**
- Anggota :**
1. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE
 2. Prof. Dr. H. Effendie, SE
 3. Prof. Dr. H.A. Karim Saleh
 4. Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE
 5. Prof. Dr. Habib Mustopo
 6. Dr. Solimun, Ir, M.S

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor : 3163 / J03 / PP / 2005
Tanggal : 29 April 2005

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan karena jasa banyak pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

Prof. Dr. H. Soeroso Imam Zadjuli, SE., selaku Promotor yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan arahan, motivasi, bimbingan dan saran dalam menyelesaikan disertasi ini. Prof. Dr. H. Effendie, SE., selaku Ko Promotor yang dengan penuh perhatian, kesabaran dan meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memberikan sumbangan pemikiran yang sangat berharga sampai dengan disertasi ini selesai.

Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr., sebagai Rektor Universitas Airlangga dan Prof. H. Soedarto, dr., DTMH, PhD., sebagai mantan Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga dan Prof. Dr. H. Soedijono Tirtowidarjo, dr., Sp.THT., sebagai mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas kesempatan dan semua fasilitas yang diberikan selama menempuh pendidikan Program Doktor di Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prof. Dr. H. Effendie, SE., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof. Dr. H. Soeroso Imam Zadjuli, SE., sebagai mantan Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan arahan dan kemudahan dalam proses belajar selama ini. Dengan selesainya disertasi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh dosen antara lain Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE.,

Prof. Dr. H. Effendie, SE., Prof. Dr. Soedjono Abipraja, Prof. Armijn Rangkuti, SE., Prof. Drs. Ec. Budiman Chr, MA., Ph.D., Prof. Dr. H. Imam Syakir, Prof. Dr. H. Iksan Soemaun, Prof. Dr. Sarmanu, Dr. Kuntoro, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. Priono Tjiptoharjo, Prof. Dr. H. M.S. Idrus, SE., M.Ec, Prof. Dr. Habib Mustofa, Dr. Harry Susanto, Dr. Agus Suman, Dr. Solimun., Ir.,MS., Prof. Dr. H.A. Karim Saleh, Prof. Dr. H. Abu Hamid dan Dr. H. Imam Syafi'ie, MA.

Pada kesempatan ini tidak lupa pula diucapkan terima kasih kepada Walikota Samarinda H. Achmad Amins, Drs.,MM, yang memberikan izin tugas belajar untuk menempuh pendidikan tersebut dan pimpinan instansi pemberi data mulai dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Kantor Badan Pusat Statistik dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Samarinda, juga seluruh pegawai Dinas Pendapatan Kota Samarinda secara khusus kepada H. S. Fauzi.,SE.,M.Si., Anwar., S.Sos., MM., Budi Sahjaya, SP.

Ucapan terima kasih ini pula penulis sampaikan kepada seluruh kawan se angkatan mulai dari Ardi Parminto,SE.,MS., Dr., Adji B. Haryanto Bachroel,Drs.,Ec.,MM.,Dr.Asli Nuryadin,S.Pd.,MM., Bambang Suyanto,Ir.,MM., Budi Pranowo,Ir.,MM., Djoko Setyadi,Drs.,M.Sc., H.M.Edward Aazran,SE.,MS., Eny Rochaida,Dra.,M.Si.,Iskandar,SE.,M.Si.,Islansyah,Drs.,MM.,H.Kasmiruddin, Drs.,MM., M.Abdan Madzkuri,Drs.,MM., H.Mulyadi,Sy.P,Drs.,MM., M.Thukul, S.Sos.,MM., Negro Kiswantoro,Ir.,MM., Roos Darno,Ir.,MM., Rusdiah Iskandar, Dra.,M.Si,Ak., Dr. Sri Mintarti,Dra.,M.Si., Sutikno,Drs.,MS. dan Tedja Susadya, SE.,MM.

Dengan tulus yang sedalam-dalamnya penulis hargai pula kepada seluruh keluarga antara lain Ayahnda Abu Fakir (Alm) dan Ibunda Hj. Ainun Hasyim, juga Isteri Hj. Ernalina, MS., SE., MM dan anakda dr. Resliany, Resvian, Reslianty serta Resvianur.

Akhirnya, semoga Disertasi ini ada manfaatnya dan kepada semua pihak yang memberikan bantuan mendapatkan limpahan berkah dari Allah SWT. Amin.

RINGKASAN

Pengaruh Struktur Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Terhadap Kemandirian Wilayah dan Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan untuk mengatur diri sendiri itu luas, nyata dan bertanggung-jawab. Tanggung jawab dan sekaligus tujuan Otonomi Daerah ialah (a) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, (b) mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, (c) memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah, dan antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Otonomi Daerah itu didukung oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang tujuan pokoknya adalah (a) memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. (b) menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, akuntabel dan pasti.

Dengan mendasarkan pada pelaksanaan Struktur Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota, apakah mempengaruhi kemandirian wilayah dan perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda. Untuk itu guna menjawab persoalan tersebut maka perlu dilakukan studi mengenai "Pengaruh Struktur Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Terhadap Kemandirian Wilayah dan Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, memberikan dorongan kepada peneliti untuk mengkaji lebih jauh dengan rumusan masalah yang dibuat beberapa pertanyaan, apakah struktur pendapatan berpengaruh terhadap struktur belanja?, struktur pendapatan berpengaruh terhadap kemandirian wilayah?, struktur belanja berpengaruh terhadap kemandirian wilayah?, struktur belanja berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda?, kemandirian wilayah berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda?, kemudian apakah ada pengaruh merubah standardisasi posisi otonomi dari konsolidasi ke otonomi rendah, sedang atau tinggi, dengan standardisasi yang ditetapkan.

Tujuan dari penelitian studi ini adalah mengukur dan menganalisis pengaruh struktur pendapatan terhadap struktur belanja, mengukur dan menganalisis pengaruh struktur pendapatan terhadap kemandirian wilayah, mengukur dan menganalisis pengaruh struktur belanja terhadap kemandirian wilayah, mengukur dan menganalisis pengaruh struktur belanja terhadap perkembangan kegiatan sosial ekonomi, mengukur dan menganalisis pengaruh kemandirian wilayah terhadap perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda,

mengukur dan menganalisis standardisasi posisi otonomi dari konsolidasi ke otonomi rendah, sedang atau tinggi, dengan standardisasi yang ditetapkan.

Pengertian wilayah (*region*) dalam ilmu regional bukanlah sekedar wilayah yang didemarkasi secara arbitrary, tetapi wilayah yang sangat berarti karena di dalamnya terdapat beberapa masalah sosial ekonomi yang terkait dengan region tersebut, karena di dalamnya terkandung berbagai masalah ekonomi sosial yang berkaitan dengan kehidupan perkotaan, seperti masalah perumahan, masalah sanitasi, jasa publik, dan lain-lain. Dengan demikian dapat dipahami / ditegaskan perbedaan pokok antara ilmu regional dengan ilmu ekonomi konvensional, terutama mengenai perlakuannya terhadap dimensi spasial. Kemudian dengan Pergeseran dari era sentralisasi ke desentralisasi itu menandakan tengah terjadi perubahan paradigma baru seiring masa transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Hal penting yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian wilayahnya adalah meningkatkan sumber-sumber potensi ekonomi untuk dapat dilakukan sebagai suatu kegiatan usaha oleh sektor swasta, sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pemerintah Daerah khususnya dan tentunya hal tersebut dapat tercapai melalui penciptaan iklim berinvestasi yang kondusif dan mengarah kepada kegiatan usaha yang *profitable*.

Membahas tentang Otonomi Daerah tidak bisa dilepaskan dengan konsep desentralisasi, yang mengandung makna bahwa wewenang mengatur dan mengurus pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga dilakukan oleh satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kewenangan dari satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di daerahnya disebut Otonomi Daerah. Pemerintah Kota seharusnya berusaha meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunnya, karena tuntutan penduduk akan pelayanan umum dan sosial semakin meningkat, hal ini untuk menciptakan kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lazim disebut Keuangan Daerah.

Berdasarkan kerangka proses berpikir dan kerangka konseptual, maka hipotesis yang diajukan dalam studi ini adalah Struktur Pendapatan berpengaruh terhadap Struktur Belanja, Struktur Pendapatan berpengaruh terhadap Kemandirian Wilayah, Struktur Belanja berpengaruh terhadap Kemandirian Wilayah, Struktur Belanja berpengaruh terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi, Kemandirian Wilayah berpengaruh terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda.

Metode penelitian studi ini berbasis pada penelitian *eksplanatori*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pelaksanaan struktur pendapatan dan belanja pemerintah kota terhadap kemandirian wilayah dan perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda. Penelitian ini diambil data untuk seluruh kecamatan di Kota Samarinda. Dengan demikian penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data penelitian berbentuk

data time series dari tahun 2001 sampai dengan 2003, sehingga merupakan *pooled data*, yaitu data gabungan antara data *time series* (2001 sampai dengan 2003; selama 3 tahun) dengan data *cross sectional* (6 Kecamatan) sedangkan teknik pengambilan populasi data meliputi kegiatan, melakukan verifikasi data, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel, membuat tabulasi data yang akurat, sesuai dengan kebutuhan analisis, melakukan analisis finansial yang meliputi ratio PAD/APBD, APBD/PDRB dan PAD/PDRB, melakukan analisis data.

Dalam penelitian ini digunakan variabel eksogen atau otonomi dan variabel endogen dan intervening yang terdiri dari, Variabel struktur pendapatan, diukur berdasarkan indikator Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima dari Provinsi dan Pusat. PAD diukur berdasarkan item yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dana perimbangan yang diterima dari Provinsi diukur berdasarkan item yang meliputi bagi hasil pajak dan subsidi / bantuan, sedangkan dana perimbangan pusat bersumber dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK serta pinjaman daerah; Variabel struktur belanja diukur berdasarkan indikator belanja rutin dan belanja pembangunan yang terdiri dari SOC dan DPI. Belanja rutin diukur berdasarkan item belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan belanja lainnya. Belanja pembangunan yang terdiri dari *Social Overhead Capital* (SOC) dan *Directly Productivity Investment* (DPI) diukur berdasarkan item-item berupa 20 sektor pembangunan; Variabel kemandirian wilayah diukur berdasarkan indikator rasio PAD terhadap APBD, APBD terhadap PDRB dan PAD terhadap PDRB serta Variabel perkembangan kegiatan sosial ekonomi diukur berdasarkan indikator berupa PDRB, pendapatan per kapita, tenaga kerja, pendidikan dan kesehatan.

Untuk mengetahui Kemandirian dan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda, maka dilakukanlah analisis Pengujian Hipotesis Penelitian dengan Analisis Jalur (*Path Analysis*). Kemudian Analisis Posisi Tingkat Kemandirian Wilayah diukur menggunakan Analisis Deskriptif dengan membandingkan standardisasi yang telah ditetapkan oleh Zadjuli (2002, 2004 dan 2005).

Hipotesis Kesatu, Struktur Pendapatan berpengaruh terhadap Struktur Belanja. Dari hipotesis tersebut terdapat pengaruh signifikan, dengan koefisien $path = 0,763$ dan $p = 0,000$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Struktur Pendapatan semakin tinggi pula Struktur Belanja. Hipotesis Kedua, Struktur Pendapatan berpengaruh terhadap Kemandirian Wilayah Kota Samarinda. Dari hipotesis tersebut ternyata Struktur Pendapatan berpengaruh non signifikan terhadap Kemandirian Wilayah, dengan koefisien $path = -0,080$ dan $p = 0,830$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %). Hipotesis Ketiga, Struktur Belanja berpengaruh terhadap Kemandirian Wilayah Kota Samarinda. Pengaruh Struktur Belanja terhadap Kemandirian wilayah adalah non signifikan, dengan koefisien $path = -0,451$ dan $p = 0,239$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %). Hipotesis Keempat, Struktur Belanja berpengaruh terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda. Struktur Belanja berpengaruh non signifikan terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda, dengan koefisien $path = -0,047$ dan $p = 0,792$ pada derajat $\alpha = 0,05$

(5 %). Hipotesis Kelima, Kemandirian Wilayah berpengaruh terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda. Kemandirian Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda, dengan koefisien path = 0,797 dan $p = 0,000$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %).

Secara deskriptif dianalisis Kemandirian Wilayah, yakni hasilnya PAD/APBD rata-rata dalam kurun waktu 3 tahun 6,98 % masih dalam posisi otonomi konsolidasi, karena PAD/APBD belum mencapai 15 %. PAD/PDRB harga konstan rata-rata dalam kurun waktu 3 tahun 1,22 %. Melihat angka tersebut dapat dikategorikan Samarinda masuk dalam posisi otonomi rendah. Akan tetapi jika dilihat dari PAD/PDRB harga berlaku pada kurun waktu 3 tahun rata-rata sebesar 0,57 %, maka otonomi dalam menuju kemandirian wilayah belum mencapai posisi otonomi konsolidasi karena masih < 5 %. APBD/PDRB harga konstan dalam kurun waktu 3 tahun rata-rata sebesar 17,47 %, dapat dikatakan pada posisi otonomi tinggi, karena telah mencapai > 15 %. Namun dengan memperhatikan APBD/PDRB harga berlaku dalam kurun waktu 3 tahun rata-rata 8,17 %, termasuk dalam posisi otonomi rendah, karena masih belum mencapai 10 % - 15 %. Dengan demikian rumusan masalah keenam yang berbunyi apakah Otonomi Daerah merubah standardisasi posisi otonomi dari konsolidasi ke otonomi rendah, sedang atau tinggi, dengan standardisasi yang ditetapkan dapat dinyatakan PAD/APBD mencapai posisi konsolidasi, PAD/PDRB harga konstan Otonomi Rendah dan PAD/PDRB harga berlaku posisi konsolidasi serta APBD/PDRB harga konstan Otonomi Rendah dan APBD/PDRB harga berlaku posisi Otonomi Rendah.

Dalam penelitian studi ini terdapat keterbatasan, yaitu penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga tingkat validitas data sangat ditentukan oleh sumber data berupa dokumentasi. Peneliti hanya bisa melakukan triangulasi secara terbatas dengan melakukan *cross check* berupa observasi pada kecamatan se Kota Samarinda juga yang sulit diukur terdapat interkoneksi antar kota, kabupaten dan provinsi dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap Kota Samarinda. Sedangkan aktivitas ekonomi di Kota Samarinda yang diukur adalah keuangan Pemerintah Kota dan pengaruhnya terhadap kemandirian wilayah dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Realitanya faktor-faktor konsumsi, investasi dan ekspor-impor yang dapat membentuk Produk Domestik Regional Bruto tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Hasil studi ini dapat disimpulkan, Struktur Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Struktur Belanja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan digunakan untuk Belanja Pemerintah Kota Samarinda. Struktur Pendapatan berpengaruh non signifikan terhadap Kemandirian Wilayah Kota Samarinda. Hal ini konsisten dengan hasil pengujian hipotesis kesatu, yang mengindikasikan adanya keterbatasan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan kepada daerah, jika dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh Kota Samarinda. Struktur Belanja berpengaruh non signifikan terhadap Kemandirian Wilayah Kota Samarinda. Satu

diantaranya disebabkan oleh banyaknya dana yang diprogramkan dan dilaksanakan untuk kepentingan belanja *Social Overhead Capital* (SOC) di mana dana tersebut dalam jangka pendek relatif tidak menghasilkan pendapatan, walaupun dalam jangka panjang ada program yang dapat menghasilkan pendapatan. Struktur Belanja berpengaruh non signifikan terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda. Dapat ditegaskan bahwa Pelaksanaan pembangunan di segala bidang sebenarnya dapat menerapkan prinsip pembangunan yang mendasar (*Based Development*). Yakni, bagaimana pembangunan serta tujuan utama pembangunan itu tumbuh dari masyarakat dan dilakukan demi masyarakat sendiri. Kemandirian Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Masyarakat Ekonomi Kota Samarinda. Berarti semakin tinggi tingkat Kemandirian Wilayah berdampak pada perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda. Dalam pelaksanaannya terdapat tiga komponen *stage holder* dan dikenal dengan segitiga pelaku pembangunan yang tidak dapat dipisahkan antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah. Untuk standardisasi otonomi ternyata PAD/APBD mencapai posisi konsolidasi, PAD/PDRB harga konstan Otonomi Rendah dan PAD/PDRB harga berlaku posisi konsolidasi serta APBD/PDRB harga konstan Otonomi Rendah dan APBD/PDRB harga berlaku posisi Otonomi Rendah.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan daerah yang terkait dengan penggalian dana Pendapatan Asli Daerah belum dapat dilakukan secara optimal, karena adanya keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan ketergantungan terhadap dana perimbangan cukup tinggi. Arah penggunaan dana lebih banyak pada *Social Overhead Capital* (SOC) dibandingkan dengan *Directly Productivity Investment* (DPI). Pembangunan yang dilakukan di Samarinda relatif belum mengacu pada *Based Development*. Dalam pelaksanaan pembangunan, tiga *stage holder* atau segitiga pelaku pembangunan tidak dapat dipisahkan antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah.

Akhirnya dapat disarankan Cadangan Anggaran Pembangunan yang disimpan pada Bank dapat hasil jasa giro dan deposito mobile dan dapat digunakan sebagai dana cadangan untuk mengatasi yang bersifat darurat di daerah, baik pada tahun berjalan maupun pada awal tahun anggaran.

Kewenangan Pemerintah Daerah di dalam menggali potensi Pendapatan Daerah dan sektor bisnis perlu mendapat keterlibatan yang cukup dalam mengembangkan kegiatannya guna mendukung pembangunan yang berefek penggandaan (*multiplier effect*) dengan mengacu pada pembangunan yang berkekuatan masyarakat. Kemudian Struktur Belanja lebih banyak diarahkan pada pengeluaran yang bersifat *Directly Productivity Investment* (DPI). Pembangunan *Social Overhead Capital* (SOC), diarahkan pada istilah lebih baik memberi pancing dibandingkan memberi ikan, terkecuali pada hal-hal yang secara manusiawi harus mendapat perhatian pemerintah. Selain itu perlu melibatkan masyarakat dan pihak swasta yang dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda. Interkoneksi pembangunan baik konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor-impor antar kota, kabupaten, provinsi dan Pemerintah Pusat, memberi isyarat manajemen pembangunan dan keuangan di Kota Samarinda, harus memperhatikan dan mempertimbangkan sumber daya dan kekuatan yang ada di daerah masing-masing.

SUMMARY

Effect of Income Structure and Government Expenditure Munifical on The Regional Independence and Development of Socio-Economic Activities Samarinda City

H. Abd. Rachim AF.

On the basis of Act No. 22/1999, Regional Government is defined as an Autonomous Regional Authority to manage and organize the local people's interests under their initiatives themselves based on community aspiration in line with the generally accepted laws in Indonesia. Authority to manage their own affairs has broad meaning and accountability. The responsibility and objective of the Regional Autonomy is (a) to improve service provided to the public and increase the community well-being, (b) to develop democratic life, social justice and distribution among people, and (c) to establish harmonious relationship between the central government and regional government, and among regional governments for the purpose of maintaining the integration of unitary state of Republic of Indonesia. The administration of the Regional Autonomy is supported by Act No. 25/1999 regarding the balanced budget between the central government and regional government whose its main goal is to (a) empower and enhance capability of local economy and (b) create the fair, proportional, rational, transparent, participatory, accountable and definitive local budgeting system.

Given the sectoral development implementation within the regional autonomy era, whether the local income and expenditure structures influence the regional independence and development of socio-economic activities in Samarinda City. Therefore, to answer this essential question, the study on "Effect of Sectoral Development Implementation on the Regional Independence and Development of Socio-economic Activities within the Regional Autonomy Era of Samarinda City" is conducted.

In concert with the brief description above, the researcher is encouraged to further study problems stated in the form of questions, including whether the

income structure influences the expenditure structure?, whether the income structure has an effect on the regional independence?, whether the expenditure structure has a correlation with development of socio-economic activities?, whether the regional independence has a correlation with development of socio-economic activities?, and whether the regional autonomy implementation has shifted the standardization of the autonomy position from consolidation to *steady growth*, low autonomy, moderate or high autonomy, under the predetermined standardization.

The objective of this research was to measure and analyze the effect of income structure on expenditure structure, the effect of the income structure on the regional independence, the effect of the expenditure structure on the regional independence, the influence of the expenditure structure on the development of socio-economic activities, the impact of the regional independence on the development of socio-economic activities, as well as measure and analyze the impact of Regional Autonomy era in changing the standardization of autonomy position from consolidation to *steady growth*, low autonomy, moderate autonomy or high autonomy, based on the predetermined standardization.

Term "region" in a regional science is not merely region which is demarcated in arbitrary manner, but this region has a very significant meaning since in which there are some socio-economic problems closely related to the region. Thus, region is continually faced with many socio-economic problems relative to urban life, including housing problem, sanitary, public service and many other problems. Therefore, a distinction can be made between the regional science and conventional economic science, particularly in the case of treatment of spatial dimension. Then, a shift from centralization to decentralization symbolizes a change in new paradigm in agreement with the transitory period from authoritarianism toward democracy within the context of living in country, nation and community.

One important thing which the regional government does in accomplishing the regional independence is increasing potential economic resources that can be developed further by the private sector. It is highly

expected that such a activity can bring about an increase in local people's income in general and regional government's income in particular. Of course, this may be achieved through creation of conducive climate for investment leading to a profitable business.

Discussion of the regional autonomy can be separated from decentralization concept, implying that authority in managing and organizing the wheels of government is not only done by the central government but also by the lower government level (local government) beyond the central government. The lower government's authority of managing and organizing the government's affairs in its own region is called the regional government. The municipal government should make some efforts in building up the local income annually. This may be the case since the public demand for better social service also increases. This is designed to create the regional independence in organizing its own affairs, that is put into the form of the Regional Budget that is commonly called as Regional Finance.

In associated with the frame of thought and conceptual framework, several hypotheses raised in this research are the income structure has an effect on the expenditure structure; the income structure exerts an impact on the regional independence; the expenditure structure is correlated with the regional independence; the expenditure structure has a correlation with development in the socio-economic activities; the regional independence influences the development of the socio-economic activities in Samarinda City; and the regional autonomy implementation has an effect in changing the standardization of autonomy position from consolidation on the basis of the predetermined standardization.

The research method in this study was grounded on the explanatory research, namely this research was deliberately designed to examine and explain the effect of the sectoral development implementation on the regional independence and development of socio-economic activities in Samarinda City. The data were collected from all sub districts existing in Samarinda City. Thus, the research was conducted on the basis of census where its data were in the

form *time series* data commencing from 2001 up to 2003, These data represented *pooled data*, namely the combination of both *time series* data (for three years, starting from 2001 to 2003) and *cross sectional* data (6 sub districts). In addition, an collection of data population included some activities such as verifying data, generating valid and reliable data, tabulating accurate data suited to the needs of analysis, performing financial analysis consisting of PAD (local budget)/APBD (regional budget) ratio, APBD/PDRB and PAD/PDRB ratios, and doing data analysis.

The research employed independent and dependent variables involving the income structure which was measured based on indicators of local income (PAD) and balanced budget received from provincial and central governments. The PAD was measured based on some factors such as regional tax, regional retribution, regional gains and other legitimate incomes. The balanced budget received from the provincial government was measured based on some items, one of which was tax sharing and subsidy/grant, while the central government's balanced budget took a source of the tax sharing, no tax sharing, DAU (block grant), DAK and regional loans. The expenditure structure variable was measured based on indicators of the regular budget and development budget embracing SOC and DPI. The development budget comprising *social overhead capital* (SOC) and *directly productivity investment* (DPI) was measured under some items taking a form of 20 development sectors. The independence was measured based on indicators of PAD to APBD ratio, APBD to PDRB ratio and PAD to PDRB ratio, and development of socio-economic activities variable was measured based on some indicators such as PDRB, income per capita, employment, education and health.

To know the independence and the socio-economic activities taking place in subdistrict areas in Samarinda City, then hypothesis test was analysed by using the path analysis technique and preceded with analysis of regional independence degree position.

Regarding results using the path analysis, it was suggested that the income structure significantly influenced the expenditure structure, with path

coefficient = 0.763 (0.000). This indicated that the larger income structure would produce the larger expenditure structure. Thus, the first hypothesis saying that "The income structure influences the expenditure structure in Samarinda City" was accepted. In the second hypothesis, there was very strong positive influence (path coefficient = 0.763), implying that most incomes were used for some expenditures. In guideline for development of APBD, there was a component of so-called development budget reserve (CAP). This served as a reserved funds for emergency condition that might occur in regional government both within the current fiscal year and at the beginning of fiscal year when the balanced budget from the central government came late. This has not been well accommodated by the Samarinda Municipal Government in developing and implementing the APBD. The income structure didn't generate a significant effect on the regional independence (path coefficient = 0.080 and $p = 0.830$). Thus, the third hypothesis stating that "The income structure has a significant impact on the regional independence of Samarinda City" was rejected. Furthermore, the effect of the expenditure structure on the regional independence was not significant ($p = 0.139$). Similarly, the fourth hypothesis suggesting that "The expenditure structure significantly influences the regional independence" was rejected. Given significance level of 0.139, the path coefficient would be equal to -0.451 . This indicated that when the expenditure structure was larger, then the regional independence would decrease in larger extent. The expenditure structure produced an insignificant influence on the development of socio-economic activities ($p = 0.792$). Thus, the fifth hypothesis saying that "The expenditure structure induces significant impact on the development of socio-economic activities" was rejected. The regional independence possessed a significant and negative correlation with the development of socio-economic activities (path coefficient = -0.797 and $p = 0.000$). Thus, the sixth hypothesis arguing that "The regional independence has a significant correlation with the development of socio-economic activities in Samarinda City" was accepted. The regional autonomy implementation having a significant effect in shifting standardization of the autonomy position from

consolidation on the basis of predetermined standardization was apparently rejected.

Of course, this research has some limitation, one of which is that the research uses secondary data. Consequently, data validity level is extremely determined by source of data in the form of documentation. The researcher can merely perform a limited triangulation by cross check, that is, by observing all sub districts existing in Samarinda City in which interconnectivity among city, district and province is difficult to measure regarding a wide-range of social and economic activities which may influence Samarinda City.

In order that the regional independence can be accomplished adequately, then there should be a proper policy needed to develop General Guideline and Policy (AKU) and Regional Strategic Plan (Renstrada) as well as there should be some programs necessary to improve the regional independence so that standardization of regional independence degree can be improved accordingly. In addition, the expenditure structure must be more oriented to some expenditures having characteristics of Directly Productivity Investment (DPI) where the latter factor directly produces *multiplier effect* on development of socio-economic activities which in turn can enhance the regional independence. The expenditure structure also necessarily pays an attention to interconnectivity among city, district and province in East Kalimantan and Central Government so that the financial management in Samarinda City can not be parted from this interconnectivity.

ABSTRACT

Effect of the Municipal Government's Income and Expenditure Structures on Regional Dependence and Development of Socio-Economic Activities in Samarinda City

Objective of the recent study was to analyze and examine the effect of income structure on expenditure structure, the effect of the income structure on the regional independence, the effect of the expenditure structure on the regional independence, the influence of the expenditure structure on the development of socio-economic activities, the impact of the regional independence on the development of socio-economic activities and describe a shift in the Regional Autonomy based on standardization of autonomy position from consolidation to low, moderate and high autonomy under the predetermined standardization.

The research method in this study was grounded on the explanatory research, namely this research was deliberately designed to examine and explain the effect of the income and expenditure structures implementation of the municipal government on the regional independence and development of socio-economic activities in Samarinda City. The data were collected from all subdistricts existing in Samarinda City. Thus, the research was conducted on the basis of census where its data were in the form of *time series* data starting from 2001 up to 2003. These data constituted *pooled data*, namely a combination of both *time series* data (for three years, starting from 2001 up to 2003) and *cross sectional* data (6 subdistricts). To know the independence and socio-economic activities in subdistrict areas in Samarinda City, then some hypotheses were tested making the use of path analysis. Moreover, the descriptive analysis was also used to analyze and examine the position of Regional Independence level in accordance with the predetermined standardization.

On the basis of the results using the path analysis, it was suggested that the income structure was significantly correlated with the expenditure structure; the income structure was not significantly correlated with the regional independence. Furthermore, the expenditure structure was not significantly correlated with the regional independence. The expenditure structure didn't produce a significant effect on the development of socio-economic activities in Samarinda City. The regional independence indicated a significant correlation with the development of socio-economic activities. The regional autonomy implementation has brought about a shift in standardization of the autonomy position from consolidation. Under the predetermined standardization, then it could be said that PAD/APBD has achieved a consolidated position, PAD/PDRB of the constant value achieved the Low Autonomy, PAD/PDRB of the current value achieved the consolidated position, and APBD/PDRB of the constant value achieved the Low Autonomy and APBD/PDRB of the current value achieved the Low Autonomy position.

Keywords : *income structure, expenditure structure, regional independence, development of socio-economic activities and regional autonomy position.*

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Prasyarat Gelar	iii
Persetujuan	iv
Penetapan Panitia	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Ringkasan	viii
Summary	xiii
Abstract	xxi
Daftar Isi	xxii
Daftar Tabel	xxiv
Daftar Gambar	xxv
Daftar Lampiran	xxvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Studi	14
1.4 Manfaat Studi	15
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Otonomi Daerah	17
2.2 Keuangan Negara / Daerah.....	28
2.3 Pembangunan Sektoral	39
2.4 Kemandirian Wilayah.....	53
2.5 Sosial Ekonomi.....	70
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELI- TIAN	82
3.1 Kerangka Proses Berpikir	82
3.2 Kerangka Konseptual	85
3.3 Hipotesis	89
BAB 4 METODE PENELITIAN	90
4.1 Rancangan Penelitian	90
4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	90
4.2.1 Populasi dan Sampel	90
4.2.2 Teknik Pengambilan Populasi	91
4.3 Variabel Penelitian	92
4.3.1 Klasifikasi Variabel	92
4.3.2 Definisi Operasional Variabel	93

4.4	Instrumen Penelitian	100
4.5	Lokasi dan Waktu Penelitian	100
4.6	Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data	101
4.7	Cara Pengolahan dan Analisis Data	101
4.7.1	Cara Pengolahan Data	101
4.7.2	Analisis Data	102
BAB 5	ANALISIS HASIL PENELITIAN	104
5.1	Data Penelitian	104
5.1.1	Gambaran Umum Kota Samarinda	104
5.1.2	Data Obyek Penelitian	108
5.2.	Analisis dan Hasil Penelitian.....	140
5.2.1	Hasil Analisis Path	140
5.2.2	Hasil Analisis Deskriptif	144
BAB 6	PEMBAHASAN	150
6.1	Pengaruh Struktur Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Terhadap Kemandirian Wilayah dan Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda	150
6.2	Analisis Kemandirian Wilayah	156
6.3	Keterbatasan Penelitian	160
BAB 7	KESIMPULAN DAN SARAN	161
7.1	Kesimpulan	161
7.2	Saran	165
	DAFTAR PUSTAKA	168
	LAMPIRAN	173

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 PDRB dan Konsumsi Per Kapita 5 Provinsi Terkaya, 1998 (Harga Berlaku)	4
Tabel 1.2 Standardisasi Posisi Otonomi Dalam Menuju Kemandirian Wilayah	13
Tabel 2.1 Proporsi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan APBD Kota Samarinda	68
Tabel 5.1 Tingkat Persebaran Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2003	107
Tabel 5.2 Pengujian Asumsi Linieritas.....	141
Tabel 5.3 Pengujian Hipotesis Penelitian	143
Tabel 5.4 Kemandirian Wilayah	149

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	84
Gambar 3.2 Kerangka Konseptual	87
Gambar 5.1 Model Struktural Hasil Analisis Path	143

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I	Peta Teori. 173
Lampiran IIa	Struktur Pendapatan Daerah Setiap Kecamatan Dalam Kota Samarinda Tahun 2001. 191
Lampiran IIb	Struktur Pendapatan Daerah Setiap Kecamatan Dalam Kota Samarinda Tahun 2002. 192
Lampiran IIc	Struktur Pendapatan Daerah Setiap Kecamatan Dalam Kota Samarinda Tahun 2003. 193
Lampiran IIIa	Struktur Belanja Setiap Kecamatan Dalam Kota Samarinda Tahun 2001. 194
Lampiran IIIb	Struktur Belanja Setiap Kecamatan Dalam Kota Samarinda Tahun 2002. 196
Lampiran IIIc	Struktur Belanja Setiap Kecamatan Dalam Kota Samarinda Tahun 2003. 198
Lampiran IV	Jumlah Penduduk Pria dan Wanita Setiap Kecamatan Dalam Kota Samarinda Tahun 2001 s/d 2003. 200
Lampiran Va	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 1993 Kecamatan-Kecamatan Di Kota Samarinda Tahun 2001. 201
Lampiran Vb	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 1993 Kecamatan-Kecamatan Di Kota Samarinda Tahun 2002. 202
Lampiran Vc	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 1993 Kecamatan-Kecamatan Di Kota Samarinda Tahun 2003. 202
Lampiran VIa	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku Kecamatan-Kecamatan Di Kota Samarinda Tahun 2001. 204

Lampiran VIb	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku Kecamatan-Kecamatan Di Kota Samarinda Tahun 2002.	205
Lampiran VIc	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku Kecamatan-Kecamatan Di Kota Samarinda Tahun 2003.	206
Lampiran VIIa	Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Setiap Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2001.	207
Lampiran VIIb	Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Setiap Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2002.	208
Lampiran VIIc	Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Setiap Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2003.	209
Lampiran VIIIa	Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Setiap Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2001.	210
Lampiran VIIIb	Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Setiap Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2002.	211
Lampiran VIIIc	Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Setiap Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2003.	212
Lampiran IX	Angka Rata-Rata Usia Harapan Hidup Pria dan Wanita Setiap Kecamatan Se Kota Samarinda Tahun 2001 s/d 2003.	212
Lampiran X	Analisis Faktor Konfirmatori (<i>Factor Analysys</i>).	214
Lampiran XI	<i>Curve Fit</i>	221
Lampiran XII	Analisis Hasil Diskriptif.	225
Lampiran XIII	Hasil Analisis Path (dengan Pendekatan OLS data standardize).	233

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Kewenangan untuk menggali sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta revisinya yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Revisi atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ini dilakukan tidak terlepas dari adanya keinginan dan keseriusan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi, dengan memberikan keleluasaan kewenangan bagi daerah untuk mendayagunakan potensi yang ada di daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tentunya pendayagunaan potensi tersebut harus tetap dalam batas-batas kewajaran, yang tolok ukurnya adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang dimiliki tersebut untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah disatu sisi, sedangkan disisi lain adalah harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk menanggung beban pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keleluasaan daerah untuk memanfaatkan sumber keuangannya sendiri tercermin dari keleluasaan untuk menetapkan jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang potensial di daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Khusus untuk pengaturan

lebih lanjut mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang penting bagi masyarakat kota ialah bahwa penyaluran dana haruslah didasarkan pada pemanfaatan perhitungan dan analisis manfaat serta biaya sosial (*social benefit-cost analysis*) yang konsekuen.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah selain mempunyai Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan bagi kegiatan di daerah juga diperoleh dana perimbangan bersumber dari pajak maupun bukan pajak, baik yang diperoleh dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Kebijakan pemerintah di bidang keuangan tersebut dikenal dengan desentralisasi fiskal.

“Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dibidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi dan pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dengan terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada Pemerintahan di daerah, diharapkan daerah-daerah akan dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (*capital investment*) di daerahnya”. (Elmi, 2002 : 26)

Desentralisasi Fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan (1) kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri, dan didukung dengan (2) perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Mengingat “Keuangan daerah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan otonomi daerah. Pemerintah Daerah tak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan”. (Pamudji, 1980 : 63)

Dalam memenuhi perubahan dunia global menuntut negara yang ada di dalamnya untuk melakukan reposisi tatanan pemerintahan ke arah yang lebih baik. Satu di antaranya adalah mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melalui peranserta Pemerintah Daerah dan masyarakat yang ada di daerahnya, yang ditetapkan melalui Otonomi Daerah.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di mana menuntut tanggung jawab dan pencapaian tujuan Otonomi Daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam mewujudkannya diperlukan pembangunan yang merupakan upaya sadar dan rasional guna memanfaatkan potensi ideologi, sosial dan ekonomi yang dimiliki agar dapat meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya, maka pembangunan dilaksanakan dalam skope daerah dan nasional.

“Perkembangan ekonomi Indonesia selama 3 tahun terakhir (1996-1999) diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku rata-rata tiap tahun masih meningkat dengan 27,63% dengan rincian sektor primer meningkat dengan 34,26%, sektor sekunder 27,06% dan sektor tersier masih meningkat dengan 25,30%. Kontribusi nilai tambah sektor primer sebesar 19,41%, sektor sekunder 42,87% dan sektor tersier sebesar 37,73%. Berdasarkan pertumbuhan nilai tambah dari berbagai sub-sektor selama 3 tahun tersebut dapat diestimasikan PDB Nasional. Sedangkan kontribusi PDRB dari 26 provinsi di Indonesia secara Nasional, dimana Pulau Jawa dan Bali masih menyumbangkan hampir 70,39%

terhadap PDB Nasional yang meliputi Pulau Jawa 69,80% dan Bali 2,59%, Sumatera sebesar 29,18%, Kalimantan 14,00%, Sulawesi 6,29% dan Indonesia Timur lainnya 20,42%." (Zadjuli, 2002 : 1)

Pembangunan bidang ekonomi pada dasarnya masih didominasi oleh pendekatan sektoral dan sedikit mengabaikan pendekatan pembangunan perwilayahan. Sedangkan perencanaan secara makro mengikuti sistem pencapaian target produksi untuk setiap sektor. Dengan tercapainya target sektoral tersebut diharapkan pendapatan per kapita meningkat, pergeseran sektor pertanian ke sektor perdagangan dan industri akan menjadi seimbang.

Untuk mengetahui posisi Kalimantan Timur dalam menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dibandingkan dengan 4 daerah provinsi terkaya di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
PDRB DAN KONSUMSI PER KAPITA 5 PROVINSI TERKAYA,
1998 (HARGA BERLAKU)

Provinsi	PDRB Per Kapita (Juta Rp) (A)	Konsumsi Per Kapita (Juta Rp) (B)	B/A (%)
Kaltim	21,53	1,23	5,7
DKI Jakarta	15,5	2,1	13,6
Riau	10,23	1,18	11,5
Irian Jaya	9,24	0,85	9,2
D.I. Aceh	6,17	0,82	13,3

Sumber : Mubyarto, 2001 : 29.

Berdasarkan data tersebut, PDRB Per kapita Kalimantan Timur tertinggi dibandingkan dengan 4 provinsi yang lain yakni Riau, DKI Jakarta, Irian Jaya dan D.I. Aceh. Namun dilihat dari konsumsi per kapita yang terbesar di DKI Jakarta diikuti dengan Kaltim, Riau, Irian Jaya dan D.I. Aceh. Kemudian dilihat dari perbandingan antara konsumsi per kapita dengan PDRB per kapita secara relatif yang terbesar adalah DKI Jakarta

diikuti oleh D.I. Aceh, kemudian Riau, Irian Jaya dan yang terakhir Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa, walaupun PDRB per kapita Kalimantan Timur paling tinggi dibandingkan dengan 4 daerah provinsi lainnya, tetapi konsumsi per kapita secara relatif paling terendah yakni sebesar 5,7% sedangkan Irian Jaya 9,2%, Riau 11,5%. D.I. Aceh 13,3% dan DKI Jakarta 13,6%.

Hal ini terjadi karena hasil Sumber Daya Alam terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan yang merupakan hasil nasional dikirim ke Pemerintah Pusat dan sebagian dikembalikan kepada daerah melalui Dana Perimbangan atau Bagi Hasil yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan kebijakan dalam meningkatkan program pembangunan baik di sektor Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta di bidang Pertanian dalam arti luas. Hal ini ditegaskan :

“Kebijaksanaan dan program pembangunan SDM yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan pemerataannya yaitu berupa program-program pendidikan dan kesehatan terutama bagi wilayah-wilayah kabupaten/pedesaan. Misalnya angka persentase anak sekolah yang menamatkan pendidikan SMP berbeda sangat jauh antara Balikpapan-Samarinda (53,9%) dibanding Kabupaten Pasir (21,8%) dan Berau (31,9%). Demikian pula dalam bidang kesehatan angka kematian bayi (AKB) masih 48 per 1000 kelahiran hidup untuk Kabupaten Pasir dibanding 41 untuk Balikpapan, dan 42 untuk Samarinda. Rasio dokter dan penduduk juga sangat buruk untuk Berau dan Kutai (masing-masing 6.698 dan 5.570 penduduk per dokter) untuk tahun 1999 dibanding 2.616 per dokter untuk Balikpapan, dan 3.809 untuk rata-rata provinsi Kaltim.” (Kartasmita, 1996 : 223)

Dengan kebijakan tersebut dapat mengurangi perbedaan pembangunan daerah yang relatif maju dengan daerah yang relatif tertinggal.

Berawal pada tahun 1999 di mana Pemerintah RI melakukan perubahan sistem administrasi pemerintahan yang semula sentralistik ke arah desentralisasi, tuntutan reformasi di samping untuk memenuhi aspirasi daerah yang selama ini daerah tidak merasa puas atas penyelenggaraan Otonomi Daerah karena otonomi yang diberikan hanya bersifat formal.

Penyerahan urusan kepada daerah, kadang kala tidak disertai penyerahan kewenangan, sumber dana dan sumber daya manusia, sehingga dalam kenyataannya daerah tidak bisa berbuat apa-apa, karena masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat. Semua sumber dana dan sumber daya manusia yang potensial dikuasai oleh Pemerintah Pusat, sedangkan daerah hanya memperoleh limbahnya berupa kemiskinan, kerusakan lingkungan dan kerusakan komunitas. Pembangunan di daerah bukanlah bertujuan untuk memberdayakan daerah beserta masyarakatnya, tetapi hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi yang hasilnya dinikmati oleh segelintir orang. Konsep pembangunan ekonomi yang diterapkan selama ini sangat bersifat pragmatis dengan mengabaikan aspek moral, akibatnya terjadi kesenjangan, baik secara ekonomis, sosial, politik dan budaya.

“Penyerahan urusan kepada Daerah, kadang kala tidak disertai penyerahan kewenangan, sumber dana dan sumber daya manusia, sehingga dalam kenyataannya Daerah tidak bisa berbuat apa-apa, karena masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut dirasakan oleh daerah sebagai suatu ketidakadilan, sehingga menimbulkan berbagai tuntutan yang disampaikan dengan berbagai cara, yang pada puncaknya melahirkan tuntutan Reformasi, yang bergema di seluruh pelosok tanah air”. (Abdullah, 2000 : 73-74)

Diharapkan dengan keterlibatan Pemerintah Daerah lebih banyak dalam mendukung pembangunan nasional, sehingga diperluasnya kewenangan daerah dalam berbagai sektor pembangunan, dengan meningkatnya sumber-sumber keuangan daerah melalui kebijaksanaan fiskal guna mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan pemberdayaan peran Pemerintah Daerah melalui Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, didefinisikan sebagai Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan untuk mengatur diri sendiri itu luas, nyata dan bertanggung-jawab. Tanggung jawab dan sekaligus tujuan Otonomi Daerah ialah (a) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, (b) mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, (c) memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah, dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Daerah Otonom itu luas, mencakup kewenangan penyelenggaraan semua bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta bidang tertentu lainnya.

Otonomi Daerah terletak di Kabupaten dan Kota dengan 11 kewenangan wajib yaitu : Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perhubungan, Industri dan Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Koperasi dan Tenaga Kerja. Sedangkan

kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom hanyalah kewenangan pemerintahan terbatas dan bersifat lintas Kabupaten dan Kota seperti : Pekerjaan Umum, Perkebunan, Kehutanan dan Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah itu didukung oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang tujuan pokoknya adalah (a) memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. (b) menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, akuntabel dan pasti.

Saat ini, proses untuk memberdayakan daerah menuju kepada kemandiriannya itu berada dalam masa transisi yang oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 harus sudah selesai pada bulan Mei 2001, saat di mana pelaksanaan Otonomi Daerah harus sudah efektif. Namun sampai saat ini masih terjadi tarik ulur kewenangan antara Daerah dan Pusat walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom telah diberlakukan sejak tanggal 6 Mei 2000. Dari 25 sektor Kewenangan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut, diatur kewenangan Pusat pada 25 Sektor dan Kewenangan Provinsi 20 Sektor, selebihnya yang tidak diatur akan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota.

Saling tarik menarik kewenangan ini berlangsung terus terutama kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bahkan mulai memasuki

babak baru yakni tarik menarik kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten / Kota. Padahal secara implisit Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengatur pembagian tugas yang selama ini tumpang tindih dan membingungkan yakni dengan menegaskan bahwa Pusat berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, Provinsi, membina dan mengawasi sedangkan Daerah Kabupaten / Kota bebas mengatur dirinya sendiri. Kewenangan pembinaan dari Provinsi lebih ditekankan kepada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan Daerah Otonom, sedangkan pengawasan lebih bersifat represif atau post audit untuk memberikan kebebasan kepada daerah dalam pengambilan keputusan dan memberikan peran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah.

Penegasan kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota sebenarnya adalah kunci dari pelaksanaan Otonomi Daerah, karena akan memberikan implikasi kepada penataan kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Keuangan. Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat tergantung kepada penataan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur di daerah, sebab apabila pelimpahan kewenangan oleh pusat ke daerah diikuti dengan perampingan kelembagaan di pusat dan pada saat yang sama dilakukan penambahan kelembagaan dan pelimpahan pegawai ke daerah, maka yang terjadi adalah menambah rangkaian birokrasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak meningkat dan pemberdayaan rakyat di daerah tidak akan terlaksana.

Otonomi Daerah adalah persoalan kewenangan dan tanggung jawab. Kewenangan adalah kepercayaan dan tanggung jawab adalah akuntabilitas. Karena itu seharusnya paradigma *trust first* dilaksanakan secara konsekuen baru kemudian diminta akuntabilitasnya. Pusat harus mempercayai provinsi dan provinsi wajib mempercayai kabupaten dan kota, yang pada akhirnya Pemerintah Daerah dan Kota harus mempercayai rakyat. Haruslah disadari bahwa Otonomi Daerah adalah instrumen untuk berbagi beban nasional yang begitu berat, disamping upaya untuk memandirikan daerah, meningkatkan rasa tanggung jawab daerah, memperbanyak pasar dan meningkatkan semangat bersaing antar daerah, bukan berbagi lahan. Dalam kaitan berbagi beban inilah gagasan untuk melaksanakan *desentralisasi fiskal* wajib didukung untuk mengurangi ketergantungan kepada pusat dan sekaligus mendukung upaya pemberdayaan daerah.

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, mengidentifikasi bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas mengandung pengertian semakin banyaknya bidang atas urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasinya.

Diyakini konsep Otonomi Daerah akan mampu mendorong tumbuhnya perekonomian dengan mengolah sumber daya daerah untuk menjadi kekuatan ekonomi baru melalui kemampuan daerah itu sendiri

dalam mengolah sumber daya yang ada, sehingga diharapkan memiliki *multiplier effect positive* dalam membentuk kemandirian daerah dan sosial ekonomi masyarakat setempat.

“Dimana pengertian *multiplier* penting untuk menerangkan proses dinamis dari pada pendapatan yang disebabkan oleh penambahan daya beli yang berasal dari luar sistem perekonomian. Konsep *multiplier* berhubungan dengan konsep dari kecenderungan *marginal* untuk konsumsi, dan menerangkan efek dari pada perubahan dan pengeluaran investasi pada perubahan pendapatan melalui perubahan pada permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Jadi *multiplier* harus dihubungkan dengan kecenderungan *marginal* untuk konsumsi dan kecendrungan *marginal* untuk menabung”. (Kadariah, 1981 : 29)

Di antara indikator penting dalam mendukung Otonomi Daerah adalah berasal dari sumber pembiayaan yang didapatkan melalui roda perekonomian daerah tersebut dan melalui dana-dana lain yang bersumber dari pembagian pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pendukung pembangunan daerah.

Selanjutnya secara terpisah diatur kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, sedangkan yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Pemikiran tersebut memberikan dasar hukum untuk mempertegas desentralisasi yang berimplikasi pada penyerahan urusan pemerintahan dalam bidang ekonomi dari Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah, di mana perputaran uang atau roda perekonomian yang terpusat akan berubah menjadi tersebar ke daerah.

sehingga kegiatan perekonomian akan banyak tumbuh dan berkembang di daerah.

“Proyek-proyek Pemerintah Kota yang memang tak dapat dipertanggungjawabkan, lebih baik tidak dilaksanakan. Harus diingat bahwa sumber dana kota itu jelas terbatas. Proyek-proyek yang biasanya berupa pelayanan umum, seperti penanggulangan urbanisasi, lingkungan, kemiskinan, kejahatan, kesehatan dan pendidikan berorientasi sosial yang mungkin tidak atau sukar memperhitungkan manfaat dan biaya sosial dan diputuskan, karena itu tidak harus dilaksanakan tanpa melihat segi ekonominya. Konsekwensinya proyek menjadi mahal sekali dan hanya sebagian saja yang dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana” (Reksohadiprojo, 1993 : 140)

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber utama bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diharapkan mampu meningkat dari waktu ke waktu. Kenyataan menunjukkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah secara nominal terus meningkat, tetapi secara relatif proporsi terhadap Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda terus menurun, sebagaimana Tabel 2.1 dengan data sejak tahun 1990/1991 = 25,99 %, 1991/1992 = 25,27 %, 1992/1993 = 22,42 %, 1993/1994 = 13,93 %, 1994/1995 = 15,91 %, 1995/1996 = 15,10 %, 1996/1997 = 13,98 %, 1997/1998 = 12,04 %, 1998/1999 = 11,98 %, 1999/2000 = 11,66 %, 2000 = 8,37 %, 2001 = 6,14 % dan 2002 = 6,19 %.

Menurut hasil Tim Peneliti Fisipol UGM bekerjasama dengan Litbang Depdagri menentukan tolok ukur kemampuan daerah dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total APBD jika di bawah 10 % termasuk katagori sangat kurang, 11-20 % kurang, 21-30 % sedang, 31-40 % cukup, 41-50 % baik dan 51 % ke atas sangat baik. Kemudian ditegaskan pula



bahwa “daerah perlu menggali sumber penerimaan rupiah yang lebih banyak apabila ia ingin mempertahankan otonomi daerah. Kunci dari otonomi terletak pada kemampuan dan kedewasaan dalam pembuatan keputusan dan penggalian sumber pembelanjaan dalam rupiah”. (Salim, 1976 : 26)

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab di mana Pemerintah Kota Samarinda bertanggung jawab terpenuhinya pelayanan publik yang merupakan kebutuhan dasar warga kota dan meningkatkan peran serta warga kota dari berbagai aspek, satu di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun kenyataannya mengalami penurunan. Kemudian menurut Zadjuli, standardisasi posisi otonomi dalam menuju kemandirian wilayah mulai tahap Konsolidasi, Otonomi Rendah, Otonomi Sedang dan Otonomi Tinggi tidak hanya membandingkan APBD dengan PAD tapi juga membandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator perekonomian daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
STANDARDISASI POSISI OTONOMI DALAM MENUJU
KEMANDIRIAN WILAYAH

Nomor	Standardisasi Posisi Otonomi	PAD/APBD	APBD/PDRB	PAD/PDRB
1	Konsolidasi	<15 %	<5 %	<1 %
2	Otonomi Rendah	15 %-30 %	5 %-10 %	1 %-2 %
3	Otonomi Sedang	30 %-45 %	10 %-15 %	2 %-3 %
4	Otonomi Tinggi	>45 %	>15 %	>3 %

Sumber : Zadjuli, 2002, 2004 & 2005 : 4, 2 & 5.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan studi mengenai **“Pengaruh Struktur Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Terhadap Kemandirian Wilayah dan Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul studi disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Struktur Pendapatan berpengaruh terhadap Struktur Belanja Pemerintah Kota Samarinda?
2. Apakah Struktur Pendapatan berpengaruh terhadap Kemandirian Wilayah Pemerintah Kota Samarinda?
3. Apakah Struktur Belanja berpengaruh terhadap Kemandirian Wilayah Pemerintah Kota Samarinda?
4. Apakah Struktur Belanja berpengaruh terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda ?
5. Apakah Kemandirian Wilayah berpengaruh terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda?
6. Apakah Otonomi Daerah merubah standardisasi posisi otonomi dari konsolidasi ke otonomi rendah, sedang atau tinggi, dengan standardisasi yang ditetapkan.

1.3 Tujuan Studi

Berdasarkan rumusan masalah tersebut disusun tujuan studi sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Struktur Pendapatan terhadap Struktur Belanja Pemerintah Kota Samarinda.

2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Struktur Pendapatan terhadap Kemandirian Wilayah Kota Samarinda.
3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Struktur Belanja terhadap Kemandirian Wilayah Kota Samarinda.
4. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Struktur Belanja terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda.
5. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Kemandirian Wilayah terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda.
6. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Otonomi Daerah merubah Standardisasi Posisi Otonomi dari Konsolidasi ke Otonomi Rendah, Sedang atau Tinggi, dengan standardisasi yang ditetapkan.

1.4 Manfaat Studi

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan studi, maka manfaat yang akan diperoleh dari studi ini meliputi :

1. Pengembangan Konsep Ekonomi Pembangunan, khususnya pengembangan model proporsional penggunaan dana Rutin dan Pembangunan pengaruhnya terhadap Kemandirian Wilayah dan Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda.
2. Bagi Pemerintah Kota Samarinda, dapat diketahui proporsi penggunaan dana untuk kegiatan Rutin dan Pembangunan, yang terdiri dari Pembangunan Kepentingan Sosial / *Social Overhead Capital* (SOC) dan Pembangunan Menghasilkan Pendapatan / *Directly Productivity*

Investment (DPI) Kota Samarinda sehingga diperoleh percepatan peningkatan Kemandirian Wilayah dan Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda.

3. Model pengembangan konsep ekonomi pembangunan tersebut dapat digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan kebijakan penggunaan dana guna peningkatan Kemandirian Wilayah dan Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat baik di Kota Samarinda pada masa mendatang, maupun kota dan kabupaten bahkan provinsi di seluruh Indonesia.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Dengan tuntutan semangat reformasi, terutama setelah pelaksanaan Sidang Istimewa MPR 1999, maka dirasakan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan pembagian sumber daya alam sangat memotivasi aspirasi daerah. Satu diantara tuntutan reformasi adalah adanya keadilan dalam bidang ekonomi, khususnya sumber daya alam yang ada di daerah setempat dikembalikan secara proporsional bagi masyarakat di daerah. Kurangnya rasa keadilan ini memicu munculnya ketidakpuasan daerah yang dalam beberapa hal menjurus menjadi tuntutan untuk diberikan otonomi penuh bahkan timbul beberapa keinginan daerah untuk membentuk negara federasi dan menjadi tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI.

“Daerah merasakan setelah lima puluh tahun Indonesia merdeka, otonomi bagi daerah masih sangat terbatas. Sentralisasi yang terjadi semakin kuat, sehingga menimbulkan kesenjangan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dampak yang lebih berkembang di daerah adalah perasaan bahwa daerah hanya menjadi obyek pemerasan pusat atau dalam kata lain membangun di daerah bukan membangun daerah” (Swasono, 2001 : 4)

Diantara beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab timbulnya sentralisasi dan kurang adilnya keuangan antara pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959 tentang Perimbangan Keuangan masih menggunakan produk hukum yang belum disesuaikan dengan paradigma Undang-undang tersebut. Oleh karenanya

sejak paradigma itu bergeser pada tahun 1998, Pemerintah Pusat mengambil langkah terhadap tuntutan yang berkembang di daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, harapannya adalah untuk memberikan nuansa baru dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sehingga pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 Butir h, Otonomi Daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota serta kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut, maka titik berat otonomi diletakkan di daerah kabupaten dan kota dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten dan kota lebih langsung berhubungan dengan masyarakat.

Membahas tentang Otonomi Daerah tidak bisa dilepaskan dengan konsep desentralisasi, yang mengandung makna bahwa wewenang mengatur dan mengurus pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga dilakukan oleh satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kewenangan dari satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di daerahnya disebut Otonomi Daerah.

Konsep otonomi mengandung pengertian mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Apa saja yang dapat diatur dan diurus itu terungkap dalam wacana sistem otonomi atau ajaran rumah tangga daerah. Secara garis besar sistem otonomi dapat dibedakan atas sistem otonomi materiil dan sistem otonomi formal.

Dalam sistem otonomi materiil, urusan rumah tangga daerah ditentukan secara terperinci dalam Undang-undang pembentukannya. Dengan pembatasan lain, daerah berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya hanya terbatas pada urusan-urusan yang telah ditentukan sebelumnya dalam Undang-undang pembentukannya dan menutup adanya prakarsa daerah.

Dalam sistem otonomi formal, urusan rumah tangga daerah tidak diperinci dalam Undang-undang pembentukannya. Daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi, dengan pembatasan lain

keleluasaan itu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa di antara kedua sistem otonomi terdapat sistem otonomi nyata (riil) yakni sistem yang mengambil jalan tengah antara sistem otonomi formal dan sistem otonomi materiil.

Faktor nyata sebenarnya terdapat baik pada sistem otonomi materiil maupun pada sistem otonomi formal. Pada sistem otonomi materiil, urusan pangkal itu bisa didasarkan pada faktor-faktor riil di daerah. Sedangkan pada sistem otonomi formal, daerah dalam mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap layak bagi daerahnya, seyogyanya sesuai dengan kondisi riil di daerahnya.

Dengan demikian faktor nyata itu bukanlah merupakan karakter yang bersifat *sui generis*, tapi karakter yang boleh jadi terdapat baik pada sistem otonomi formal maupun sistem otonomi materiil. Sehingga tidak beralasan menyebut rumah tangga nyata sebagai suatu sistem otonomi.

Dari pengertian tersebut menampakkan unsur isi otonomi dan tujuan otonomi, dan sekaligus sebagai indikator sistem otonomi formal atau sistem otonomi materiil. Apabila isi otonomi lebih ditentukan oleh prakarsa daerah dan tujuan otonomi untuk pendemokrasian menunjukkan sistem otonomi formal. Sebaliknya, jika isi otonomi lebih ditentukan oleh penyerahan dari Pemerintah Pusat dan tujuan otonomi untuk efisiensi menunjukkan sistem otonomi materiil.

Dalam praktek penyelenggaraan negara modern apakah kekhawatiran bahwa dengan Otonomi Daerah akan leluasa menggali sumber

dananya sendiri untuk membiayai segala kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu kalau tidak ada uang tentu saja tidak akan ada otonomi, karena daerah akan tetap bergantung kepada kemurahan hati Pemerintah Pusat, sehingga daerah gampang didikte oleh Pemerintah Pusat itu selalu menjadi kenyataan? Kalau kita bandingkan dengan penyelenggaraan otonomi di sejumlah negara apa yang dikhawatirkan tersebut tidaklah mendasar.

Di Amerika Serikat misalnya, daerah-daerah atau negara bagian di Utara seperti Wyoming, North dan South Dakota, merupakan negara bagian yang memiliki potensi sumber daya alam sangat terbatas dibandingkan sejumlah negara bagian lainnya. Subsidi pemerintah federal diperebutkan, tetapi otonomi mereka sama sekali tidak terganggu.

Hal yang sama kita temukan di Perancis dan di sejumlah negara lainnya. Ketergantungan kepada bantuan Pemerintah Pusat tidak menghalangi makna Otonomi Daerah.

Di samping itu berapakah pemerintah negara yang betul-betul memenuhi sendiri semua kebutuhan finansial? Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang makmur setiap tahunnya mengalami defisit anggaran sekitar 250 milyar dollar.

Pola pikir otonomi yang disertai dengan kemampuan peningkatan pendapatan daerah juga tidak dilakukan dengan konsisten, karena kalau hal itu betul hendak dilaksanakan semestinya dengan meningkatnya kapasitas keuangan seharusnya disertai dengan meningkat pula kapasitas otonomi. Akan tetapi hal itu tidak pernah dilakukan secara konsisten.

“Kemudian sejauh ini ada tiga pertimbangan yang menunjuk titik berat otonomi pada Dati II. Pertama, pertimbangan politis. Kedua, pertimbangan administratif. Ketiga, pertimbangan pembangunan. Sedangkan secara *community base resources management*, ada tiga alasan teoritis arti penting titik berat Otonomi Daerah pada Dati II, yakni *local variety*, *local resources*, dan *local accountability*. *Local Variety* menyangkut keanekaragaman berbagai potensi daerah; *local resources* menyangkut keanekaragaman sumber daya yang dimiliki Dati II; dan *local accountability* menyangkut kemampuan pertanggungjawaban Dati II dalam Otonomi Daerah. Bahwa Dati II paling sesuai dengan idealisme Otonomi Daerah. Pertama, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksible ketimbang yang tersentralisasi. Kedua, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih efektif dan inovatif dari pada yang tersentralisasi. Ketiga, lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi.” (Josef, 1991 : 79)

Dalam konteks demikian, berbagai faktor kemampuan seperti keuangan daerah, personil, partisipasi masyarakat, ekonomi daerah, demografi, organisasi dan administrasi, harus dijadikan acuan kebijakan sedemikian rupa hingga mampu merealisasikan Otonomi Daerah dengan baik, masalah desentralisasi bukan sekadar jawaban dari suatu krisis keuangan dari Pemerintah Pusat. Lebih dari itu, desentralisasi merupakan suatu kebutuhan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, merupakan instrumen stabilisasi, distribusi dan sebagai peningkatan servis kolektif atau yang lebih dikenal sebagai pelayanan masyarakat.

Secara ringkas, desentralisasi adalah instrumen manajemen pembangunan yang efisien. Dari pengalaman yang ada, memang terbukti pola sentralisasi cenderung menimbulkan biaya tinggi akibat lambannya birokrasi, selain tidak mendorong kreativitas dan motivasi untuk membangun, sedangkan pola pembangunan lebih induktif dan instruktif daripada partisipatif.

Contoh konkret yang masih segar adalah “kegagalan” negara-negara Eropa Timur dikarenakan ketidakmampuan sistem pemerintahannya yang sangat sentralistis, termasuk sistem perencanaannya.

Bagaimana dengan desentralisasi yang diinginkan di Indonesia? Kondisi geografis Indonesia dengan wilayah yang menyebar terpencar, membuat masalah pembangunan nasional demikian kompleks. Pembangunan tidak mungkin diorientasikan hanya pada dimensi optimalisasi dukungan dan pengembangan sumber daya di daerah-daerah, tapi juga pada dimensi persatuan dan kesatuan.

Desentralisasi yang dimaksudkan agar daerah dapat lebih mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, jelas memerlukan keserasian kewenangan dan tanggung jawab jajaran pemerintahan. Artinya, harus ada kejelasan hubungan antara Pemerintah Pusat sebagai pengendali pemerintahan dengan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pelaksana Pemerintah Pusat di daerah, dengan Daerah Tingkat II yang mengoperasikan pembangunan di daerah dan pembangunan daerah.

Di Perancis, di mana negara tersebut merupakan negara kesatuan, sistem pemerintahannya banyak persamaan dengan Indonesia. Pemerintahan Daerah Tingkat I-nya dikepalai oleh seorang *prefet* atau gubernur, yang diangkat oleh Presiden sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan berfungsi sebagai koordinator dan dinamisator seluruh kegiatan pembangunan nasional di daerah.

Dalam tinjauan manajemen, fungsi *prefet* atau gubernur ini sebagai semat penyambung (*linking-pin*).

Sebagai senjata pamungkas, *prefet* (gubernur) ini diberi kewenangan sebagai *ordonatuer* tunggal yang memberikan otorisasi pengeluaran dana pembangunan di daerah bagi seluruh Kanwil Departemen Sektoral yang ada di daerahnya. Jadi, dengan wewenang ini *prefet* mempunyai alat koordinasi yang efektif di daerah, di samping *prefet*lah yang mengevaluasi dan merekomendasi subsidi dari Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat II.

Sebagai dampak dari reformasi total ini, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan, adalah terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik.

Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, dianggap relevan untuk mewujudkan Otonomi Daerah, dimana otonomi adalah masalah masyarakat, perilaku hidup, perilaku aspirasi masyarakat setempat.

Ada 2 (dua) alasan politis yang bisa menjelaskan Otonomi Daerah, pertama Otonomi Daerah tetap konsekwen dengan keharusan daerah untuk mandiri dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kedua keberadaan pelembagaan politik daerah yang menempatkan lembaga legislatif pada posisi yang cenderung lebih berdaya dan lembaga eksekutif pada posisi yang cenderung kurang berdaya.

Desentralisasi politik adalah bagaimana mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada badan yang dipilih melalui pemilihan lokal dan mampu menjadikan unit pemerintah yang mandiri dan independen, sedangkan desentralisasi politik adalah peralihan kekuatan ke unit-unit

geografis pemerintah lokal, juga merupakan cara untuk lebih mendekatkan pembangunan pada rakyat yang lebih mengetahui situasi dan kebutuhan mereka sendiri. "Sukses pelaksanaan Otonomi Daerah akan ditentukan oleh kesiapan Sumber Daya Manusia, termasuk kesiapan aparat dan masyarakat." (Kelana, 1996 : 67)

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom itu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka ada beberapa ukuran yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan Otonomi Daerah, yaitu antara lain :

"Pertama, Kemampuan Struktur Organisasinya : Struktur organisasi Pemerintah Daerah mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggungjawabnya. Kedua, Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah : Menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Ketiga, Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat : Dengan struktur organisasi dan kelincahan aparatnya. Keempat : Kemampuan Keuangan Daerah : Semua kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, memerlukan banyak biaya. Oleh karena itu perlu diperkirakan apakah Pemerintah Daerah mampu membiayai semua kegiatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri." (Syamsi, 1988 : 199)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Otonomi Daerah, adalah :

"Faktor pertama yaitu manusia pelaksananya harus baik adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Faktor kedua adalah keuangan yang baik. Istilah keuangan mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup dan baik, pengertian peralatan adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Daerah. Faktor keempat adalah organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi adalah dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain" (Josef, 1991 : 59)

Jadi dapat disimpulkan bahwa Otonomi Daerah adalah penyerahan kewenangan ke daerah atau dengan kata lain suatu daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dengan azas desentralisasi, dengan harapan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengurangi ketimpangan sosial ekonomi antar daerah dan antar warga masyarakat, pemberantasan kemiskinan, penekanan pengangguran, menumbuh kembangkan peranan ekonomi kerakyatan, peningkatan Sumber Daya Manusia, pelaksanaan demokrasi yang lebih transparan, peningkatan kerjasama, pengelolaan Sumber Daya Alam dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan, yang pada akhirnya mampu mewujudkan kemandirian dan sosial ekonomi daerah.

Untuk mewujudkan Otonomi Daerah, sebagaimana penjelasan tersebut di atas maka banyak faktor-faktor yang harus mendapat perhatian serius dan kontinue, yang diarahkan pada pelaksanaannya yaitu masyarakat dan pemerintah di daerah. Kemudian dalam penulisan ini dibatasi pada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu :

1. Faktor Manusia (SDM)
2. Faktor Keuangan
3. Faktor Peralatan
4. Faktor Organisasi dan Manajemen
5. Faktor Kewenangan

Kemudian dalam *Good Governance* tentu saja apabila tingkat pemberdayaan masyarakat sudah cukup kondusif untuk itu, perlu dipikir benar-benar apa Pemerintah *the state* perlu melakukan sendiri operasi / jadi

pelaku pasar / investasi usaha / melakukan pelayanan sendiri. Apakah tidak lebih baik *confine/* membatasi pada fungsi pemerintahan yang esensial, yaitu kebijaksanaan pemerintah. Kebijakan luar negeri, kebijakan (politik) dalam negeri, kebijakan keuangan dan moneter, kebijakan anggaran, kebijakan industri dan perdagangan, keamanan dan pertahanan. Tetapi usaha perbankan, badan usaha perdagangan bisa diserahkan pada sektor swasta atau privatisasi. Bahkan dalam operasi services seperti listrik, telekomunikasi, jasa angkutan, kebersihan kompleks sudah tidak perlu mesti pemerintah. Dalam informasi dan komunikasi jasa-jasa TV, radio, media cetak dan elektronik sudah bisa swasta. Pada masa etatisme, serba negara kecenderungannya monopoli oleh pemerintah. Sekarang bisa bukan organisasi pemerintah melainkan diubah jadi badan pelayanan umum/publik.

Dari fungsi-fungsi yang sebaiknya dilakukan pemerintah sendiri (*the state*) bisa dibagi dalam kewenangan-kewenangan pusat dan kewenangan-kewenangan daerah (otonomi). Yang bersifat pelaksanaan lebih berat di daerah. Di beberapa negara bahkan ada polisi distrik/lokal. *Taxing power* dalam bentuk pajak daerah juga bisa diberikan kepada daerah. Tentang hal ini catatan sebelum bagian ini perlu diperhatikan. Sebaiknya melalui *tax share* (Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah). Mengenai pendidikan dan pelayanan kesehatan demikian pula, banyak yang bisa di "daerah"kan. Bahkan banyak penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan swasta, organisasi masyarakat. Program Keluarga Berencana dan program sosial serta pemeliharaan kelestarian lingkungan dapat dilakukan oleh

organisasi masyarakat sendiri berdasarkan swadana dan swadaya masyarakat.

“Langkah privatisasi perlu dilakukan, menjadikan perusahaan negara sebagai badan publik yang terbuka sahamnya bagi investasi di luar pemerintah. Pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi usaha masyarakat” (Tjokroamidjojo, 2001 : 97)

2.2 Keuangan Negara / Daerah

Keuangan Negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya dalam bidang perekonomian tersebut.

“Keuangan Negara merupakan studi mengenai pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja.” (Suparmoko, 1979 : 1)

Ada juga yang berpendapat yang lain mengemukakan :

“Keuangan Negara atau Anggaran adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan dalam bentuk angka-angka. Didalamnya dinyatakan tentang jumlah penerimaan-penerimaan yang minimal diharapkan dan pengeluaran yang setinggi-tingginya yang diukur dengan nilai uang diharapkan pada suatu periode atau waktu tertentu. Anggaran ini biasanya disusun secara sistematis menurut bidang dan program serta proyek-proyek kegiatan.” (Larasati, 1986 : 7)

Dengan demikian keuangan negara adalah hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang,

berhubungan dengan hak-hak negara dan badan hukum publik baik keuangan negara maupun badan hukum publik yang lebih rendah dan merupakan bagian dari pada ilmu ekonomi yang terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta pengaruh-pengaruhnya dalam perekonomian tersebut.

“Secara teoritis terdapat 3 macam sistem anggaran yakni anggaran *surplus*, anggaran *balance*, anggaran *defisit*. Disebut anggaran *balance* jika pengeluarannya sama dengan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran tertentu. Sedangkan sistem anggaran *defisit* memungkinkan pemerintah mempunyai pengeluaran yang melebihi pendapatannya. Kekurangan atau defisit kemudian ditutup melalui pinjaman, baik dari / melalui masyarakat (*obligasi*) maupun pinjaman luar negeri (hutang). Sedangkan anggaran *surplus* adalah penerimaan diupayakan lebih tinggi dari pengeluaran, sehingga terdapat *surplus* (tabungan)”. (Hamzah, 2001 : 85)

Semakin meningkatnya kegiatan pemerintah berarti semakin besar pula pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah tersebut yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum, tidak saja meliputi kegiatan pemerintahan saja, namun juga berkaitan dengan pembiayaan kegiatan perekonomian, dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara selalu ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian, meski ada perbedaan kadar campur tangan tersebut. Dalam konteks perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dipilah dan ditelaah menjadi empat macam kelompok peran, yaitu: peran alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi; peran distribusi, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya,

kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar; peran stabilisasi, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika dalam keadaan disequilibrium; dan peran dinamisasi, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Keuangan negara secara umum adalah membahas tentang aktivitas pemerintah terutama yang menyangkut masalah anggaran pendapatan dan belanja baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa pakar ekonomi telah memberikan definisi mengenai keuangan negara khususnya tentang pendapatan dan belanja negara.

“Kemudian dapat dipahami bahwa semua kegiatan pemerintah itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya ini berasal dari berbagai sumber seperti pajak, cukai, sumbangan, penghasilan dari perusahaan-perusahaan pemerintah, pinjaman dari dalam dan luar negeri dan pungutan lain sesuai dengan ketentuannya. Ilmu yang khusus mempelajari penerimaan dan pengeluaran ini adalah ilmu keuangan negara”. (Partadiredja, 1977 : 125)

Mengenai teori keuangan negara sesuai dengan namanya membahas keuangan hukum publik, baik keuangan negara maupun keuangan badan hukum publik yang lebih rendah ruang lingkungannya.

“Ilmu keuangan negara dalam arti luas, tidak terbatas pada aspek-aspek sosial, ekonomis tentang masalah keuangan dari pada hukum publik keuangan negara, seperti pula halnya semua urusan yang tampak dalam kejadian masyarakat, dapat dirinjau dari berbagai sudut. Dengan demikian maka keuangan negara selain dapat ditinjau dari berbagai sudut. Misalnya dari sudut hukum publik, sudut administratif organisatoris dan sudut sosial”. (Goedhart, 1973 : 6)

Dalam kegiatan pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota. Untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota juga diberikan kewenangan untuk mengumpulkan dana sebagai pendapatan murni daerah, pendapatan murni inilah kemudian digunakan oleh daerah untuk membiayai proyek-proyek daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan “Suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan daerah, pada suatu masa depan dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa yang akan datang”. (Mulia, 1987: 298)

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah diperlukan “Empat sumber pendapatan yang potensial : Pertama, Pembayaran untuk jasa. Kedua, Pajak sumber pendapatan utama. Ketiga, Pinjaman. Keempat, Penciptaan uang baru.” (Due, 1968 : 99)

Pemerintah Kota seharusnya berusaha meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunnya, karena tuntutan penduduk akan pelayanan umum dan sosial semakin meningkat, hal ini untuk menciptakan kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lazim disebut Keuangan Daerah.

“Keuangan daerah secara sederhana dapat dirumuskan, semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki / dikuasi oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku.” (Wojang, 1995 : 16)

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan perkembangan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pembangunan secara luas selalu mengacu kepada proses perubahan struktural, baik struktur ekonomi maupun sosial budaya yang dapat menciptakan suatu kondisi aman bagi kehidupan umat manusia. Pemerintah memegang peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan suatu daerah, karena dengan melalui pengeluaran, pemerintah berperan menjamin bahwa suatu keputusan yang menyangkut pengalokasian anggaran yang terbatas telah mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan akibat yang akan timbul jika dilihat dari perekonomian keseluruhan.

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab tanpa membahas keuangan daerah, seperti membahas kulit tanpa membahas isinya. Guna menyelenggarakan pemerintahan yang intinya pada pelayanan pada masyarakat diperlukan dana yang besar dan cukup meningkat, sesuai dengan terus meningkatnya kebutuhan dan keinginan masyarakat, melalui kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh pembagian keuangan antara pusat dan daerah, yang merupakan syarat menjalankan pemerintahan.

Pemerintah daerah bisa mengumpulkan dana sebagai pendapatan murni daerah, pendapatan murni inilah kemudian digunakan oleh daerah untuk membiayai proyek-proyek daerah.

Keuangan daerah secara sederhana dapat dirumuskan, semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki / dikuasi oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah yang ditegaskan pada pasal 3 dalam pelaksanaan desentralisasi, adalah :

- a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan, bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, selain itu adanya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
- c. Pinjaman Daerah, semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- d. Lain-lain penerimaan yang sah, hibah atau penerimaan dari daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten / Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundangan.

1. Struktur Pendapatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perincian :

1) Pajak Daerah, terdiri dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Konsumsi Listrik
- f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C
- g) Pajak Parkir

2) Retribusi Daerah, terdiri dari :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Kebersihan Kota (RKK)
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah
- e) Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- j) Retribusi Terminal
- k) Retribusi Penyedotan Kakus
- l) Retribusi Rumah Potong Hewan
- m) Retribusi Tempat Pendaratan Kapal
- n) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- o) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- p) Retribusi Izin Ganggung (HO)
- q) Retribusi Izin Trayek
- r) Retribusi Izin Angkutan Orang
- s) Retribusi Izin Angkutan Barang
- t) Retribusi Izin Usaha Angkutan Sungai
- u) Retribusi Gerobak Sorong

- v) Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal
 - w) Retribusi Mobil Derek
 - x) Retribusi Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor
 - y) Retribusi Leges dan Biaya Administrasi
 - z) Retribusi Limbah Domestik dan Lingkungan Hidup
 - aa) Retribusi Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan
 - ab) Retribusi Tempat Penumpukan Kayu Budar / Kayu Masak dan Bahan Bangunan Lainnya
 - ac) Retribusi Usaha Peternakan, Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas, Telur Unggas
 - ad) Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan
 - ae) Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan
 - af) Retribusi Izin Kegiatan Pengusahaan Di Bidang Kesejahteraan Sosial
 - ag) Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Promosi
 - ah) Retribusi Pelayanan Perizinan Usaha Lahan Pertanian dan Penggunaan / Pengujian Alat Pertanian
 - ai) Retribusi Pelabuhan Udara
 - aj) Retribusi Pendirian dan Daftar Ulang Lembaga Pendidikan Luar Sekolah serta Pelayanan Peningkatan Pendidikan
 - ak) Retribusi Pelayanan Jasa Usaha Koperasi
 - al) Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
 - am) Retribusi Sertifikasi Kapal Sungai
 - an) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
 - ao) Retribusi Usaha Kepariwisataaan
 - ap) Retribusi Pertambangan Umum
- 3) Bagian Laba Badan Usaha Daerah
- a) Perusahaan Daerah Air Minum
 - b) Perusahaan Daerah Pergudangan
 - c) Bank Pembangunan Daerah

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, dengan item :

- (1) Angsuran Cicilan Rumah Dinas
- (2) Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor
- (3) Pengembalian Modal Koperasi
- (4) Kontribusi Pelabuhan Laut (PT. Pelindo)
- (5) Kontribusi Packing Plan Semen Tonasa / Bosowa
- (6) Penerimaan Jasa Giro
- (7) Denda

b. Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pusat:

1) Provinsi, dengan perincian :

- Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari :

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB)
- (2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- (3) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah / Air Permukaan (P3ABT)
- (4) Bantuan / Subsidi Pembangunan

2) Pusat, dengan item :

- a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c) Pajak Penghasilan (PPh)
- d) Sektor Kehutanan
- e) Sektor Pertambangan
- f) Sektor Perikanan
- g) Sektor Minyak Bumi
- h) Sektor Gas Alam
- i) Dana Alokasi Umum (DAU)
- j) Dana Alokasi Khusus (DAK)

c. Lain-lain Penerimaan yang Sah

2. Struktur Belanja dengan perincian :

a. Belanja Rutin dengan item :

- 1) Gaji
- 2) Belanja Barang
- 3) Belanja Pemeliharaan
- 4) Belanja Perjalanan Dinas
- 5) Lain-lain.

b. Belanja Pembangunan merupakan variabel endogen yang digunakan untuk Pembangunan Kepentingan Sosial / *Social Overhead Capital (SOC)* dan Pembangunan Menghasilkan Pendapatan / *Directly Productivity Investment (DPI)* :

1) Pembangunan Kepentingan Sosial / *Social Overhead Capital*

(SOC), dengan item :

- a) Industri
- b) Pertanian dan Kehutanan
- c) Sumber Daya Air dan Irigasi
- d) Tenaga Kerja
- f) Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi
- g) Transportasi
- h) Pertambangan dan Energi
- i) Pariwisata dan Telekomunikasi
- j) Pembangunan Daerah dan Pemukiman
- k) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
- l) Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga
- m) Kependudukan dan Keluarga Berencana
- n) Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peran Wanita, Anak dan Remaja
- o) Perumahan dan Pemukiman

- p) Agama
- q) IPTEK
- r) Hukum
- s) Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan
- t) Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

2) Pembangunan Menghasilkan Pendapatan (*Directly Productivity*

Investment / DPI), dengan item :

- a) Industri
- b) Pertanian dan Kehutanan
- c) Sumber Daya Air dan Irigasi
- d) Tenaga Kerja
- e) Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi
- f) Transportasi
- g) Pertambangan dan Energi
- h) Pariwisata dan Telekomunikasi
- i) Pembangunan Daerah dan Pemukiman
- g) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
- h) Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga
- i) Kependudukan dan Keluarga Berencana
- j) Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peran Wanita, Anak dan Remaja
- k) Perumahan dan Pemukiman
- l) Agama
- m) IPTEK
- n) Hukum
- o) Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan
- p) Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

3. Kemandirian Wilayah, dengan perincian :
 - a. Pendapatan Asli Daerah / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAD/APBD)
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Produk Domestik Regional Bruto (APBD/PDRB)
 - c. Pendapatan Asli Daerah / Produk Domestik Regional Bruto (PAD/PDRB)
4. Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat dengan perincian :
 - a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 - b. Pendapatan Per kapita
 - c. Tenaga Kerja
 - d. Pendidikan
 - e. Kesehatan

2.3 Pembangunan Sektoral

Kerangka teori tentang pertumbuhan ekonomi pada prinsipnya berfokus pada hubungan perimbangan antara tabungan (*saving, S*), investasi (*investment, I*) dan pendapatan (*product, Y*) serta berpangkal dari hasrat untuk menabung (*propensity to save*); sedangkan kelangsungan dari pertumbuhan ekonomi itu berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh serangkaian kegiatan ekonomi masyarakat, yang meliputi kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi / niaga dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Salah satu alat ukur yang penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi ataupun pembangunan ekonomi adalah *Produk Nasional* atau *Pendapatan Nasional* yang lazim divisualkan dalam bentuk angka-angka statistik dalam satuan mata uang, yang menunjukkan nilai dari seluruh barang dan jasa yang

dihasilkan melalui berbagai kegiatan ekonomi di suatu negara tertentu selama satu tahun. Nilai dari produk nasional tersebut pada hakikatnya ekuivalen dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat (Pemerintah + Dunia Usaha + Rumah Tangga – Keluarga) ataupun dengan jumlah pengeluaran yang bersangkutan dengan itu.

“Dalam menghitung Pendapatan Nasional, dapat digunakan tiga macam metode, yaitu (1) metode produksi (*production approach*) adalah total output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dengan formulasi $NT = NO - NI$ di mana $NT =$ Nilai Tambah, $NO =$ Nilai Produksi dan $NI =$ Nilai Input Antara; (2) metode pendapatan (*income approach*) adalah nilai total balas jasa atas produksi yang digunakan dalam proses produksi dengan formulasi $Q = f(L, K, U, E)$ di mana $Q =$ Output, $L =$ Tenaga Kerja, $K =$ Barang Modal, $U =$ Uang / Financial dan $E =$ kemampuan *entrepreneur* atau kewirausahaan; (3) metode pengeluaran (*expenditure approach*) adalah total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu dengan formulasi $PDB = C + G + I + (X - M)$ di mana $C =$ Konsumsi Rumah Tangga, $G =$ Konsumsi Pemerintah, $I =$ Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, $X =$ Ekspor dan $M =$ Impor. Secara teoritis, ketiga metode pendekatan tersebut dalam perhitungan saling melengkapi” (Rahardja, 2001 : 25-33).

Perhitungan tersebut dapat pula digunakan dua macam konsep :

1. *Konsep kewilayahan*, yang menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP), yaitu nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di negara tertentu.
2. *Konsep kewarganegaraan*, yang menghasilkan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP), yaitu semua penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir atau nilai tambah yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara tertentu selama satu tahun.

Sebelum mendalami teori tentang pertumbuhan ekonomi, perlu dipahami lebih dahulu penggunaan istilah perkembangan, pembangunan dan

pertumbuhan. Istilah *perkembangan* digunakan bila hal itu dikaitkan dengan paham evolusi (*evolution*), bukan dalam hubungan langsung dengan pertumbuhan (*growth*) ataupun pembangunan (*development*). Istilah perkembangan itu biasanya dikaitkan dengan ulasan Mazhab Klasik mengenai perkembangan ekonomi masyarakat yang terjadi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat pada abad XIX hingga dasawarsa ketiga abad XX.

Penggunaan istilah *pembangunan* dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi dalam perekonomian negara-negara berkembang dewasa ini (Pasca Perang Dunia II). Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh adanya perubahan struktural, baik perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena pertumbuhan ekonomi berpokok pangkal pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, maka istilah *pertumbuhan* digunakan dalam teori dinamika yang dikembangkan oleh para pemikir Neo-Keynes dan Neo-Klasik. Hasil dari proses pertumbuhan tersebut dapat dilihat melalui peningkatan produksi secara keseluruhan dari waktu ke waktu yang susul menyusul (*time series*); atau melalui perubahan dalam struktur ekonomi secara sektoral.

“Teori Pertumbuhan Ekonomi, pada hakekatnya merupakan (a) penjelasan tentang faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang; dan (b) penjelasan tentang bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga proses pertumbuhan benar-benar terjadi dalam kenyataan. Singkat kata, teori pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu “ceritera” yang logis tentang bagaimana terjadinya proses pertumbuhan itu” (Boediono. 1988 : 2-3)

Dalam ilmu ekonomi tidak ada satupun pertumbuhan yang menyeluruh dan lengkap, yang merupakan satu-satunya teori pertumbuhan yang baku. Suatu hal yang harus betul-betul dimengerti dalam memahami teori-teori pertumbuhan ialah bahwa para ekonom terkemuka, sejak lahirnya ilmu ekonomi, mempunyai pandangan yang tidak selalu sama tentang proses pertumbuhan suatu perekonomian. Ada yang dipengaruhi oleh keadaan atau peristiwa yang terjadi semasa ekonom itu masih hidup, dan ada pula yang terpengaruh karena ideologi yang dianutnya. Oleh karena itu berikut ini dipaparkan beberapa pandangan dan teori mengenai pertumbuhan ekonomi tersebut.

Berbagai fenomena ekonomi yang berlangsung di masyarakat Eropa Barat dan Amerika Serikat pada masa itu menunjukkan keadaan yang relatif sudah maju, karena telah mempunyai landasan industri dengan produksi dan pendapatan yang semakin meningkat. Fenomena tersebut oleh para pemikir ulung Mazhab Klasik (Adam Smith, Ricardo, Malthus, dan lain-lain) dipandang sebagai suatu sistem ekonomi masyarakat secara menyeluruh dalam jangkauan pangsa waktu yang cukup panjang.

Dalam fungsi produksi misalnya, mereka menempatkan (1) modal dan tenaga kerja sebagai faktor-faktor yang bersifat variabel, sedangkan (2) tanah (Sumber Daya Alam) dianggapnya sebagai faktor yang bersifat tetap (*fixed*). Di samping itu faktor teknologi dianggapnya bersifat "kaku" (*frigid*) karena perubahan teknologi pada zaman itu memang memerlukan waktu yang agak panjang. Dengan cara pandang yang demikian, maka para pemikir Mazhab Klasik waktu itu menampilkan sistem analisis yang didasarkan pada

postulat-postulat yang masih sangat sederhana dan terlalu umum, dengan anggapan bahwa perkembangan ekonomi berjalan dalam keadaan pasar bebas dengan persaingan sempurna tanpa adanya unsur monopoli. Sistem analisis tersebut berkisar pada proses pembentukan modal secara kumulatif, di mana akumulasi modal bersumber dari tabungan masyarakat yang disalurkan sebagai investasi. Tingkat investasi (I) dianggap sebagai fungsi dari tingkat laba (P), sehingga $I = f(P)$; sedangkan akumulasi modal melalui investasi hanya berlangsung sejauh kegiatan-kegiatan usaha masih dapat menghasilkan laba. Dengan gagasan-gagasannya itu para pemikir Mazhab Klasik telah berhasil memaparkan pandangan mereka dalam suatu wawasan yang luas tentang proses ekonomi yang berlangsung dalam perjalanan waktu yang panjang.

Para pemikir ekonomi Mazhab Historismus menganut pendapat seakan-akan di bidang ekonomi tidak diperlukan pendekatan yang berpangkal pada teoritis, karena hal itu dianggapnya terlalu abstrak. Mazhab ini lebih mengutamakan studi-studi sistematis tentang fakta-fakta dan fenomena ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Karya-karya ilmiah mereka memang telah mencakup sedemikian banyak fakta-fakta, tetapi sayang sekali karena tidak didukung dengan kerangka acuan yang terpadu, maka berbagai rupa penelitian yang telah dilakukan itu tidak mempunyai arah yang pasti. Akibatnya ialah bahwa hasil-hasil penelitian dan kajian mereka kurang memberi pemahaman analitis mengenai proses ekonomi.

Tokoh-tokoh terkemuka dari Mazhab Historismus ini ialah Karl Marx, Friederick List, W.W. Rostow, dan lain-lain.

Pemikiran para ekonom Mazhab Analitis lebih ditekankan pada teori (“cerita”) yang bisa mengungkap proses pertumbuhan ekonomi secara logis dan konsisten. Sayangnya pemikiran itu seringkali lebih bersifat abstrak karena kurang menekankan pada sisi empiris / historisnya. Kecenderungan semacam itu terlihat jelas dalam “teori-teori pertumbuhan modern”, yang banyak menggunakan terminologi yang bersumber dari konsep dan metodologi agregatif Keynes dalam karya besarnya : *The General Theory of Employment, Interest and Money 1936*.

Salah satu ciri pokok yang berasal dari kerangka pemikiran dan pola pendekatan Keynes itu adalah mengenai permintaan agregatif dan pengeluaran agregatif serta cara pengendalian unsur-unsur dinamika yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dalam perjalanan waktu, terutama dalam rangka menjaga kestabilan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja penuh dan pemanfaatan kapasitas produksi terpasang.

Kemudian, para pemikir Neo-Keynes dan Neo-Klasik mengalihkan pokok perhatiannya pada usaha-usaha peningkatan produktivitas disamping upaya menjaga kestabilan pendapatan dan kesempatan kerja, yaitu melalui pengendalian permintaan.

Selanjutnya seorang pakar dari Mazhab Analitis memandang kegiatan ekonomi masyarakat berpangkal tolak dari perhitungan nasional (*national account*) yang penjabarannya terlihat sebagai komponen-komponen dalam pendapatan nasional. Kuznetz berhasil memberi substansi secara empiris-kuantitatif tentang pengertian-pengertian pokok dalam kerangka analisis Keynes, seperti hubungan antara : konsumsi-tabungan-

investasi-pendapatan di dalam struktur ekonomi secara menyeluruh. Satu sama lain dikaji menurut tahapan perkembangan yang susul-menyusul, yang dikenal sebagai *time series analysis*.

Oleh Kuznetz, pemikiran teoritis mengenai ekonomi dijemakan dari ilmu deduktif, yang selanjutnya digunakan sebagai landasan penelitian tentang masalah pertumbuhan ekonomi. Penelitiannya itu berkisar pada perkembangan historis mengenai produksi nasional dan pendapatan nasional. Pemantauannya melibatkan *time series*, baik yang bersifat ekonomis maupun yang bersifat demografis. Perhatiannya ditujukan pada perubahan-perubahan dalam struktur dan komposisi pendapatan nasional menurut perkembangan waktu.

Menurut Kuznetz, pertumbuhan ekonomi ditandai oleh tiga ciri pokok yaitu :

- a. Laju pertumbuhan pendapatan per kapita (riil);
- b. Persebaran (distribusi) angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya; dan
- c. Pola persebaran penduduk.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa selama lebih dari satu abad, pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa Barat, Amerika Utara, Australia dan Jepang menunjukkan laju pertumbuhan pendapatan per kapita berkisar sekitar 15% per dasawarsa; suatu peningkatan yang belum pernah terjadi pada abad-abad sebelumnya.

Sebelum era pertumbuhan, kegiatan ekonomi para penduduk terpusat pada sektor-sektor primer yang bersifat ekstraktif : pertanian, perikanan dan di sana-sini pertambangan. Proses pertumbuhan ekonomi sejak zaman itu

ditandai oleh diversifikasi kegiatan sektoral dengan bertumbuhnya berbagai ragam dan jenis industri.

Dewasa ini di negara-negara maju hanya $\pm 5\%$ dari angkatan kerja yang berkecimpung secara produktif di sektor primer; sedangkan $\pm 35\%$ bekerja di sektor sekunder dan sisanya $\pm 60\%$ mendapat sumber nafkahnya di sektor tersier (jasa-jasa). Sebagian besar angkatan kerja di sektor tersier ini (25-30%) terlibat dalam kegiatan-kegiatan transportasi dan distribusi barang; sedangkan sisanya bekerja di bidang pemerintahan, perbankan, asuransi, dan sebagainya. Sebagai akibat arus penduduk dari daerah pedesaan menuju ke pusat-pusat kegiatan modern (*rural-urban migration*), maka timbullah konsentrasi-konsentrasi spasial di lingkungan kota dan sekitarnya. Fenomena urbanisasi ini merupakan suatu ciri penting yang melekat pada proses pertumbuhan.

Teori perubahan struktur ekonomi atau teori bioekonomi ini dikembangkan oleh A.G.B. Fisher dan Colin Clark, yang difokuskan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan perubahan pola pekerjaan tenaga kerja yang terjadi dalam pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat selama satu setengah abad (1820-1970). Jenis lapangan pekerjaan dibagi dalam tiga kelompok yaitu (a) sektor primer, (b) sektor sekunder, dan (c) sektor tersier. Selama satu setengah abad itu telah terjadi perubahan struktur atau pola pekerjaan masyarakat di Amerika Serikat dimana dengan penduduk sebanyak 202 juta jiwa pada tahun 1970; angkatan kerja yang bekerja di sektor primer berkurang dari 72% menjadi 8%, sedangkan di

sektor sekunder meningkat dari 13% menjadi 34% dan di sektor tersier meningkat pula dari 15% menjadi 58%.

“Selanjutnya dikatakan bahwa teori tentang perubahan struktur ekonomi tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh Kuznets, Hagen, Hawrylyshyn (1969) dan Chenery, Elkington dan Sims (1970) dengan memasukkan ke dalam pola struktur yang diteliti itu, bukan hanya penyerapan tenaga kerja tetapi juga nilai tambah (*added value*) dari masing-masing sektor, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan komposisi atau distribusi sektoral di semua negara yang diamati sangat ditentukan oleh besarnya jumlah pembentukan modal terhadap *Gross National Product* (GNP), dan produksi dari sektor sekunder serta komposisi ekspor barang produksi sektor primer terhadap GNP, karena ketiga faktor tersebut berpengaruh pula pada tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dari suatu negara.” (Zadjuli, 1986 : 55-58)

Pembangunan daerah perlu senantiasa ditingkatkan agar laju pertumbuhan antar daerah semakin seimbang dan serasi sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakin merata diseluruh Indonesia. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa pembangunan daerah perlu dilaksanakan secara terpadu, selaras, serasi dan seimbang serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung disetiap daerah sesuai prioritas dan potensi daerah.

“Pemerintah harus melakukan desentralisasi pembangunan, terutama berkaitan dengan beberapa sektor pembangunan yang dipandang sudah mampu dilaksanakan oleh daerah masing-masing, pada kenyataannya bahwa masing-masing daerah memiliki potensi, baik sumber daya alam, manusia maupun kondisi geografis yang berbeda-beda menyebabkan ada daerah yang memiliki potensi untuk berkembang secara cepat dan sebaliknya, ada daerah yang kurang dapat berkembang karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya” (Tjiptoherijanto, 1997 : 46)

Memahami teori basis dan non-basis ini merupakan pengembangan dari teori perdagangan (*comparative advantage*) dari Ricardo dan J.S. Mill,

teori-teori lokasi dari Ohlin, Losch dan Isard yang digabungkan dengan teori perkembangan masyarakat (tradisional versus perkotaan) dari Hoyt.

Teori tersebut diterapkan untuk menganalisis perdagangan antar-daerah dalam suatu negara, berdasarkan sistem regionalisasi, dimana wilayah negara dibagi dalam dua tipe daerah, masing-masing adalah (1) daerah basis atau daerah surplus, dan (2) daerah bukan basis atau daerah non-basis atau daerah minus. Suatu daerah dikatakan daerah basis atau daerah surplus apabila daerah tersebut mampu untuk berswasembada dalam memenuhi sendiri kebutuhan daerahnya. Kecuali itu daerah tersebut dapat pula mengirimkan kelebihan barang, jasa dan modal ataupun tenaga ahli yang ada di daerahnya ke daerah lain yang membutuhkannya. Sebaliknya apabila suatu daerah ternyata tidak atau belum mampu memenuhi sendiri kebutuhan daerahnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya itu daerah tersebut perlu mendatangkan barang, jasa dan modal atau bahkan tenaga ahli dari daerah lain, ataupun membutuhkan subsidi dari Pemerintah, maka daerah itu disebut daerah bukan basis atau daerah non-basis atau daerah minus. Pembagian wilayah menjadi dua tipe daerah seperti diuraikan di atas berimplikasi terjadinya perdagangan satu arah, yaitu dari daerah basis ke daerah non-basis. Berdasarkan teori basis dan non-basis tersebut, struktur ekonomi daerah dapat diidentifikasi menurut klasifikasi sektoral, sehingga dikenal apa yang disebut sektor basis-non basis.

Walter Isard yang dikenal sebagai pendiri Ilmu Regional, dalam batas tertentu mempunyai pandangan yang mungkin serupa dengan visi Auguste Comte tentang Sosiologi. Kalau Comte, yang berkeyakinan penuh

akan adanya tahap akhir dari pemikiran ilmiah, berpendapat bahwa pengetahuan mengenai berbagai ilmu pada hakekatnya menyatu dan saling berkaitan (*knowledge in the various sciences is unified and related*), maka Isard juga berprinsip serupa meskipun tidak se-ambisius Comte. Dengan resiko akan dianggap terlalu berlebihan, Isard tetap mengemukakan keyakinannya bahwa ilmu regional mungkin merupakan satu disiplin tempat menyatunya berbagai ilmu.

Dengan menggunakan sejumlah peralatan analisis dari ilmu ekonomi seperti : kurva isokuan, garis perbandingan harga, kurva biaya dan lain-lain, ternyata Isard berhasil mengembangkan teori lokasi Von Thunen (1826) menjadi ilmu regional. Selain untuk membedakannya dengan ilmu ekonomi konvensional, juga terlihat dengan jelas bahwa ilmu regional menunjukkan keterkaitannya yang erat dengan ilmu ekonomi. Itulah sebabnya banyak pengamat berpendapat bahwa ilmu ekonomi spasial (*spatial economics*) adalah merupakan nama alternatif.

Meskipun masih berusia relatif muda, ternyata ilmu regional sudah diterima sebagai disiplin ilmu yang kuat. Pemanfaatan ilmu regional, terutama untuk formulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan (*policy formulation and development planning*), menuntut adanya keterkaitan yang serasi dengan ilmu-ilmu lain. Kekhususan ilmu regional terletak pada fokus perhatiannya yang sangat menonjol terhadap keterkaitan antara dimensi spasial dan dimensi waktu serta perlakuan yang stimulan atas kedua dimensi tersebut dalam menjelaskan, memprediksi dan memecahkan berbagai masalah ekonomi-sosial. Sehubungan dengan hal itu perhatian utama ilmu

regional umumnya berkisar pada masalah-masalah : (1) lokasi atau sistem lokasi; (2) daerah perkotaan (urban) atau sistem alokasi sumber atau sistem penggunaan sumber.

Pengertian wilayah (*region*) dalam ilmu regional bukanlah sekedar wilayah yang didemarkasi secara arbitrary, tetapi wilayah yang sangat berarti karena di dalamnya terdapat beberapa masalah sosial-ekonomi yang terkait dengan region tersebut. Suatu wilayah dengan garis lintang antara $20^{\circ} - 30^{\circ}$ dan garis bujur antara $50^{\circ} - 70^{\circ}$ praktis tidak punya arti apa-apa dalam ilmu ekonomi konvensional. Akan tetapi bilamana wilayah itu memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, meskipun wilayah itu hanya merupakan bagian dari suatu provinsi atau suatu kabupaten, justru besar artinya bagi seorang ilmuwan di bidang ilmu ekonomi spasial, karena di dalamnya terkandung berbagai masalah ekonomi-sosial yang berkaitan dengan kehidupan perkotaan, seperti masalah perumahan, masalah sanitasi, jasa publik, dan lain-lain. Dengan demikian dapat dipahami / ditegaskan perbedaan pokok antara ilmu regional dengan ilmu ekonomi konvensional, terutama mengenai perlakuannya terhadap dimensi spasial.

Dalam ilmu ekonomi, biasanya dimensi waktu mempunyai posisi sentral dan harga, waktu dicerminkan melalui tingkat bunga, sedangkan dimensi spasial hanya dianggap sebagai faktor yang cukup diperhitungkan secara implisit saja. Namun sebaliknya bagi seorang peneliti di bidang ilmu regional; dimensi spasial atau jarak, justru ditempatkan pada posisi kunci, sehingga biaya pengangkutan merupakan harga yang sangat penting untuk

diperhitungkan secara eksplisit di dalam analisis. Sejalan dengan pengertian tersebut, maka pertanyaan dimana, yang praktis terabaikan oleh ilmu ekonomi, menjadi sangat pokok dalam ilmu regional.

“Ciri paling jelas dari perekonomian ruang adalah ketidakhomogenannya, kita melihat bahwa terdapat *aglomerasi* kegiatan ekonomi dan distribusi penduduk pada lokasi-lokasi tertentu. *Agglomerasi* ini dapat dilihat terlepas dari apa yang menjadi pusat perhatian kita di dalam perekonomian nasional terdapat beberapa daerah yang penduduknya lebih padat, bagiannya dalam kegiatan industri lebih besar dan pendangannya lebih kosmopolitan dari pada daerah-daerah di dalam sesuatu daerah terdapat pusat-pusat yang dominan” (Richardson, 1991 : 52)

Seperti telah diuraikan di atas, ilmu regional mempunyai pemikiran dasar yang berdimensi spasial. Jarak dan lokasi, terutama yang menyangkut biaya pengangkutan, sangat pokok dalam analisisnya. Oleh karena itu keuntungan ekonomi yang berasal dari gejala spasial, seperti : penghematan karena aglomerasi (*agglomeration economies*), karena urbanisasi (*urbanization economies*) dan karena lokasi (*localization economies*) merupakan variabel yang diperhitungkan secara eksplisit. Ilmu ekonomi konvensional cenderung meremehkan berbagai unsur *spatial-juxtaposition* semacam itu.

“Bahwa fungsi spesialisasi suatu wilayah ditentukan berdasarkan suatu index yang menunjukkan ratio persentase distribusi tenaga kerja di sejumlah kota di Jepang, melalui suatu penelitian. Selanjutnya berdasarkan penelitian tersebut Wilkinson menggambarkan komposisi tenaga kerja dalam struktur ketenagakerjaan di masing-masing kota di Jepang. Parameter yang digunakan dalam menerapkan Wilkinson Index tersebut adalah nilai tambah sektor dan penyerapan tenaga kerja sektor yang bersangkutan. Rasio yang diperhitungkan untuk memperoleh angka indeks tersebut didasarkan pada peranan dari empat sektor terbesar. Sektor-sektor yang dianggap berperan dalam fungsi spesialisasi

tersebut adalah sektor-sektor yang diklasifikasikan telah mempunyai Indeks Wilkinson lebih dari 0,3 atau $WI > 0,3$; yang diukur dari nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.” (Wilkinson, 1965 : 215)

Dari sembilan sektor lapangan usaha, yang diambil adalah empat sektor terbesar dari nilai tambah PDB atau PDRB, karena keempat besar tersebut dianggap mampu menduduki peringkat (*ranking*) paling atas. Kemudian dari empat besar tersebut dihitung nilai indeksnya (WI), baik dari sisi nilai tambah maupun dari sisi penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai gabungan dari ekonomi daerah / provinsi (termasuk sektor pertambangan dan galian) menjadi semakin stabil namun dengan laju pertumbuhan yang makin menurun. Sebaliknya, bila (sektor pertambangan dan galian) diabaikan, pertumbuhan yang makin stabil diikuti dengan laju pertumbuhan yang makin meningkat. Dengan demikian sektor pertambangan dan galian masih cukup besar perannya dalam menentukan laju perkembangan ekonomi Indonesia dan daerah, terutama daerah yang berpotensi dalam sektor tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merupakan gabungan dari ekonomi daerah, bila diukur dengan *balanced growth index* antar daerah, termasuk dalam bentuk / pola pembangunan yang makin berimbang. Dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi, nampak bahwa *balanced growth index* berlaku di Indonesia. Makin tinggi tingkat ketidakseimbangan sektoral di suatu daerah, makin rendah laju pertumbuhan daerah tersebut.

Bila diamati menurut konsentrasi lokasi secara sektoral, berdasarkan nilai *absolute* dari indeks konsentrasinya terlihat bahwa secara umum kegiatan sektoral makin menyebar ke tiap daerah. Namun bila diamati

berdasar perbandingan urutan masing-masing sektor, terdapat beberapa sektor yang penyebaran lokasinya makin lambat, yaitu sektor pertanian, bangunan, perdagangan, sewa rumah dan sektor industri. Hal ini menimbulkan antara lain banyaknya daerah eksklusif (*enclave*) baru, baik di sektor pertanian, pertambangan dan galian, perdagangan, perumahan maupun sektor industri sehingga akibatnya dualisme struktural dalam sektor tersebut tetap berlangsung.

“Hasil pengamatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, seperti halnya pola nasional tanpa sektor pertambangan dan galian, menunjukkan pertumbuhan dengan pola tingkat ketidakstabilan yang makin rendah disertai oleh laju pertumbuhan ekonomi yang makin meningkat. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan hipotesa *balanced-growth*. Di Jawa Timur seperti halnya ditingkat nasional, juga telah terjadi pergeseran struktur yang meloncat tidak berurutan dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, melainkan penurunan peran sektor primer banyak diambil oleh sektor tersier” (Zadjuli, 1986 : 10-12)

2.4 Kemandirian Wilayah

Dalam wacana Kemandirian Lokal, negara merupakan perwujudan interkoneksi dari berbagai tatanan administratif (geo-politik) maupun fungsional yang memiliki kemandirian dalam mengembangkan dirinya sendiri.

Pembangunan menurut paradigma Kemandirian Lokal adalah Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tatanan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan; Berbasis pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki; Dikelola atas dasar peran serta (partisipasi) masyarakat.

Dikaitkan dengan otonomi maka Kemandirian Lokal sesungguhnya adalah substansi otonomi. Karena otonomi adalah suatu wujud penyerahan kompetensi pembangunan secara keseluruhan kepada masyarakat dan swasta. Otonomi akan berjalan dan berlangsung dalam proses yang berkepanjangan, dan akan selesai pada saat seluruh kompetensi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan telah berada ditangan masyarakat atau swasta.

Otonomi harus menjamin keberlangsungan identitas tatanan. Pembangunan terwujud berdasarkan tingkat potensi masing-masing tatanan. Otonomi harus dijabarkan secara multi dimensional atau secara holistik dan mencakup banyak aspek. Bukan hanya sekedar pelimpahan kewenangan dan pertimbangan keuangan. Otonomi adalah suatu proses demokratisasi yang membutuhkan waktu dan penyesuaian dari waktu ke waktu.

Pembangunan sebagai upaya pengembangan dan peningkatan kualitas tatanan yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri. Sedangkan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur di luar tatanan agar tatanan mampu berkembang secara mandiri.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa istilah pembangunan yang selama ini digunakan adalah setara dengan istilah pemberdayaan dalam konsepsi Kemandirian Lokal. Dari kaca mata Kemandirian Lokal, pemberdayaan dilihat sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang ada pada suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang diarahkan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya-upaya yang

diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkannya membangun dirinya sendiri.

Kemandirian tatanan dalam membangun dan mengembangkan dirinya merupakan nilai parameter yang dapat diketahui dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: Kemandirian masyarakat, sebagai unsur utama tatanan dalam pengembangan diri dan penyaluran aspirasinya. Aspek ini diartikan bahwa pada satu sisi terdapat kemampuan tatanan menyediakan berbagai pilihan kepada masyarakatnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya dan pada sisi lain diiringi dengan kemandirian masyarakat untuk melakukan pilihannya, termasuk menyalurkan aspirasinya (*choice and voice*). Terjadinya interaksi harmonis antar unsur-unsur tatanan dengan berbasis kepada kesadaran kosmologis. Unsur manusia dari suatu tatanan dapat saja terdiri atas sekelompok manusia yang berkualitas tetapi tidak memiliki interkoneksi yang harmonis dengan lingkungannya bukan merupakan tatanan yang diinginkan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berwawasan ekologis atau hubungan antar manusia yang berciri penindasan atau penguasaan satu orang / kelompok terhadap orang / kelompok lainnya merupakan contoh lain dari wujud tatanan yang buruk. Kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kualitas tatanannya.

Aspek ini mencerminkan bahwa tatanan yang berkualitas adalah tatanan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitasnya secara mandiri, tanpa bantuan dari unsur lain di luar tatanan. Hal ini berarti bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap suatu tatanan harus dianggap sebagai *prime-mover* saja, karena selanjutnya tatanan dimaksud akan

mampu berproses secara mandiri untuk membangun dan mengembangkan dirinya sendiri.

Pada hakekatnya kemandirian yang dimaksudkan disini bukanlah kemandirian yang bersifat absolut, tetapi bernuansa interkoneksi dan bersifat komplementaris. Kemandirian itu hanya akan bermakna dan berarti jika dapat dimanfaatkan dan memanfaatkan kemandirian yang dimiliki dan dikembangkan di tatanan yang lain. Tatanan menurut konsepsi Kemandirian Lokal adalah suatu "entitas organis" yang memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang secara mandiri.

Berdasarkan konsep ini, maka upaya-upaya pemberdayaan seyogyanya diarahkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kualitas elemen-elemen tatanan dan interkoneksi antar elemen dimaksud agar tercipta suatu wujud interkoneksi yang memungkinkan tatanan untuk membangun dirinya sendiri dan berkembang secara lebih baik. Dalam hal ini upaya pemberdayaan, yang dilakukan oleh unsur-unsur yang bukan merupakan elemen tatanan, bukan merupakan rangkaian proyek yang berkesinambungan, tetapi bersifat sebagai impuls saja yang berfungsi untuk memberikan energi awal kepada tatanan untuk berkembang secara mandiri.

Pembangunan, yang didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tatanan, dilakukan secara mandiri oleh elemen tatanan, dalam hal ini unsur masyarakat, dengan mengacu kepada prinsip: Pertama, Berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan tatanan. Kedua, Berbasis pada sumber daya yang dimiliki, dan Ketiga, Dikelola dengan partisipasi aktif masyarakat tatanan.

Paradigma pembangunan ini, maka peran pemerintah seyogyanya bergeser, demi untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada peran serta masyarakat. Dari ketiga peran utama pemerintah : pengendalian dan pengaturan, pelayanan masyarakat dan agen pembaruan / pemberdaya, seyogyanya dititik beratkan hanya pada peran pengaturan dan pengendalian saja. Seberapa jauh bobot peran pada ketiga aspek dimaksud juga tidak harus seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Disadari bahwa pada beberapa daerah, pemerintah masih perlu melaksanakan ketiga peran tersebut karena teknostruktur masyarakat belum berkembang, sebaliknya pada daerah lainnya, pemerintah cukup memainkan peran sebagai pengatur / pengendali saja.

Tetapi pada umumnya, fungsi sebagai agen pembaharuan, khususnya dilihat dari sisi pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, peran pemerintah masih diperlukan, karena aspek ini membutuhkan sumber daya yang tidak seluruhnya dapat disediakan oleh daerah yang paling makmur sekalipun. Minimal pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diperlukan bagi pembangunan daerah provinsi. Sedangkan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lainnya diselenggarakan secara nasional.

“Konsep pembangunan Kemandirian Lokal, eksploitasi sumber daya alam pada suatu tatanan harus dibarengi dengan upaya-upaya agar kualitas tatanan meningkat. Hal ini antara lain dilakukan dengan meningkatkan kualitas elemen-elemen tatanan yang lain, seperti manusia / masyarakat, teknostruktur dan kelembagaan dan lainnya dalam jumlah yang sebanding, agar tatanan mampu berkembang secara mandiri di masa-masa yang akan datang” (Gany, 2001 : 217)

Saat ini konsep otonomi mencakup wilayah kewenangan yang luas dan nyata di mana pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah sesuai aspirasi masyarakat setempat. Di masa Orde Baru Kebijakan pembangunan Daerah Otonom diletakan dalam kerangka otoritarianisme kekuasaan dan sentralisme pembangunan. Saat ini berada dalam kerangka demokratisasi serta desentralisasi pembangunan.

Pada masa lalu, hegemoni dan dominasi Pemerintah Pusat begitu kuat terhadap masyarakat daerah. Pemerintah Pusat serba menguasai atas seluruh aspek kehidupan masyarakat. Akibatnya daerah berada pada posisi yang sangat lemah.

Dengan adanya Otonomi, masyarakat daerah seolah menemukan kekuatannya dan merasa begitu bebas menentukan arah rumah tangganya sendiri berdasarkan kesatuan negara Republik Indonesia.

“Pergeseran dari era sentralisasi ke desentralisasi itu menandakan tengah terjadi perubahan paradigma baru seiring masa transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Sehingga ada kecenderungan yang semakin memandang Negara tidak lagi sebagai monster yang menakutkan melainkan sebagai institusi yang harus dikelola bersama-sama demi mewujudkan kebaikan bersama. Semakin berkembang pula kecenderungan di mana masyarakat memandang negara tidak lagi sebagai dewa yang serba tahu dan kepadanya segala sesuatu bergantung. Melainkan sebagai fasilitator, pelayanan publik dan pemelihara stabilitas” (Effendi, 2002 : 132).

Akhirnya sokongan terhadap usaha pemerintah untuk membantu dan meningkatkan pembangunan daerah bersumber dari keyakinan bahwa tujuan pembangunan bukan saja untuk mencapai tujuan yang bersifat ekonomi tetapi juga bersifat sosial dan politik. Pembangunan daerah dianggap

merupakan alat yang efektif di dalam merealisasikan tujuan pembangunan yang multi kompleks sifatnya.

“Pembangunan daerah juga dapat mempertahankan kebudayaan suatu daerah, disamping itu pula dapat menjadi perangsang untuk memperbaiki dan mengembangkan kebudayaan tersebut. Hal yang demikian dapat terjadi karena pembangunan daerah akan mengurangi arus perpindahan penduduk dari sesuatu daerah dan akan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Di dalam keadaan dimana kemiskinan merajalela dan penduduk yang lebih muda dan mempunyai daya kerja yang tinggi berpindah ke daerah lain.” (Sukirno, 1976 : 25)

Komitmen dan kebijaksanaan Pemerintah RI dalam mewujudkan Otonomi Daerah telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arah bagi daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur perpajakan dan retribusi daerah. Meskipun beberapa jenis pajak dan retribusi daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang, daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat dibiayai dari dan atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera, karena intensitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangan yang diberikan cukup tinggi, maka dibutuhkan kemampuan daerah untuk mengelola secara optimal sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas tersebut.

Menindaklanjuti semangat undang-undang di atas, guna mendukung tugas pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi, banyak hal penting yang harus disiapkan, satu di antaranya yang sangat mendesak untuk segera disiapkan adalah strategi dalam mengelola sumber Pendapatan Daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah yang sangat penting dan menjadi andalan utama bagi pembiayaan daerah dalam APBD. Strategi ini diarahkan pada upaya mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada dan penggalan sumber-sumber pendapatan yang menggambarkan potensi-potensi yang dimiliki daerah.

Pemberian kewenangan keuangan harus diimbangi pra kondisi yang kondusif dan adanya kemampuan Pemerintah Kota untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan usaha daerah serta pendapatan daerah lainnya.

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber utama bagi pelaksanaan dan pengembangan Pemerintah Kota Samarinda diharapkan mampu meningkat dari waktu ke waktu agar Otonomi Daerah seiring dapat berjalan dengan baik. Kenyataannya, dalam pelaksanaan pembangunan

daerah di Indonesia selama ini, pembiayaan pembangunan bagi kebanyakan daerah masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibiayai dari bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat. Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan daerah yang sah selama ini, selain disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaan juga disebabkan oleh batasan hukum.

“Data empiris menyajikan pola sumber penerimaan pada 277 Dati II (tidak termasuk DKI dan Timor Timur). Hal ini menunjukkan ketergantungan yang lebih besar lagi pada sumbangan dari atas, dibandingkan dengan Provinsi 73 % dari anggaran rutin dan 87 % dari anggaran pembangunan berasal dari Pemerintah Pusat. Dari penerimaan Dati II secara keseluruhan, sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri menyumbang 10 % dan penerimaan yang diarahkan 6 %, dibandingkan dengan 82 % yang berasal dari bantuan dan 2 % dari pinjaman” (Devas, 1989 : 26)

Desentralisasi Fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan (1) kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri, dan didukung dengan (2) perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Kewenangan untuk menggali sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta revisinya yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Revisi atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ini dilakukan tidak terlepas dari adanya keinginan dan keseriusan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi,

dengan memberikan keleluasaan kewenangan bagi daerah untuk mendayagunakan potensi yang ada di daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tentunya pendayagunaan potensi tersebut harus tetap dalam batas-batas kewajaran, yang tolok ukurnya adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang dimiliki tersebut untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah di satu sisi, sedangkan di sisi lain adalah harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk menanggung beban pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keleluasaan daerah untuk memanfaatkan sumber keuangannya sendiri tercermin dari keleluasaan untuk menetapkan jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang potensial di daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

“Khusus untuk pengaturan lebih lanjut mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang penting bagi masyarakat kota ialah bahwa penyaluran dana haruslah didasarkan pada pemanfaatan perhitungan / analisa manfaat dan biaya sosial (social benefit-cost analysis) yang konsekuen. Proyek-proyek Pemerintah Kota yang memang tak dapat dipertanggung-jawabkan, lebih baik tidak dilaksanakan. Harus diingat bahwa sumber dana kota itu jelas terbatas. Proyek-proyek yang biasanya berupa pelayanan umum, seperti penanggulangan urbanisasi, lingkungan, kemiskinan, kejahatan, kesehatan dan pendidikan berorientasi sosial yang mungkin tidak atau sukar memperhitungkan manfaat dan biaya sosial dan diputuskan, karena itu tidak harus dilaksanakan tanpa melihat segi ekonominya. Konsekuensinya proyek menjadi mahal sekali dan hanya sebagian saja yang dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana” (Reksohadiprojo, 1993 : 140).

Selain itu, perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan melalui Dana Perimbangan yang terdiri dari :

- a. Bagian daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;

- b. Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Alokasi Khusus.

Penggunaan Perimbangan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 ini diatur secara lebih detail mengenai tata cara pembagian Dana Perimbangan dari ketiga komponen yang telah disebutkan di atas. Khusus untuk Bagian daerah dari sektor perpajakan telah dibuat peraturan teknis pelaksanaannya secara tersendiri yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 dan KMK No. 82/KMK.04/2000 untuk bagi hasil PBB, dan Peraturan Pemerintah No. 115 Tahun 2000 dan KMK No. 6/KMK.04/2001 untuk PPh perseorangan juga untuk pengaturan secara detail mengenai bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam.

Khusus untuk DAU, sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa perhitungan distribusi alokasi DAU telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 dan penjabarannya telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.03/2003 mengenai penyaluran DAU dan DAK.

Ketiga komponen dalam Dana Perimbangan tersebut merupakan satu kesatuan elemen sumber pembiayaan guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan oleh daerah, selain sumber keuangan yang sudah ada di daerah sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, perlu ditegaskan kembali di sini bahwa dalam pelaksanaan

desentralisasi fiskal tidaklah hanya terfokus kepada Dana Perimbangan, namun lebih kepada bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah, dengan tujuan melakukan peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.

Jadi tujuan pokok dari pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui pelaksanaan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab oleh daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi fiskal selain sisi penerimaan, yaitu sisi pengeluaran. Bagaimana rencana dan upaya kita untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat dengan kemampuan dan potensi yang ada, khususnya yang akan dapat langsung dirasakan oleh para *stakeholder*, baik masyarakat dan dunia usaha di daerah, tentu akan tidak mudah bagi daerah untuk dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah seoptimal mungkin. Dengan akan semakin besarnya skala pembiayaan yang dikelola daerah pada masa yang akan datang, daerah perlu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah melalui penyusunan rencana pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Aspek pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal tidaklah terlepas dari mekanisme pengelolaan keuangan yang ada di daerah. Manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik tentunya akan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana guna mendorong peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, dengan menggunakan dasar Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dengan mengatur mengenai asas umum pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dan penetapan serta pelaksanaan APBD, mekanisme akuntansi keuangan pemerintahan di daerah, pola pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, serta mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Juga dalam pelaksanaannya diamanatkan adanya pemisahan secara tegas dan jelas antara pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka desentralisasi dengan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk itu telah pula ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang mengatur secara detail asas-asas umum pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, mekanisme penganggarannya, penyaluran dan pertanggungjawaban, serta pelaporan dan pengawasannya. yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, ukuran Inovasi, kemajuan dan kemandirian Daerah Otonom merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah.

“Dalam upaya menggali pendapatan daerah harus menggunakan tolok ukur untuk menilai Pajak Daerah dalam mendorong Kemandirian Daerah digunakan ukuran yaitu : Pertama, Hasil (Yield) : memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya. Kedua, Keadilan (Equity) : dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Ketiga, Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency): pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi. Keempat, Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement): suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan. Kelima, Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a Local Revenue Source”:
(Devas, 1989 : 61-62)

Selain itu, Retribusi Daerah melalui pelayanan yang diberikan oleh daerah dan hasil kegiatan usaha daerah yang dikelola secara profesional, selain bersumber dari pinjaman dan alokasi dana dari Pemerintah Pusat.

Hal penting yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Kemandirian Wilayahnya adalah meningkatkan sumber-sumber potensi ekonomi untuk dapat dilakukan sebagai suatu kegiatan usaha oleh sektor swasta, sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan Pendapatan masyarakat dan Pemerintah Daerah khususnya dan tentunya hal tersebut dapat tercapai melalui penciptaan iklim berinvestasi yang kondusif dan mengarah kepada kegiatan usaha yang *profitable*.

Mengamati Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD di 12 Kota / Kabupaten, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1999/2000, Kabupaten Bulungan 1,91 %, Berau 4,08 %, Nunukan 4,44 %, Malinau 0,07 %, Kutai Kertanegara 5,10 %, Kutai Timur 2,15 %, Kutai Barat 1,65 %, Pasir 4,20 %, Kota Tarakan 2,62 %, Bontang 1,65 %, Balikpapan 12,56 % dan Samarinda 11,66 %, dengan rata-rata 3,34 % berarti penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi kepada daerah sebesar 96,66. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan masih banyak potensi daerah yang dapat digarap serta dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan indikator makro proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Kota Samarinda terus mengalami penurunan tahun 1990/1991 = 25,99 %, 1991/1992 = 25,27 %, 1992/1993 = 22,42 %, 1993/1994 = 13,93 %, 1994/1995 = 15,91 %, 1995/1996 = 15,10 %, 1996/1997 = 13,98 %, 1997/1998 = 13,38 %, 1998/1999 = 11,98 %, 1999/2000 = 11,66 %, 2000 = 8,37 %, 2001 = 6,14% dan 2002 = 6,19 %.

Sedangkan indikator makro proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara relatif 1990/1991 = 0,36 %, 1991/1992 = 0,40 %, 1992/1993 = 0,34 %, 1993/1994 = 0,31 %, 1994/1995 = 0,30 %, 1995/1996 = 0,30 %, 1996/1997 = 0,29 %, 1997/1998 = 0,32 %, 1998/1999 = 0,22 %, 1999/2000 = 0,26 %, 2000 = 0,18 %, dan 2001 = 0,46 %, kemudian APBD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) relatif adalah tahun 1990/1991 = 1,37 %, 1991/1992 = 1,58 %.

1992/1993 = 1,52 %, 1993/1994 = 2,19 %, 1994/1995 = 1,89 %, 1995/1996 = 2,00 %, 1996/1997 = 2,10 %, 1997/1998 = 2,36 %, 1998/1999 = 1,98 %, 1999/2000 = 2,33 %, 2000 = 2,20 %, dan 2001 = 7,49 % dengan rata-rata = 2,42 %. Untuk jelasnya dapat dilihat pada :

Tabel 21
PROPORSI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN
DAN APBD SERTA PDRB KOTA SAMARINDA

(Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Pendapatan		APBD	Proporsi (%)		PDRB	PAD/ PDRB % (2:7)	APBD/ PDRB % (4:7)
	PAD	Dana Perimbangan		PAD (2:4)	Dana Perimbangan (3:4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1990 / 1991	Rp. 4.179.786.485,02	Rp. 11.903.099.977,46	Rp. 16.082.826.462,48	25,99	74,01	Rp. 1.174.315.000.000,00	0,36	1,37
1991 / 1992	Rp. 4.920.863.281,75	Rp. 14.550.895.909,60	Rp. 19.471.759.191,35	25,27	74,73	Rp. 1.229.369.000.000,00	0,40	1,58
1992 / 1993	Rp. 5.655.308.672,93	Rp. 19.565.992.415,85	Rp. 25.221.301.088,78	22,42	77,58	Rp. 1.655.271.000.000,00	0,34	1,52
1993 / 1994	Rp. 6.133.288.883,84	Rp. 37.881.926.001,72	Rp. 44.015.214.885,56	13,93	86,07	Rp. 2.006.810.000.000,00	0,31	2,19
1994 / 1995	Rp. 6.906.134.112,92	Rp. 36.497.251.664,52	Rp. 43.403.385.777,44	15,91	84,09	Rp. 2.294.918.000.000,00	0,30	1,89
1995 / 1996	Rp. 7.718.531.626,54	Rp. 43.386.619.370,46	Rp. 51.105.150.997,00	15,10	84,90	Rp. 2.560.171.000.000,00	0,30	2,00
1996 / 1997	Rp. 8.288.916.364,71	Rp. 50.982.697.887,29	Rp. 59.271.614.252,00	13,98	86,02	Rp. 2.815.815.000.000,00	0,29	2,10
1997 / 1998	Rp. 10.040.425.274,67	Rp. 66.011.203.191,13	Rp. 75.051.628.466,00	13,38	86,62	Rp. 3.151.095.000.000,00	0,32	2,38
1998 / 1999	Rp. 10.198.949.224,79	Rp. 82.203.322.847,21	Rp. 92.402.272.072,00	11,04	88,96	Rp. 4.658.445.000.000,00	0,22	1,98
1999 / 2000	Rp. 13.163.965.871,81	Rp. 106.889.539.806,19	Rp. 120.053.525.678,00	10,97	89,03	Rp. 5.143.890.000.000,00	0,26	2,33
2000	Rp. 10.711.922.296,80	Rp. 117.269.988.762,85	Rp. 127.981.911.069,65	8,37	91,63	Rp. 5.807.534.000.000,00	0,18	2,20
2001	Rp. 30.361.369.094,57	Rp. 464.380.749.564,37	Rp. 494.742.118.658,94	6,14	93,86	Rp. 6.606.119.000.000,00	0,46	7,49

Sumber : Laporan Tahunan Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Kota Samarinda dan Kantor Statistik Kota Samarinda, 2002 (data diolah kembali).

Melihat kondisi tersebut di mana Pemerintah Kota Samarinda pada masa yang akan datang menghadapi tiga kemungkinan. Pertama, apakah arus dana perimbangan tersebut dapat bertahan dan atau terus meningkat, lebih lagi yang bersumber daya alam tidak pulih. Kedua, apakah dapat mengurangi ketergantungan yang sangat besar tersebut dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. Ketiga, dengan besarnya kewenangan pelayanan dasar masyarakat dan banyak jumlah personalia yang dibebankan kepada

Pemerintah Kota Samarinda, apakah mampu melaksanakan sesuai dengan keterbatasan dana yang ada.

Dengan tiga kemungkinan yang dapat menimbulkan masalah pembiayaan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan bagi keberlanjutan Otonomi Daerah di masa yang akan datang, maka peluang yang memungkinkan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda sebagai Kota Jasa, Industri dan Perdagangan, Pemukiman yang berwawasan Lingkungan. Pertama, dari aspek intensifikasi pendapatan dengan cara mengintensifkan pungutan yang telah ada dan potensial serta dengan melakukan penghematan biaya pengelolaan pendapatan.

Ekstensifikasi, terdiri dari mencari peluang pendapatan daerah baru yang potensial terutama lebih diarahkan pada upaya pengenaan terhadap aktivitas ekonomi yang berpendapatan menengah ke atas. Kedua, dari aspek pembiayaan melaksanakan kegiatan ekonomi yang dapat memberikan hasil pelayanan (*Benefit Service*) seperti pembuatan terminal, pasar, dermaga, rumah potong hewan, obyek wisata dan lain-lain dengan tetap tidak mengabaikan pelayanan sosial (*Social Service*), sehingga apa yang diperbuat dapat merefleksikan pendapatan kembali (*Feedback Income*). Ketiga, dari aspek pemberdayaan rakyat melibatkan seluruh komponen rakyat untuk ambil bagian dalam pembangunan secara proporsional sehingga dapat membangun dirinya sendiri seiring dengan rakyat sekitarnya, hal ini diperlukan stimulan dari dana pemerintah sesuai dengan stratifikasi yang sejajar untuk diberdayakan. Keempat, dari aspek peran serta rakyat di mana yang berpendapatan menengah ke atas, memberikan kontribusi pembayaran

pendapatan daerah yang proporsional, sehingga dana yang diperoleh tersebut dapat digunakan sebagai stimulan pemberdayaan rakyat dalam meningkatkan pendapatannya dan rakyat disekitarnya dari segala peluang yang dapat dan wajar untuk dilaksanakan. Kelima, dari aspek pemberian iklim berusaha sebagai penarik pembangunan (*Magnetic Development*) terus dikembangkan dan diperluas namun tidak meninggalkan rakyat di daerah setempat untuk ambil bagian dalam kegiatan tersebut seraya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan keperluan dan kebutuhan.

Dari lima aspek tersebut, maka pada masa 5 sampai 10 tahun mendatang ketergantungan terhadap sumber daya alam tidak pulih (*Unrenewable*) dapat berkurang dan lebih lagi terhadap dana perimbangan lainnya dari Pemerintah sehingga kemandirian wilayah dapat terwujud, dan kesulitan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang dapat diantisipasi sedini mungkin dan pada masanya tidak terjadi masalah, akan tetapi lebih memberi peluang dalam peningkatan kemandirian wilayah.

Kemudian dengan adanya otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak positif terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Kota Samarinda.

2.5 Sosial Ekonomi

Implikasi dari penyelenggaraan Kemandirian Lokal sebagai substansi otonomi adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting melalui pemberdayaan tatanan; Pendidikan menjadi kata kunci;

Otonomi dalam arti yang luas akan terwujud melalui proses demokratisasi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdidik, bukan sekedar pintar dan maju. Tetapi sekaligus memiliki kearifan, integritas dan kecerdasan dan kecendekiawanan sehingga mampu menyalurkan *voice*-nya dan menentukan *choice*-nya atau pilihannya secara bebas dan tanpa hambatan atau tekanan dan rintangan.

“Indonesia akan terwujud sebagai negara yang kuat dan utuh karena didukung oleh pilar-pilar daerah atau tatanan yang kuat dan mandiri tetapi harus memperhatikan perbedaan gejala sosial kedalam tiga tingkat, yaitu tingkat perilaku individu; tingkat pola umum yang ditarik dari kebiasaan perilaku individu dan tingkat ideal yang berisi , rules, prinsip-prinsip perilaku. Prinsip-prinsip ideal ini dapat datang dari penjelasan si pelaku, aktor sosial, dapat pula muncul sebagai hasil inferensi yang dilakukan seorang ahli ilmu sosial” (Gany, 2001 : 184)

Aspek Sumber Daya Manusia telah menjadi kata kunci. Tidak sedikit jumlah dana yang disediakan untuk keperluan ini, termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Namun karena penyelenggaraannya masih senantiasa berbasis pada paradigma sentralistik, maka apa yang dirisaukan dan paling sering dinyatakan sebagai inti masalah di Kawasan Timur Indonesia adalah kelangkaan dan mutu Sumber Daya Manusia. Mutu yang dimaksud di sini di samping pola pikir dan perilaku yang masih dinilai berbasis tradisional, juga tingkat pengetahuan dan penguasaan teknologi yang dimiliki.

Bagi Kawasan Timur Indonesia, wilayah yang selama ini dipandang sangat tertinggal pembangunannya peningkatan mutu atau kualitas Sumber Daya Manusia memang sangat diperlukan, akan tetapi tentu saja opsi yang diperlukan memerlukan karakter dan konteks yang khas. Wilayah Indonesia

Bagian Timur pada saat ini membutuhkan interkoneksi horizontal dalam pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusianya. Pengembangan jaringan pendidikan dan penelitian perlu digalakkan sebagai solusi peningkatan kualitas atas mutu yang dihasilkan melalui kebijakan peningkatan kuantitas. Peningkatan mutu atau kualitas yang diperlukan mutlak atau harus berbeda standar dan takarannya dengan kepentingan wilayah lain, khususnya dengan apa yang diterapkan di daerah atau wilayah yang lebih berkembang. Meningkatkan proporsi alokasi pusat pengembangan intelektual, kemudian mendukung serta mendorong terciptanya jaringan interkoneksi horizontal, yang akan meningkatkan kualitas manusia adalah kunci keberhasilan pembangunan Indonesia. Dan inilah yang merupakan substansi Kemandirian Lokal yang sekaligus merupakan faktor dominan otonomi, sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Peningkatan kualitas manusia diarahkan agar memiliki kemandirian untuk melakukan pilihan-pilihan di bidang sosial, ekonomi dan budaya (*choice*) dan pilihan untuk menyalurkan aspirasinya (*voice*).

Dari definisi ini terlihat bahwa peningkatan kualitas lingkungannya, upaya pembangunan seyogyanya dititik beratkan kepada peningkatan kualitas kelembagaan dan teknostruktur tatanan, sehingga dengan demikian, masyarakat memiliki berbagai pilihan yang sesuai dengan kapasitas dan bakatnya.

“Dengan pendekatan seperti ini pembangunan kualitas manusia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan pertanian untuk menyediakan pangan yang memadai, sistem nilai masyarakat agar menyadari pentingnya gizi bagi kesehatan dan pertumbuhan anak, serta pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi.” (Gany, 2001 : 180)

Moh. Hatta dalam tesisnya memandang kebebasan sebagai unsur utama dalam membentuk sikap kemandirian, maka sangatlah sulit untuk menjamin eksistensi suatu bangsa. Pandangan Bung Hatta yang dicetuskan kurang lebih 70 tahun yang lalu itu ternyata telah menjelma sebagai suatu realitas baru (*the new realities*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Peter Drucker. Pembangunan tidak mungkin berlangsung dalam suatu proses yang berkelanjutan (*sustainable*), tanpa memberikan kompetensi kepada setiap individu secara otonom untuk menjadi subyek atau aktor penyelenggara utama.

Bertolak dari dasar pemikiran itu, maka pokok-pokok pikiran berikut ini akan lebih banyak membahas “daya saing” sebagai salah satu substansi kemandirian. Dengan perkataan lain, “daya saing” suatu bangsa atau sumber daya manusia, akan tergantung pada proses interaksi antara manusia dengan manusia, interaksi manusia dengan sang Penciptanya.

Telah muncul kelompok-kelompok menuju suatu ‘*Civil Society*’ atau Masyarakat Warga (ada yang menerjemahkannya dengan masyarakat madani). Inti ‘*Civil Society*’ adalah adanya unsur-unsur dalam masyarakat berupa kelompok ataupun individu yang bukan-pemerintah dan bukan bersifat komunal, yang mandiri dari segi visi, misi dan programnya. Termasuk dalam ‘*Civil Society*’ adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, organisasi bisnis / ekonomi, organisasi sosial, organisasi

politik, organisasi media masa, organisasi perupa, organisasi buruh, serta individu-individu yang juga mempunyai sifat-sifat seperti di atas. Hal utama yang menjadikannya bagian dari '*Civil Society*' ini adalah bahwa kelompok-kelompok serta individu-individu tersebut mempunyai kepedulian yang mendalam terhadap keadaan masyarakat, dan bekerja untuk memperbaikinya, terutama dengan berpihak kepada yang miskin ('*option for the poor*') dan yang tidak beruntung ('*the disadvantage*').

Adanya kelompok-kelompok bukan-pemerintah dan bukan-komunal ini yang menuju ke terbentuknya suatu '*civil society*' dapat dilihat sebagai indikator tumbuhnya proses demokratisasi. Di mana ada '*civil society*' yang kuat dan berarti, maka masyarakatnya demokratis. Demikian pula dengan adanya '*civil society*' yang kuat, maka ada pengimbang dan pengontrol kekuatan / kekuasaan pemerintah / negara, sehingga supremasi hukum dapat terwujud, yang berarti berfungsinya demokrasi dan pada gilirannya integrasi sosial merupakan keadaan yang hidup dan bermakna dalam masyarakat.

Integrasi sosial didefinisikan sebagai suatu keadaan dan proses yang berjalan terus-menerus, di mana berbagai kelompok dalam masyarakat yang mempunyai pranata-pranata yang sama, dan nilai-nilai inti seperti solidaritas, tanggung jawab dan kebebasan yang sama, yang merupakan sendi-sendi spritual dan moral suatu masyarakat, berfungsi sebagai kesatuan yang terpadu, rukun dan saling tergantung, menuju tujuan / cita-cita bersama, yaitu kebahagiaan spritual dan material bagi semua.

Proses menuju integrasi sosial ini adalah tantangan yang sangat mendalam dari pembangunan sosial, yang merujuk kepada perbaikan terus-menerus atau kemajuan sosial (*social progress*), dari segala segi kehidupan rakyat melalui pranata yang berfungsi secara adil, dalam alokasi dan distribusi semua sumber daya dalam masyarakat, kepada semua kategori manusia, tanpa pandang suku bangsa / ras, agama, jender, umur atau kedudukan sosial ekonomi.

“Pola pembangunan *community base development* ialah pola pembangunan yang berlandaskan kepada kompetisi masyarakat itu sendiri. Konsep awalnya adalah kesepakatan bahwa tak ada satupun entitas yang bisa sama persis di muka bumi ini. Begitu juga dengan kondisi alam masyarakat. Setiap daerah, di mana pun di muka bumi, memiliki potensi yang berbeda-beda. Berdasarkan perbedaan potensi inilah muncul kebutuhan yang beragam. Artinya, pembangunan yang dibutuhkan juga harus disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan di dalam masyarakat. Inilah yang disebut *community based development* (pembangunan masyarakat)” (Soedarsono, 2000 : 30)

Pembangunan masyarakat, baik sebagai suatu proses kegiatan manapun sebagai salah satu bentuk kebijakan pembangunan, sebenarnya telah lama di kenal. Namun demikian, dalam berbagai bahasan, masing-masing mempunyai penekanan sendiri tergantung di mana penerapannya dan siapa yang mempergunakannya.

Secara umum, prinsip *community based development* mengandung 5 (lima) aspek dasar yang mengacu pada pengertian sebagai berikut : Pertama, Pembangunan masyarakat pada hakikatnya adalah proses perubahan yang disengaja dan terarah. Dalam kehidupan bermasyarakat,

ada satu pengertian umum tentang proses tata kehidupan bermasyarakat, yaitu perubahan sosial.

Dengan demikian, baik pembangunan masyarakat maupun perubahan sosial, keduanya mengandung unsur perubahan. Meskipun demikian, ada sedikit perbedaan di antara keduanya: perubahan sosial merupakan proses evolusi yang berlangsung perlahan-lahan, sedangkan perubahan pembangunan masyarakat merupakan kegiatan yang disengaja melalui sejumlah platform yang telah dikonsepsikan sebelumnya. Keduanya dapat berdiri secara bersamaan, sehingga pembangunan yang dilakukan merupakan pengaruh perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kedua, Pembangunan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Konsep peningkatan taraf hidup ini diselaraskan dengan kontribusi dan potensi yang mereka miliki. Dengan demikian, tidak hanya masyarakat tertentu yang menikmati peningkatan taraf hidupnya, tetapi juga warga masyarakat yang lain secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sangat mengesankan juga harus bermakna pemerataan. Intinya, ada akses yang lebih luas lagi bagi keterlibatan semua kelompok dan lapisan pembangunan. Sudah selayaknya, secara makro, setiap masyarakat, baik lapisan atas, menengah maupun bawah memanfaatkan berbagai kesempatan yang terbuka selama proses pembangunan berlangsung. Pada gilirannya, manfaat yang kemudian muncul dapat dipetik secara merata. Ketiga, Pembangunan masyarakat mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber daya setempat, yang meliputi faktor fisik, manusia dan sosial.

Proses pembangunan masyarakat selalu mengandung unsur usaha untuk mendorong dan membangkitkan sikap tanggap dan kritis masyarakat selalu mengandung unsur usaha untuk mendorong dan membangkitkan potensi dan sumber daya yang ada di sekitarnya. Walaupun ada kelompok tertentu dalam masyarakat saat ini yang masih kurang peka terhadap sumber daya dan potensi di sekitarnya, yang menyebabkan tingkat kehidupan mereka rendah. Dalam kaitan ini, pemberian motivasi dan penyuluhan untuk menggugah kesadaran terhadap pentingnya pemanfaatan potensi dan sumber daya demi peningkatan taraf hidup merupakan elemen penting yang perlu terus menerus digelorakan dalam pembangunan masyarakat. Agar setiap kegiatan motivasi dan penyuluhan dapat memperoleh tanggapan yang baik, ia harus dibarengi dengan kegiatan lain seperti pengenalan teknologi yang sesuai dengan kondisi masyarakat, pemberian fasilitas kredit serta pembenahan lembaga-lembaga sosial pendukung. Keempat, Pembangunan masyarakat mengutamakan kreativitas dan inisiatif.

Dalam proses pembangunan masyarakat, diharapkan muncul kesadaran dan tanggung jawab warga masyarakat secara mandiri untuk melaksanakannya. Karena itu pengembangan inisiatif dan kreativitas merupakan satu hal yang mesti dilakukan. Dengan kata lain, masyarakat tidak saja tampil sebagai obyek tetapi juga subyek. Meski pembangunan masyarakat mengutamakan kreativitas dan inisiatif, tidak tertutup kemungkinan adanya bantuan, pengarahan dan motivasi dari luar.

Pada masyarakat tertentu, campur tangan dari luar tidak jarang sangat dibutuhkan pada awalnya. Meski demikian, semuanya harus diletakkan secara proporsional sehingga tidak malah mematikan kreativitas dan inisiatif masyarakat sendiri di kemudian hari. Kelima, Pembangunan masyarakat harus mengedapankan partisipasi masyarakat. Prinsip masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan juga mesti diimplementasikan melalui pengembangan partisipasi aktif mereka dalam memikul beban dan tanggung jawab pelaksanaan pembangunan, maupun dalam menerima kembali hasil pembangunan yang dijalankan.

Dengan demikian, dalam konsepsi masyarakat terkandung hak dan kewajiban yang selalu melekat. Hak di sini mengandung arti bahwa setiap warga negara pada dasarnya mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi memanfaatkan semua peluang pembangunan, di samping berhak pula menikmati hasil-hasilnya. Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga bermakna kewajiban, karena secara essensial semua warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut memikul beban pembangunan dengan segala konsekuensinya.

“Pelaksanaan pembangunan di segala bidang sebenarnya dapat menerapkan prinsip pembangunan yang mendasar (Based Development). Yakni, bagaimana pembangunan serta tujuan utama pembangunan itu tumbuh dari masyarakat dan dilakukan demi masyarakat sendiri. Pembangunan yang mengacu kepada kekuatan masyarakat berjalan secara paralel dengan konsep pembangunan demi kesejahteraan masyarakat” (Soedarsono, 2000 : 31).

Berdasarkan dari uraian tersebut, bahwa pada intinya obyek dan subyek pembangunan adalah masyarakat, dalam hal ini adalah penduduk dalam suatu wilayah tertentu, sesuai dengan harapan penelitian ini bahwa

fokusnya adalah penduduk Kota Samarinda. Bersumber dari data yang ada, jumlah penduduk Kota Samarinda sampai dengan tahun 2001 sebanyak 509.432 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 262.133 jiwa dan wanita sebanyak 247.299 jiwa, sedangkan pada tahun 2002 jumlah penduduk Kota Samarinda bertambah menjadi 539.726 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 275.435 jiwa dan wanita sebanyak 264.291 jiwa, dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Kota Samarinda sebesar 2,32 %.

Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk secara nasional, jika dilihat lebih jauh jumlah penduduk Kota Samarinda tidak semata-mata bertambah dari angka kelahiran penduduk Kota Samarinda akan tetapi justru lebih banyak dipicu oleh migrasi dari luar Kota Samarinda bahkan dari luar Provinsi Kaltim, dan sudah barang tentu memiliki dampak terhadap pembangunan suatu wilayah.

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Samarinda dihitung pada usia 15 tahun ke atas yang dikategorikan kedalam angkatan kerja, berdasarkan data tahun 2002 angkatan kerja di Kota Samarinda sebanyak 235.000 jiwa terdiri dari yang bekerja sebanyak 212.000 jiwa (54,45 %) sedangkan pencari kerja (pengangguran) sebanyak 23.000 jiwa (5,95 %).

Tingkat kesehatan penduduk Kota Samarinda dilihat dari tingkat keluhan kesehatan pada tahun 2002 sebanyak 187.464 orang, dengan rata-rata gangguan pada Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), tingkat kelahiran hidup dilihat dari rata-rata anak lahir hidup 95,12 %.

Indikator lain untuk melihat tingkat sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda adalah berdasarkan dari angka partisipasi pendidikan yang diselesaikan, pada tahun 2002 sebanyak 379.603 orang yang tamat pendidikan formal dari tingkat SD sampai dengan Sarjana atau sebanyak 87,41 % penduduk Kota Samarinda usia sekolah yang telah tamat pendidikan formal.

Jumlah penduduk Kota Samarinda (15-64 tahun) yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2002 sebanyak 208.364 orang terdiri dari 145.098 orang laki-laki dan 63.266 orang wanita. Lapangan usaha yang dominan banyak menyerap tenaga kerja adalah pada sektor industri dan perdagangan/restoran/hotel atau sebanyak 115.329 orang (55,35 %) dari total jumlah penduduk yang berkerja. Pendapatan perkapita penduduk Kota Samarinda pada tahun 2001 atas dasar harga berlaku mencapai Rp.11.192.183,78 per tahun atau Rp.932.681,98 per bulan, dan apabila dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) nampak pendapatan perkapitan penduduk Kota Samarinda lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata penduduk Kota Samarinda dalam memenuhi kebutuhan pokok dapat tercapai.

Pemberian kewenangan keuangan harus diimbangi dengan kemampuan Pemerintah Kota Samarinda untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Usaha Daerah dan lain-lain Pendapatan yang sah. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab di mana Pemerintah Kota Samarinda bertanggung jawab terpenuhinya

pelayanan publik yang merupakan kebutuhan dasar warga kota, seharusnya posisi otonomi meningkat terus yang dimulai tahapan konsolidasi, otonomi rendah, otonomi sedang dan otonomi tinggi sebagaimana Tabel 1.2 halaman 13.

”Berdasarkan Model pembangunan dari IBRD (International Bank of Reconstruction and Development) memberikan pengarahannya untuk Rekonstruksi dan Pembangunan di Negara yang sedang berkembang untuk tahap awal pembangunan, investasi yang di peruntukkan bagi proyek jenis SOC sekitar 85,0% dan masuk dalam kategori DPI sekitar 15,0 %. Selanjutnya SOC secara berangsur-angsur turun dan DPI lebih ditingkatkan sampai dengan komposisi DPI sekitar 45,0% dan SOC sekitar 55,0% saja” (Zadjuli, 2005 : 7).

Untuk lebih jelasnya analisis Tinjauan Pustaka tersebut dapat dilihat Peta Teori Lampiran I.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir

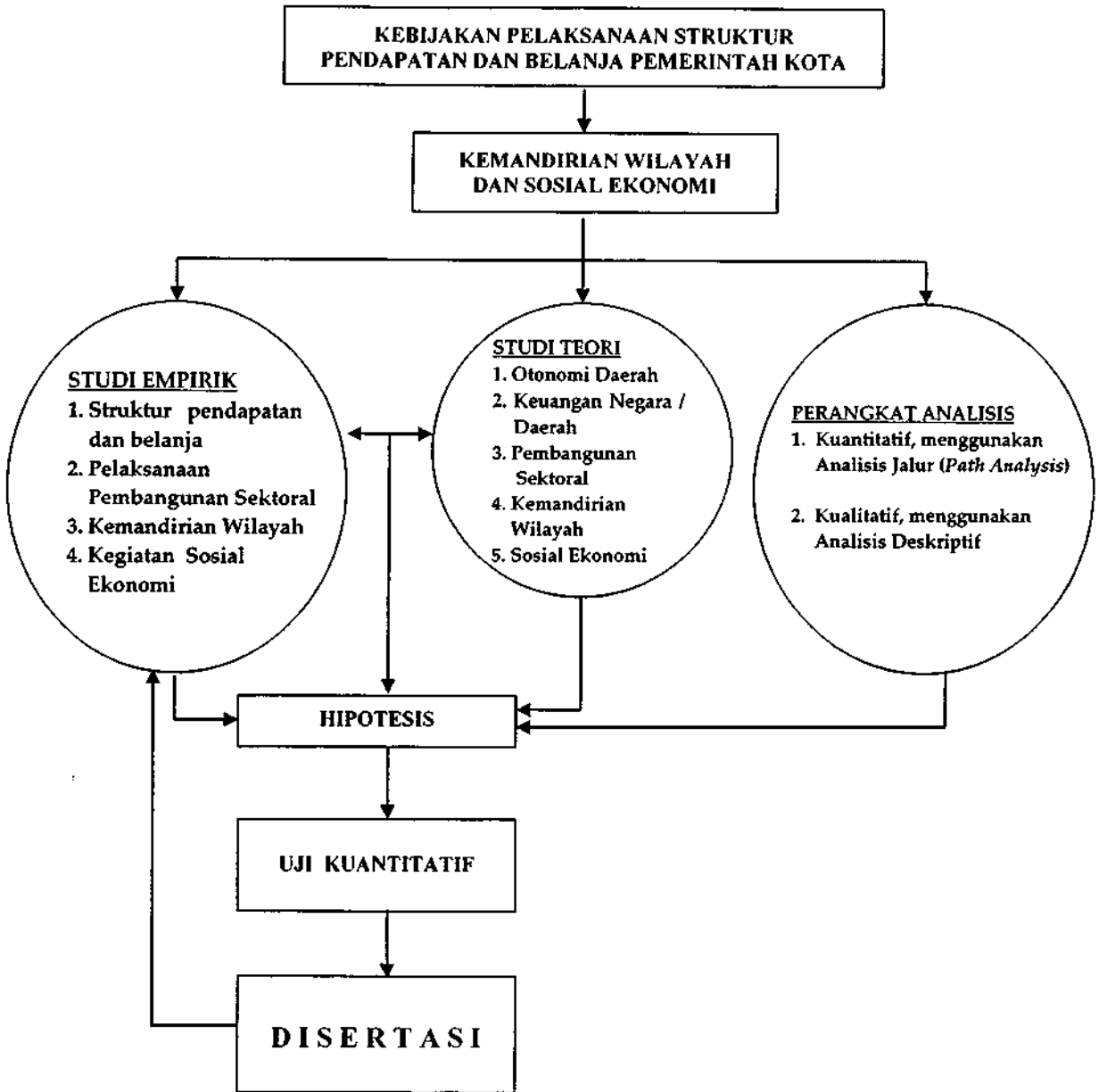
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka, terlebih dahulu disusun kerangka proses berpikir pada Gambar 3.1 yang dijelaskan berikut ini.

Dalam upaya mencapai Arah dan Kebijakan Umum (AKU) dan Rencana Strategik (RENSTRA) yang dicapai dalam rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun, jangka menengah 5 tahun dan diaplikasikan dalam rencana jangka pendek tahunan yang dilaksanakan setiap 1 tahun ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini dilakukan mulai perencanaan dari aspek belanja rutin dan belanja pembangunan yang diusulkan instansi dalam jajaran Pemerintah Kota Samarinda. Untuk belanja rutin diakomodir oleh Bagian Keuangan sedangkan untuk belanja pembangunan diakomodir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun oleh panitia anggaran eksekutif dengan menyesuaikan Arah dan Kebijakan Umum dan Rencana Strategik yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya oleh pemerintah diajukan untuk dibahas dan disetujui serta disahkan. Dalam upaya menuju kemandirian wilayah dan perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda.

Untuk menganalisis kerangka proses berpikir, digunakan suatu studi teoritis sebagai dasar guna menyusun suatu kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan hubungan antara faktor terlibat dalam suatu masalah. Di dalam studi teori, hubungan dan gejala yang dikemukakan dalam studi empiris diterangkan dengan dasar suatu kerangka pemikiran tentang sebab akibat sebagai langkah untuk mengontrol kegiatan agar hasil yang diharapkan dapat dicapai. Studi teori mempunyai kelebihan dibandingkan studi empiris “Studi empiris adalah canggung dan tidak mudah dipergunakan karena berhubungan dengan gejala yang terpisah dan menimbulkan kesukaran untuk mengerti dan memahami setiap gejala sehingga sangat terbatas dalam hal peramalan yang merupakan tujuan akhir dari ilmu” (Sumantri, 1988 : 95)

Dalam studi teori tentang Otonomi Daerah, Keuangan Negara / Daerah, Pembangunan Sektoral, Kemandirian Wilayah dan Sosial Ekonomi. Kemudian dipadukan dengan studi empirik dari pelaksanaan struktur pendapatan dan belanja pemerintah kota guna mewujudkan kemandirian wilayah dan perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda. Kemudian disusun kerangka hipotesis “yang merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya sementara, belum benar-benar berstatus sebagai tesis” (Soeratno dan Lincoln, 1999 : 22). Selanjutnya diuji kuantitatif dengan menggunakan Analisis Jalur (*Path Analysis*) dan Analisis Proporsional (*Proportional Analysis*) dalam penyusunan disertasi ini.



Gambar 3.1 KERANGKA PROSES BERPIKIR

3.2 Kerangka Konseptual

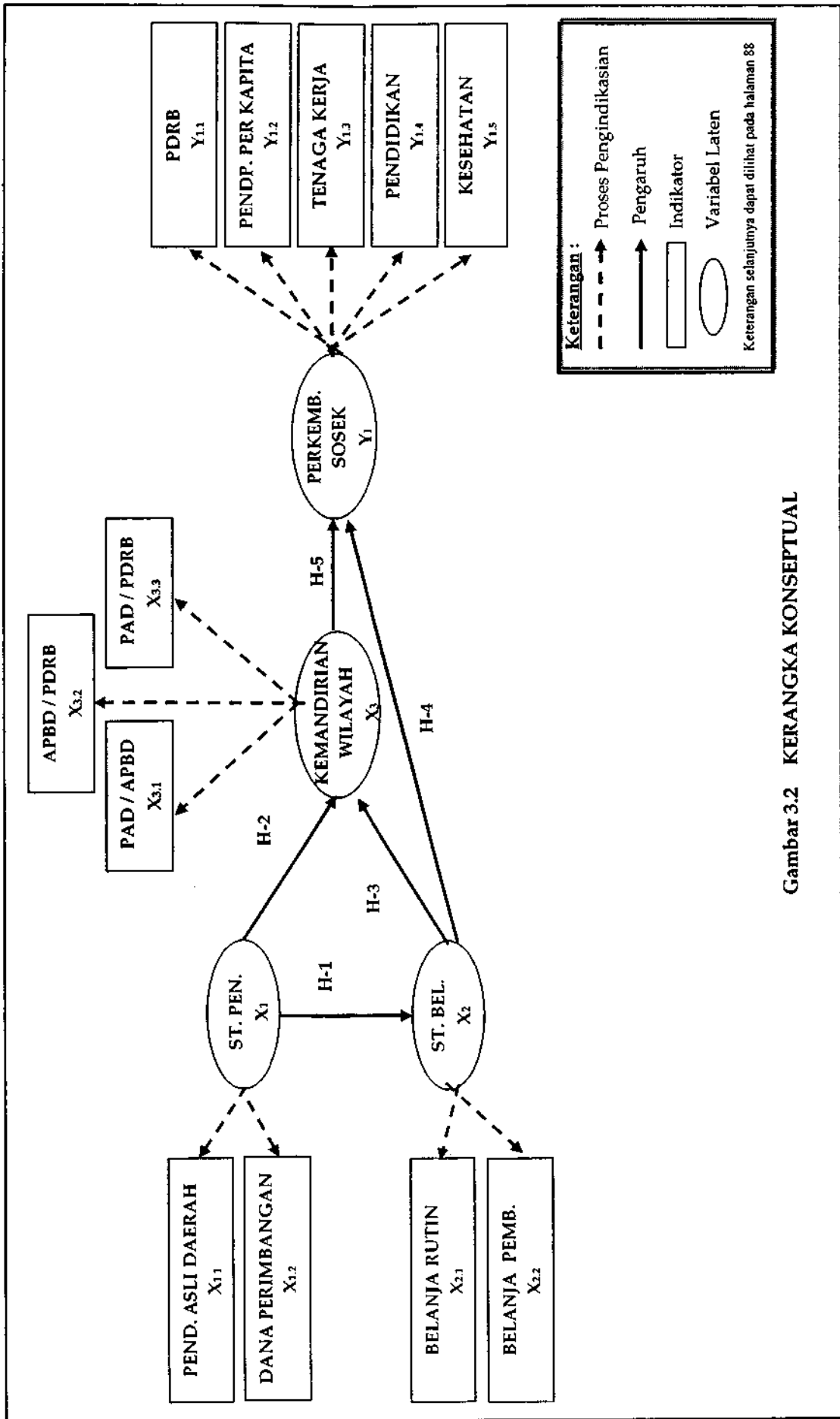
Berdasarkan Gambar 3.2 tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis jalur (*Path Analysis*) yang dikembangkan sebagai model untuk mempelajari pengaruh secara langsung dan tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Analisis ini merupakan salah satu pilihan dalam rangka mempelajari ketergantungan di dalam model dan merupakan metode yang baik untuk menerangkan apabila terdapat seperangkat data yang besar untuk dianalisis dan mencari hubungan kausal “Analisis Jalur (*Path Analysis*) digunakan untuk menelaah hubungan antara model kausal yang telah dirumuskan peneliti atas dasar pertimbangan teoritis dan pengetahuan tertentu” (Wibowo, 2003 : 1)

Struktur pendapatan (X_1) disebut variabel eksogen. “Variabel eksogen atau variabel otonomi ditentukan oleh kekuatan yang berada diluar model. Variabel eksogen hanya bertindak sebagai variabel penjelasan, tidak pernah bertindak sebagai variabel yang hendak dijelaskan” (Pasaribu, 1976 : 281). Dengan demikian variabel tersebut keragamannya tidak dipengaruhi oleh variabel penyebab di dalam sistem, dan tidak dapat ditetapkan hubungan kausalnya dan ditetapkan sebagai variabel pemula yang memberi pengaruh kepada variabel lain, sedangkan struktur belanja (X_2) merupakan variabel endogen dan intervening di mana variabel yang keragamannya dijelaskan oleh variabel eksogen dan endogen lainnya dalam suatu model.

Kemandirian wilayah (X_3) merupakan variabel endogen dan intervening atau variabel antara “Variabel intervening tidak pernah dapat diamati dan hanya dapat disimpulkan adanya berdasarkan pada variabel tergantung dan variabel sebab” (Suryabrata, 1988 : 83). Selanjutnya perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat (Y_1) merupakan variabel endogen, dependen atau variabel tergantung adalah “Suatu variabel yang tercakup didalam hipotesis penelitian, yang keragamannya ditentukan atau tergantung atau dipengaruhi oleh variabel lainnya” (Solimun, 2004 : 3)

Variabel struktur pendapatan (X_1) disebut variabel eksogen dengan indikator pengukuran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Variabel tersebut dapat mempengaruhi struktur belanja (X_2) atau variabel endogen juga sebagai variabel intervening. Variabel struktur pendapatan (X_1) juga mempengaruhi variabel Kemandirian Wilayah (X_3) disebut sebagai variabel endogen dan juga sebagai variabel intervening. Struktur belanja (X_2) sebagai variabel endogen dengan indikator dan pengukuran dana rutin dan dana pembangunan yang terdiri dari SOC dan DPI membentuk variabel endogen yang bisa mempengaruhi variabel Kemandirian Wilayah (X_3) merupakan variabel endogen dengan pengukuran dan indikator PAD/APBD, APBD/PDRB dan PAD/PDRB. Selanjutnya mempengaruhi variabel dependen atau tergantung yaitu Perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota (Y_1) dengan pengukuran dan indikator Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Per Kapita, Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan.



Gambar 3.2 KERANGKA KONSEPTUAL

1. Struktur pendapatan (X_1) yang merupakan variabel eksogen atau variabel otonomi di ukur oleh indikator

$X_{1.1}$ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$X_{1.2}$ = Dana Perimbangan (DP)

2. Struktur belanja (X_2) yang merupakan variabel endogen dan intervening di ukur dari indikator

$X_{2.1}$ = Belanja rutin

$X_{2.2}$ = Belanja pembangunan

3. Kemandirian wilayah (X_3) yang merupakan variabel endogen dari intervening di ukur dari indikator.

$X_{3.1}$ = Pendapatan Asli Daerah / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAD / APBD)

$X_{3.2}$ = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Produk Domestik Regional Bruto (APBD / PDRB)

$X_{3.3}$ = Pendapatan Asli Daerah / Produk Domestik Regional Bruto (PAD / PDRB)

4. Perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat (Y_1) yang merupakan variabel endogen, dependen atau tergantung di ukur dari indikator :

$Y_{1.1}$ = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

$Y_{1.2}$ = Pendapatan Perkapita

$Y_{1.3}$ = Tenaga Kerja

$Y_{1.4}$ = Pendidikan

$Y_{1.5}$ = Kesehatan

3.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka latar belakang, rumusan masalah, kerangka proses berpikir pada Gambar 3.1 dan kerangka konseptual pada Gambar 3.2 yang dalam studi ini disusun hipotesis sebagai berikut :

1. Struktur Pendapatan berpengaruh terhadap Struktur Belanja Pemerintah Kota Samarinda.
2. Struktur Pendapatan berpengaruh terhadap Kemandirian Wilayah Kota Samarinda .
3. Struktur Belanja berpengaruh terhadap Kemandirian Wilayah Kota Samarinda.
4. Struktur Belanja berpengaruh terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Kota Samarinda.
5. Kemandirian Wilayah berpengaruh terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Kota Samarinda.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Dalam studi ini berbasis pada penelitian *eksplanatori*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pelaksanaan struktur pendapatan dan belanja pemerintah kota terhadap kemandirian wilayah dan perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda.

Ditinjau dari maksud dan tujuan penelitian serta waktu yang tersedia maupun obyek yang menjadi fokus penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan terhadap obyek-obyek, responden dan nara sumber penelitian yang diamati dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data sekunder yang telah diverifikasi kebenarannya.
2. Melakukan sensus untuk mendapatkan data wilayah maupun data sektoral di Kota Samarinda.
3. Menganalisis data sekunder dan menarik kesimpulan, baik dalam bentuk data *time series* maupun *cross section* yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dan pembuktian hipotesis penelitian.

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

4.2.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah “.....a complete set of observatorium” (Christensen *et al.* 1992 : 8). Adapun populasi yang maksud dalam

penelitian ini adalah dari Struktur Pendapatan terdiri dari seluruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Dari Struktur Pendapatan terdiri dari Dana Rutin dan Dana Pembangunan baik yang digunakan untuk *Social Overhead Capital* maupun *Directly Productivity Investment*. Kemudian dari Perkembangan Sosial Ekonomi terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Per kapita, Tenaga Kerja yang dilihat dari kesempatan kerja setiap sektor, Pendidikan dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan dan Kesehatan dilihat dari angka rata-rata usai harapan hidup. Data tersebut diambil di setiap kecamatan.

Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data berbentuk *time series* dari tahun 2001 sampai dengan 2003, sehingga merupakan *pooled data*, yaitu data gabungan antara data *time series* (2001 sampai dengan 2003; selama 3 tahun) dengan data *cross sectional* 6 Kecamatan yakni Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda Seberang dan Palaran.

4.2.2 Teknik Pengambilan Populasi

Teknik pengambilan populasi data meliputi kegiatan :

- 1). Melakukan verifikasi data, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel.
- 2). Membuat tabulasi data yang akurat, sesuai dengan kebutuhan analisis.
- 3). Melakukan analisis finansial yang meliputi ratio PAD/APBD, APBD/PDRB dan PAD/PDRB.

- 4). Melakukan analisis data untuk pembuktian hipotesis penelitian dengan dua tahap.
 - (a) Pertama, analisis faktor konfirmatori terhadap indikator dan atau item dilakukan untuk mendapatkan data dari setiap variabel (laten).
 - (b) Kedua, setelah diperoleh data dari setiap variabel laten, untuk pengujian hipotesis penelitian digunakan analisis jalur (*path analysis*).
- 5). Untuk mengetahui kemandirian wilayah dilakukan analisis proporsional, guna perubahan otonomi secara relatif.

4.3 Variabel Penelitian

4.3.1 Klasifikasi Variabel

Dalam penelitian ini, klasifikasi variabel dapat jelaskan sebagai berikut :

- 1) Variabel struktur pendapatan (X_1) disebut variabel eksogen, independen atau otonomi adalah variabel yang keragamannya tidak dipengaruhi oleh variabel penyebab di dalam sistem, dan tidak dapat ditetapkan hubungan kausalnya dan ditetapkan sebagai variabel pemula yang memberi pengaruh kepada variabel lain. Variabel tersebut diukur berdasarkan indikator Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima dari Provinsi dan Pusat. PAD diukur berdasarkan item yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Daerah dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. Dana perimbangan yang diterima dari Provinsi diukur berdasarkan item yang meliputi bagi hasil pajak dan subsidi / bantuan, sedangkan dana perimbangan pusat bersumber dari

bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK serta pinjaman daerah.

- 2) Variabel struktur belanja (X_2) merupakan variabel endogen dan intervening di mana variabel yang keragamannya dijelaskan oleh variabel eksogen dan endogen lainnya dalam suatu model. Variabel tersebut diukur berdasarkan indikator anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang terdiri dari SOC dan DPI. Anggaran rutin diukur berdasarkan item anggaran belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan belanja lainnya. Anggaran pembangunan yang terdiri dari *Social Overhead Capital* (SOC) dan *Directly Productivity Investment* (DPI).
- 3) Variabel kemandirian wilayah (X_3) merupakan variabel endogen dan intervening atau variabel antara. Variabel tersebut diukur berdasarkan indikator rasio PAD terhadap APBD, APBD terhadap PDRB dan PAD terhadap PDRB.
- 4) Variabel perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat (Y_1) merupakan variabel endogen dan dependen atau variabel tergantung. Variabel tersebut diukur berdasarkan indikator berupa PDRB, pendapatan per kapita, tenaga kerja, pendidikan dan kesehatan.

4.3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian sebagai berikut :

1. Struktur Pendapatan

Struktur pendapatan yang merupakan variabel laten dengan indikator dan item sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah pendapatan daerah yang dikelola oleh daerah sendiri dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah dimana hasilnya digunakan sepenuhnya oleh daerah, yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah dan Penerimaan Lain-lain yang Sah dengan indikator dan item sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) :**a) Pajak Daerah, terdiri dari :**

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Konsumsi Listrik, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C, dan Pajak Parkir.

b) Retribusi Daerah, terdiri dari :

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Kebersihan Kota (RKK), Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah, Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan,

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Ganggung (HO), Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Angkutan Orang, Retribusi Izin Angkutan Barang, Retribusi Izin Usaha Angkutan Sungai, Retribusi Gerobak Sorong, Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal. Retribusi Mobil Derek, Retribusi Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor, Retribusi Leges dan Biaya Administrasi, Retribusi Limbah Domestik dan Lingkungan Hidup, Retribusi Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan, Retribusi Tempat Penumpukan Kayu Budar / Kayu Masak dan Bahan Bangunan Lainnya, Retribusi Usaha Peternakan, Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas, Telur Unggas.

Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan, Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan, Retribusi Izin Kegiatan Pengusahaan Di Bidang Kesejahteraan Sosial, Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Promosi, Retribusi Pelayanan Perizinan Usaha Lahan Pertanian dan Penggunaan / Pengujian Alat Pertanian, Retribusi Pelabuhan Udara, Retribusi Pendirian dan Daftar Ulang Lembaga Pendidikan Luar Sekolah serta Pelayanan Peningkatan Pendidikan. Retribusi Pelayanan Jasa Usaha Koperasi, Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, Retribusi Sertifikasi Kapal Sungai. Retribusi Izin Peruntukan

Penggunaan Tanah, Retribusi Usaha Kepariwisataaan, Retribusi Pertambangan Umum.

- c) Bagian Laba Badan Usaha Daerah yang terdiri dari : Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Pergudangan, Bank Pembangunan Daerah.
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu berupa Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, yang terdiri dari : Angsuran Cicilan Rumah Dinas, Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor, Pengembalian Modal Koperasi, Kontribusi Pelabuhan Laut (PT. Pelindo), Kontribusi Packing Plan Semen Tonasa / Bosowa, Penerimaan Jasa Giro dan Denda.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah suatu kebijakan pemerintah dengan menggunakan desentralisasi fiskal dimana dana Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur dialokasikan kepada Pemerintah Kota Samarinda dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan indikator dan item sebagai berikut :

- 1) Provinsi, dengan item : Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah / Air Permukaan (P3ABT), Bantuan / Subsidi Pembangunan.

- 2) Pusat yang terdiri dari : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), Sektor Kehutanan, Sektor Pertambangan, Sektor Perikanan, Sektor Minyak Bumi, Sektor Gas Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Struktur Belanja

Struktur Belanja yang merupakan variabel tak bebas diukur dengan indikator dan item sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin yang terdiri : Gaji ; Belanja Barang ; Belanja Pemeliharaan ; Belanja Perjalanan Dinas dan Lain-lain.
- b. Belanja Pembangunan yang digunakan untuk Pembangunan Kepentingan Sosial / *Social Overhead Capital (SOC)* dan Pembangunan Menghasilkan Pendapatan / *Directly Productivity Investment (DPI)* :

- 1) **Pembangunan Kepentingan Sosial / *Social Overhead Capital (SOC)***, dengan item : Industri ; Pertanian dan Kehutanan ; Sumber Daya Air dan Irigasi ; Tenaga Kerja ; Perdagangan ; Pengembangan Usaha Daerah ; Keuangan Daerah dan Koperasi ; Transportasi ; Pertambangan dan Energi ; Pariwisata dan Telekomunikasi ; Pembangunan Daerah dan Pemukiman ; Lingkungan Hidup dan Tata Ruang ; Pendidikan ; Kebudayaan Nasional ; Kepercayaan Terhadap Tuhan YME ; Pemuda dan Olah Raga ; Kependudukan dan Keluarga Berencana ; Kesehatan ; Kesejahteraan Sosial ; Peran Wanita, Anak dan Remaja ; Perumahan dan Pemukiman ; Agama ;

IPTEK ; Hukum ; Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan ; Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa.

- 2) Pembangunan Menghasilkan Pendapatan (*Directly Productivity Investment / DPI*), dengan item :** Industri ; Pertanian dan Kehutanan; Sumber Daya Air dan Irigasi ; Tenaga Kerja ; Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi ; Transportasi ; Pertambangan dan Energi ; Pariwisata dan Telekomunikasi ; Pembangunan Daerah dan Pemukiman ; Lingkungan Hidup dan Tata Ruang ; Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga ; Kependudukan dan Keluarga Berencana ; Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peran Wanita, Anak dan Remaja ; Perumahan dan Pemukiman ; Agama ; IPTEK ; Hukum ; Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan ; Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa.

3. Kemandirian Wilayah

Kemandirian wilayah adalah kemampuan suatu daerah untuk membiayai keperluan daerah dengan sumber-sumber pendapatan daerah sendiri yang diukur dari PAD/APBD, APBD/PDRB, dan PAD/PDRB dengan indikator dan item sebagaimana tersebut di atas.

4. Perkembangan Sosial Ekonomi

Perkembangan Sosial Ekonomi adalah suatu perkembangan yang diukur dari indikator : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ;

Pendapatan Per kapita ; Tenaga Kerja ; Pendidikan dan Kesehatan selama pelaksanaan Otonomi Daerah sejak tahun 2001 sampai dengan 2003.

Indikator dan item masing-masing sebagai berikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diukur di 6 kecamatan yakni Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda Seberang dan Palaran dengan lapangan usaha sektor Pertanian ; Pertambangan dan Penggalian ; Industri Pengolahan ; Listrik, Gas dan Air Minum ; Bangunan ; Perdagangan, Hotel dan Restoran ; Pengangkutan dan Komunikasi ; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Jasa-jasa lainnya.

b. Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita yang diukur dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk di setiap kecamatan se Kota Samarinda.

c. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang diukur dari jumlah kesempatan kerja menurut lapangan usaha setiap kecamatan se Kota Samarinda.

d. Pendidikan

Pendidikan yang diukur dari penduduk lima tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di setiap kecamatan Kota Samarinda.

e. Kesehatan

Kesehatan yang diukur dari angka rata-rata usai harapan hidup pria dan wanita di setiap kecamatan se Kota Samarinda.

4.4 Instrument Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan adalah dengan menerapkan pola penelitian eksplanatori dan data berbentuk *time series*, dimana data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dengan kuesioner dan dokumen dari Kantor Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda, Dinas Pendapatan Kota Samarinda, Bagian Keuangan Sekretariat Kota Samarinda dan kantor Kecamatan se Kota Samarinda.

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh Kecamatan Kota Samarinda, yang terdiri dari :

- 1) Kecamatan Samarinda Ilir.
- 2) Kecamatan Samarinda Ulu.
- 3) Kecamatan Samarinda Utara.
- 4) Kecamatan Sungai Kunjang.
- 5) Kecamatan Samarinda Seberang.
- 6) Kecamatan Palaran.

Untuk keperluan analisis guna mengetahui pelaksanaan Pembangunan Sektoral terhadap kemandirian Wilayah dan perkembangan kegiatan sosial ekonomi dalam era otonomi daerah Kota Samarinda, digunakan data setelah pelaksanaan otonomi, yaitu tahun 2001 sampai dengan 2003.

4.6 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data

Mengingat bahwa seluruh data adalah data sekunder, maka prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. Prosedur Pengambilan Data

Data sekunder yang akan diambil dari BPS, BAPPEDA, DISPENDA dan Bagian Keuangan pada Kecamatan dan Kota Samarinda. Data tersebut baik diperoleh dari laporan dan buku yang di publikasikan oleh Kecamatan dan Pemerintah Kota Samarinda, yang mana data tersebut relevan dengan penulisan ini.

2. Pengumpulan Data

Data yang tersedia berbentuk data sekunder dikumpulkan, diamati kemudian didiskusikan dengan pengambil kebijakan serta Pengolah Data agar data tersebut valid reliabel dan akurat.

4.7 Cara Pengolahan dan Analisis Data

4.7.1 Cara Pengolahan Data

Cara pengolahan data meliputi kegiatan :

1. Melakukan verifikasi data, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel.
2. Membuat tabulasi data yang akurat, sesuai dengan kebutuhan analisis.
3. Melakukan analisis finansial yang meliputi ratio PAD/APBD, APBD/PDRB dan PAD/PDRB.

4. Melakukan analisis data untuk pembuktian hipotesis penelitian dengan dua tahap.
 - a. Pertama, analisis faktor konfirmatori terhadap indikator dan atau item dilakukan untuk mendapatkan data dari setiap variabel (laten).
 - b. Kedua, setelah diperoleh data dari setiap variabel laten, untuk pengujian hipotesis penelitian digunakan analisis jalur (*Path Analysis*).

4.7.2 Analisis Data

Analisis sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis Penelitian Kuantitatif dengan Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Bentuk hubungan sebab akibat yang muncul dalam penelitian ini menggunakan model yang tidak sederhana, yaitu adanya variabel yang berperan ganda, sebagai variabel independen pada suatu hubungan, namun menjadi variabel dependen pada hubungan lain. Bentuk hubungan seperti ini membutuhkan alat analisis yang mampu menjelaskan secara simultan, yaitu analisis jalur (*path analysis*).

Alasan penggunaan analisis jalur, yaitu:

- 1) Hipotesis yang akan diuji dikembangkan dari model (kerangka konseptual) yang semua hubungannya bersifat asimetri dan merupakan sistem, sehingga metode yang paling tepat adalah analisis jalur (*path analysis*).

- 2) Analisis Jalur memberikan metode langsung berkaitan dengan hubungan ganda secara simultan (model struktural), sehingga memberikan efisiensi analisis statistika.
- 3) Kemampuannya untuk menguji hubungan secara komprehensif dan memberikan suatu bentuk transisi analisis *exploratory* menuju analisis *confirmatory*. Bentuk transisi ini berkaitan dengan upaya yang lebih besar dalam semua lapangan studi untuk mengembangkan suatu pandangan masalah secara lebih sistematis dan holistik. Upaya seperti itu memerlukan kemampuan untuk menguji suatu hubungan yang berantai yang membentuk model yang besar, seperangkat prinsip dasar, atau suatu teori keseluruhan, hal seperti ini sangat cocok diselesaikan dengan analisis jalur.
- 4) Proses perhitungan koefisien path didekati melalui analisis regresi dengan variabel dibakukan (*standardize regression*). Komputasi dilakukan dengan bantuan *software* SPSS for Windows Rel 11.5.

2. Penelitian Kualitatif Posisi Tingkat Kemandirian Wilayah dengan Analisis Proporsional

Pada posisi mana tingkat keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam mewujudkan Kemandirian Wilayah diketahui melalui dengan membandingkan Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan serta APBD dan PDRB dengan standarisasi posisi otonomi dalam menuju kemandirian wilayah yang dikemukakan oleh Zadjuli (2002), dalam Restrukturisasi Pembangunan Ekonomi Dalam Era Reformasi, sebagaimana Tabel 1.2 halaman 13.

BAB 5

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1 Data Penelitian

5.1.1 Gambaran Umum Kota Samarinda

Kota Samarinda terletak dengan dibatasi Sungai Mahakam, perkembangannya dimulai sebelah Utara yang dikenal dengan Kecamatan Samarinda Seberang, dahulu disebut Samarinda yang merupakan sebuah kampung.

“Menurut buku “Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai” penerbitan Daerah Kabupaten Kutai, yang mengutip dari buku dalam bahasa Belanda “*Geschiedenis van Indonesie*” karangan de Graaf, penerbitan N.V. Uitg. W.V. Hoeve, Den Haag-Bandung tahun 1949, Samarinda (baca: Samarinda Seberang) yang terletak di sebelah kiri masuk Sungai Mahakam mula-mula dibuka / di tempati dalam tahun 1668, oleh orang-orang Suku Bugis dari Sulawesi. Sebagai pimpinannya ialah seorang yang bernama Poea Adi. Pada waktu itu Samarinda (Seberang) maupun tempat terletak di seberangnya (Kota Samarinda Seberang) termasuk dalam wilayah Kerajaan Kutai dan sepenuhnya berada dalam kekuasaan Kerajaan ini.” (Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda, 1978 : 9)

Dalam perkembangannya, saat ini sebelah selatan lebih cepat perubahannya, baik dari aspek fisik maupun jumlah penduduk. Dari struktur perekonomian Kota Samarinda masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan. Selain lapangan usaha tersebut, yang cukup berperan adalah Lapangan Usaha Perdagangan, hotel dan restoran, Keuangan persewaan dan jasa perusahaan, Pengangkutan dan komunikasi. Selain itu

lapangan usaha Pertanian, Pertambangan dan penggalian, Listrik gas dan air minum, Bangunan dan Jasa-jasa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 1 Tahun 1988, ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Samarinda tanggal 21 Januari 1968. Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur.

Dari geografis menurut Badan Meteorologi dan Geofisika terletak di daerah khatulistiwa yaitu $0^{\circ}21'18''-1^{\circ}09'18''\text{LU}$ dan $116^{\circ}15'16''-117^{\circ}24'16''\text{BT}$. Datar dan berbukit, antara 10-20 m di atas permukaan laut, beriklim tropis basah, hujan sepanjang tahun. Temperatur udara $20^{\circ}\text{C}-34^{\circ}\text{C}$, dengan curah hujan rata-rata per tahun 1850 mm, sedangkan kelembaban udara rata-rata 85%.

Dalam bidang pemerintahan, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1960 telah dilakukan penandatanganan dokumen serah terima wilayah dari Pemerintah Daerah Istimewa Kutai kepada Pemerintah Daerah Kotapraja Samarinda. Wilayah meliputi luas 167 Km^2 yang dibagi dalam 3 kecamatan, yaitu Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Seberang. Ketiga wilayah kecamatan inilah yang kemudian merupakan perkotaan (*Urban Area*).

Kemudian dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 18/5K/TH-Pem/1968, tanggal 2 Februari 1969, Kotamadya Samarinda diperluas menjadi 2.727 Km^2 , di mana 2.560 Km^2 merupakan wilayah pedesaan (*Rural Area*) dibagi dalam 4 kecamatan,

masing-masing Kecamatan Palaran, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Kecamatan Samboja.

Dengan diterbitkannya / ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 luas wilayah Daerah Tingkat II Samarinda menjadi 716 Km² dengan pembagian wilayah administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 terbit, mengalami pemekaran, semula 4 kecamatan berubah menjadi 6 kecamatan masing-masing Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda Seberang dan Kecamatan Palaran.

Penduduk Kota Samarinda pada akhir Juli 2001 sebanyak 509.346 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk antara 5 - 7% setiap tahun. Hasil estimasi Suseda 2002, jumlah penduduk pada Februari 2002 sebanyak 539.726 jiwa, terdiri atas 275.435 jiwa penduduk laki-laki dan 264.291 jiwa penduduk perempuan. Persentase sebaran penduduk Kota Samarinda tahun 2002 yang terbanyak berada pada Kecamatan (Samarinda Utara, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Sungai Kunjang) atau sebanyak 77,87%, selebihnya atau 22,13% berada pada 2 kecamatan lainnya (Samarinda Seberang dan Palaran).

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonomi semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai Undang-Undang tersebut maka sebutan untuk Kotamadya Daerah Tingkat II

Samarinda diubah menjadi Kota Samarinda, sedangkan untuk pemerintahannya disebut Pemerintah Kota Samarinda dengan walikota sebagai Kepala Daerahnya.

Penduduk Kota Samarinda tersebar di 6 kecamatan, 42 kelurahan / desa, dengan penyebaran yang tidak merata dan terkonsentrasi di pusat-pusat perekonomian. Pada tahun 2003 Persebaran penduduk tertinggi berdomisili di Kecamatan Samarinda Utara yang mencapai 137.348 jiwa (24,57 %), disusul Kecamatan Samarinda Ulu 108.697 jiwa (19,45 %). Sebaliknya jumlah penduduk terendah berdomisili di Kecamatan Palaran dengan jumlah penduduk 38.899 jiwa (6,96 %).

Penyebaran penduduk yang tidak merata akan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan, sehingga pada kecamatan tertentu kepadatannya cukup tinggi dan kecamatan lainnya relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh kemudahan fasilitas yang tersedia seperti pusat perbelanjaan, pendidikan, kesehatan dan fasilitas pelayanan lainnya, sebagai alternatif bermukim.

Untuk mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk di wilayah Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
TINGKAT PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT
KECAMATAN TAHUN 2003

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan per Km ²	Persebaran Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Samarinda Ilir	97.902	1.082	17,52
Samarinda Utara	137.348	514	24,57
Samarinda Ulu	108.697	1.745	19,45
Sungai Kunjang	86.948	140	15,56
Samarinda Seberang	89.124	1.940	15,95
Palaran	38.899	241	6,96
JUMLAH	558.918	-	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Rata-rata kepadatan penduduk Kota Samarinda pada tahun 2003 setiap Km² terdapat 726 penduduk (jiwa). Dari tabel tersebut terlihat bahwa kepadatan terendah terjadi di Kecamatan Sungai Kunjang, Palaran dan Samarinda Utara mencatat rata-rata 140 jiwa/Km², 241 jiwa/Km² dan 514 jiwa/Km². Sedangkan kecamatan terpadat terjadi di Kecamatan Samarinda Seberang yang mencapai 1.940 jiwa/Km² disusul Kecamatan Samarinda Ulu mencapai 1.745 jiwa/Km². Kemudian Kecamatan Samarinda Ilir mencapai 1.082 jiwa/Km².

5.1.2 Data Obyek Penelitian

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kota Samarinda terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda terdiri dari bagian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD pada tahun 2001 sebanyak Rp 29.977.874.986,00 tahun 2002 mengalami kenaikan menjadi Rp 45.507.021.903,00 kemudian tahun 2003 juga terjadi kenaikan sebanyak Rp 55.188.761.708,89.

1) Pajak Daerah

Berdasarkan data hasil penelitian, struktur pendapatan daerah Kota Samarinda yaitu dalam Lampiran 2a, 2b dan 2c, pada tahun 2001 Realisasi Pajak Daerah sebanyak Rp 12.760.931.793,00, pada tahun 2002 terealisasi sebanyak

Rp 16.819.448.224,00 dan pada tahun 2003 terealisasi sebanyak Rp 22.107.806.270,63.

2) Retribusi Daerah

Untuk Retribusi Daerah realisasinya pada tahun 2001 sebanyak Rp 13.470.215.247,00 kemudian tahun 2002 sebanyak Rp 16.709.707.171,00 dan pada tahun 2003 terealisasi sebanyak Rp 20.968.943.868,60.

3) Bagian Laba BUMD

Realisasi pada Bagian Laba Badan Usaha Daerah tahun 2001 sebanyak Rp 238.691.187,00 pada tahun 2002 sebanyak Rp 317.055.186,63, dan tahun 2003 tidak ada realisasi.

4) Lain - lain Pendapatan yang Sah

Kemudian pada bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperoleh realisasi pada tahun 2001 sebanyak Rp 3.508.036.759,00 kemudian pada tahun 2002 terealisasi sebanyak Rp 11.660.811.321,37 selanjutnya pada tahun 2003 sebanyak Rp 12.112.011.569,66.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari 2 bagian yaitu Bagi Hasil dari Provinsi dan Bagi Hasil dari Pusat. Pada tahun 2001 dari Dana Perimbangan telah diperoleh sebanyak Rp 431.156.106.927,98 kemudian pada tahun 2002 diperoleh kenaikan sebanyak Rp 469.042.084.507,99 dan pada tahun 2003 meningkat lagi sebanyak Rp 569.104.141.475,57.

1) Bagi Hasil dari Provinsi

Pada tahun 2001 Bagi Hasil dari Provinsi diperoleh sebanyak Rp 46.090.116.505,00 pada tahun 2002 sebanyak Rp 34.715.632.988,28 dan pada tahun 2003 sebanyak Rp 66.869.508.347,45. Bagi Hasil dari Provinsi terdiri atas 4 (empat) jenis penerimaan masing-masing yaitu :

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB / BBNKB)
- (2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- (3) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/ Permukaan (P3ABT)
- (4) Bantuan / Subsidi Pembangunan

Untuk PKB / BBNKB pada tahun 2001 diperoleh sebanyak Rp 8.913.719.850,00 pada tahun 2002 turun sebanyak Rp 6.905.994.675,00 dan tahun 2003 naik menjadi Rp 14.406.548.838,00. Pada tahun 2001 penerimaan dari PBBKB sebanyak Rp 1.626.396.655,00 dan pada tahun 2002 naik menjadi Rp 5.511.626.417,63 serta tahun 2003 juga terjadi kenaikan lagi menjadi Rp 10.764.794.117,00. Pada tahun 2001 Pajak pengambilan air bawah tanah dan permukaan tidak ada penerimaan, kemudian pada tahun 2002 diperoleh sebanyak Rp 898.011.895,65 serta tahun 2003 diperoleh sebanyak Rp 698.165.392,45. Bantuan / Subsidi Pembangunan, Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2001

memperoleh bantuan sebanyak Rp 35.550.000.000,00 pada tahun 2002 sebanyak Rp 21.400.000.000,00 dan pada tahun 2003 sebanyak Rp 41.000.000.000,00.

2) Bagi Hasil dari Pusat

Pada tahun 2001, Pemerintah Kota Samarinda memperoleh dana Bagi Hasil dari Pusat sebanyak Rp 385.065.990.422,98, dan tahun 2002 naik menjadi Rp 434.326.451.519,71, kemudian pada tahun 2003 juga terjadi kenaikan menjadi sebanyak Rp 502.234.633.128,12. Bagi Hasil dari Pusat terdiri dari 10 (sepuluh) jenis penerimaan yaitu :

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (3) Pajak Penghasilan (PPh)
- (4) Sektor Kehutanan
- (5) Sektor Pertambangan
- (6) Sektor Perikanan
- (7) Sektor Minyak Bumi
- (8) Sektor Gas Alam
- (9) Dana Alokasi Umum (DAU)
- (10) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pada tahun 2001 diperoleh penerimaan sebanyak Rp 16.030.394.673,00 dan pada tahun 2002 sebanyak Rp 20.831.467.093,00 serta tahun 2003 sebanyak Rp 27.726.741.017,00.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2001 sebanyak Rp 3.016.836.200,00 tahun 2002 sebanyak

Rp 4.926.394.977,00 kemudian pada tahun 2003 sebanyak Rp 6.920.209.235,00.

Pajak Penghasilan (PPH) pada tahun 2001 diperoleh sebanyak Rp 10.098.630.000,00 dan pada tahun 2002 sebanyak Rp 15.200.340.000,00 serta pada tahun 2003 diperoleh sebanyak Rp 20.785.092.000,00.

Sektor Kehutanan pada tahun 2001 diperoleh sebanyak Rp 2.489.154.215,00 kemudian pada tahun 2002 sebanyak Rp 3.456.500.459,09 dan pada tahun 2003 diperoleh sebanyak Rp 18.829.154.496,15.

Sektor Pertambangan tahun 2001 diperoleh sebanyak Rp 11.057.418.583,00 dan pada tahun 2002 diperoleh sebanyak Rp 14.232.268.974,60 serta pada tahun 2003 diperoleh sebanyak Rp 30.939.787.136,95.

Sektor Perikanan tahun 2001 tidak memperoleh bagi hasil, tahun 2002 sebanyak Rp 103.337.753,04 dan tahun 2003 kembali tidak memperoleh bagi hasil.

Sektor Minyak Bumi pada tahun 2001 diperoleh sebanyak Rp 35.837.529.804,00 kemudian pada tahun 2002 sebanyak Rp 43.482.646.375,00 dan selanjutnya pada tahun 2003 sebanyak Rp 41.614.727.087,00. Sektor Gas Alam tahun 2001 diperoleh sebanyak Rp 110.102.486.947,98,00 dan pada tahun 2002 sebanyak Rp 136.628.870.887,98 dan pada tahun 2003 diperoleh sebanyak Rp 150.040.883.656,02.

Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Samarinda memperoleh bagi hasil dari Pusat pada tahun 2001 adalah sebanyak Rp 196.433.540.000,00 dan pada tahun 2002 diperoleh sebanyak Rp 195.464.625.000,00 serta pada tahun 2003 diperoleh sebanyak Rp 200.423.817.500,00, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), pada tahun 2001 dan 2002 Pemerintah Kota Samarinda tidak memperoleh bagi hasil, namun pada tahun 2003 baru diperoleh sebanyak Rp 4.954.221.000,00.

c. Lain-lain Penerimaan yang Sah

Pada bagian Lain-lain Penerimaan yang Sah, Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2001 sampai dengan 2003 tidak ada penerimaan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran IIA, IIB dan IIC.

2. Pembiayaan

Dalam struktur pendapatan daerah, pembiayaan yang dikeluarkan untuk pembangunan Kota Samarinda pada tahun 2001 mencapai Rp 33.506.824.869,00 yang terdiri dari penerimaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebanyak Rp 17.854.492.227,00 serta dari pinjaman dan obligasi sebanyak Rp 1.741.290.667,00 kemudian dari Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebanyak Rp 13.911.041.975,00.

Untuk tahun 2002 pembiayaan mencapai Rp 106.039.705.003,96 yang terdiri dari penerimaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebanyak Rp 85.238.802.254,96 serta

dari pinjaman dan obligasi Rp 4.487.534.478,00 kemudian dari Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebanyak Rp 16.313.368.271,00.

Selanjutnya pada tahun 2003 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebanyak Rp 89.634.804.995,52 serta dari Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) mencapai sebanyak Rp 18.130.804.600,00 seperti yang terlihat pada Lampiran IIa, IIb dan IIc.

a. Belanja Daerah

1) Belanja Rutin

Dalam struktur belanja, Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2001 mengalokasikan dana untuk belanja rutin sebanyak Rp 223.340.028.339,37 yang terdiri dari untuk gaji sebanyak Rp 134.390.730.026,00 selanjutnya untuk barang sebanyak Rp 31.528.618.433,00 kemudian untuk pemeliharaan sebanyak Rp 6.601.591.032,00 dan untuk perjalanan dinas sebanyak Rp 4.330.765.100,00 serta untuk lain-lain sebanyak Rp 46.488.323.748,37.

Selanjutnya pada tahun 2002 mengeluarkan dana untuk belanja rutin sebanyak Rp 283.715.492.622,00 yang terdiri dari untuk gaji sebanyak Rp 151.132.651.921,00 kemudian untuk barang sebanyak Rp 34.130.186.101,00 untuk pemeliharaan Rp 7.410.006.423,00 dan untuk perjalanan dinas sebanyak Rp 5.936.853.580,00 serta lain-lain mencapai sebanyak Rp 85.105.794.597,00.

Kemudian Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2003 pengeluaran / penggunaan dana dari belanja rutin sebanyak Rp 217.040.626.957,69 kemudian yang dipergunakan untuk gaji sebanyak Rp 122.846.240.478,41, kemudian untuk barang sebanyak Rp 20.240.297.502,28, untuk pemeliharaan sebanyak Rp 6.854.229.957,00 dan perjalanan dinas sebanyak Rp 5.412.426.350,00 serta untuk lain-lain sebanyak Rp 61.687.432.670,00 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran IIIa, IIIb dan IIIc.

Selanjutnya pada lampiran yang sama penggunaan dana untuk belanja rutin / aparatur pada masing-masing kecamatan tahun 2001 terdiri dari Kecamatan Samarinda Ilir sebanyak Rp 75.935.609.635,39, kemudian untuk Kecamatan Samarinda Utara sebanyak Rp 26.800.803.400,72, kemudian Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak Rp 55.835.007.084,84, Sungai Kunjang sebanyak Rp 20.100.602.550,54, Samarinda Seberang sebanyak Rp 33.501.004.250,91, dan Kecamatan Palaran sebanyak Rp 11.167.001.416,97.

Pada tahun 2002 belanja rutin / aparatur masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Samarinda Ilir sebanyak Rp 96.463.267.491,48, kemudian Kecamatan Samarinda Utara Rp 34.045.859.114,64, Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak Rp 70.928.873.155,50, Kecamatan Sungai Kunjang sebanyak Rp 25.534.394.335,98. untuk Kecamatan Samarinda Seberang

Rp 42.557.323.893,30, dan Kecamatan Palaran sebanyak Rp 14.185.774.631,10.

Sedangkan untuk tahun 2003 belanja rutin / aparatur masing-masing kecamatan yaitu untuk Kecamatan Samarinda Ilir memperoleh sebanyak Rp 73.793.813.165,62, kemudian untuk Samarinda Utara sebanyak Rp 26.044.875.234,92, selanjutnya Samarinda Ulu sebanyak Rp 54.260.156.739,42, Sungai Kunjang sebanyak Rp 19.533.656.426,20, Samarinda Seberang sebanyak Rp 32.556.094.043,65, dan untuk Kecamatan Palaran sebanyak Rp 10.852.031.347,88.

2) Belanja Pembangunan / Publik

Belanja pembangunan yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan belanja publik terdiri dari 2 bagian di mana tiap bagian tersebut mempunyai bidang yang sama dengan nilai penggunaan dana atau pengeluaran yang berbeda.

a) Pembangunan Kepentingan Umum / Sosial (*Social Overhead Capital / SOC*)

Pada tahun 2001, pembangunan untuk sarana kepentingan umum / sosial (*Social Overhead Capital / SOC*) Pemerintah Kota Samarinda telah mengalokasikan dana dengan total sebanyak Rp 252.122.876.819,97 yang terdiri dari bidang Pertanian dan Kehutanan Rp 845.137.900,00 bidang tenaga kerja sebanyak Rp 43.528.000,00 untuk bidang perdagangan, pengembangan Usaha Daerah, Keuangan

Daerah dan Koperasi Rp 1.498.725.431,00 kemudian untuk bidang pariwisata dan telekomunikasi Rp 1.856.369.300,00.

Kemudian untuk bidang pembangunan daerah dan pemukiman sebanyak Rp 1.700.273.000,02, untuk bidang lingkungan hidup dan tata ruang sebanyak Rp 126.862.955.329,98, bidang pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga sebanyak Rp 14.089.087.091,00 kependudukan dan keluarga berencana Rp 124.999.999,98, bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, peran wanita, anak dan remaja sebanyak Rp 1.958.570.200,02, untuk perumahan dan pemukiman sebanyak Rp 34.623.271.500,02.

Selanjutnya untuk bidang agama sebanyak Rp 388.999.999,98, untuk bidang IPTEK sebanyak Rp 2.421.670.699,98, hukum Rp 137.500.000,02, aparatur pemerintahan dan pengawasan Rp 16.698.270.314,98 serta bidang politik, penerangan, komunikasi dan media massa Rp 275.500.000,02. Selanjutnya pada tahun 2002, pembangunan untuk sarana kepentingan umum / sosial (*Social Overhead Capital / SOC*) Kota Samarinda telah mengalokasikan dana dengan total sebanyak Rp 303.868.948.399,84, sedangkan pada tahun 2003 dengan total pengeluaran dana sebanyak Rp 458.017.885.822,25.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran IIIa, IIIb dan IIIc.

Masih dalam lampiran yang sama, pembangunan untuk sarana kepentingan umum / sosial (*Social Overhead Capital / SOC*) Kota Samarinda untuk masing-masing kecamatan pada tahun 2001 yaitu untuk Kecamatan Samarinda Ilir sebanyak Rp 133.434.578.255,16, untuk Samarinda Utara sebanyak Rp 25.207.189.458,83, kemudian untuk Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak adalah Rp 32.205.137.827,66, untuk Sungai Kunjang sebanyak Rp 20.181.984.800,83, kemudian untuk Kecamatan Samarinda Seberang sebanyak Rp 20.698.299.876,66 dan Kecamatan Palaran sebanyak Rp 20.395.686.600,83.

Pada tahun 2002 Kecamatan Samarinda Ilir sebanyak Rp 67.391.176.537,78, kemudian untuk Samarinda Utara sebanyak Rp 43.128.024.293,12, untuk Samarinda Ulu sebanyak Rp 64.177.909.317,62, selanjutnya untuk Kecamatan Sungai Kunjang sebanyak Rp 49.497.351.161,11, untuk Kecamatan Samarinda Seberang sebanyak Rp 41.757.934.370,10 dan untuk Kecamatan Palaran sebanyak Rp 37.916.552.720,11.

Pada tahun 2003 pembangunan untuk sarana kepentingan umum / sosial (*Social Overhead Capital / SOC*) Kota Samarinda untuk Kecamatan Samarinda Ilir sebanyak

Rp 87.072.713.052,52, kemudian untuk Kecamatan Samarinda Utara sebanyak Rp 79.075.118.227,55, untuk Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak Rp 91.164.141.052,52, Sungai Kunjang sebanyak Rp 63.791.634.170,19, kemudian untuk Kecamatan Samarinda Seberang sebanyak Rp 70.962.271.091,92 dan Kecamatan Palaran sebanyak Rp 65.952.008.227,55.

b) Pembangunan Menghasilkan Pendapatan (*Directly Productivity Investment / DPI*)

Pada tahun 2001 dialokasikan dana sebanyak Rp 19.177.901.622,69, selanjutnya pada tahun 2002 sebanyak Rp 33.004.370.392,97 dan pada tahun 2003 sebanyak Rp 57.000.000.000,00 di mana uraian yang lebih jelas dapat dilihat pada Lampiran IIIa, IIIb, dan IIIc. Untuk masing-masing kecamatan yang ada dalam Kota Samarinda, Pembangunan Menghasilkan Pendapatan (*Directly Productivity Investment / DPI*) pada tahun 2001 telah dialokasikan yaitu Kecamatan Samarinda Ilir sebanyak Rp 6.014.384.960,57, untuk Samarinda Utara sebanyak Rp 2.319.407.309,64, untuk Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak Rp 3.110.778.895,09, untuk Kecamatan Sungai Kunjang Rp 4.469.322.179,24, Kemudian Kecamatan Samarinda Seberang sebanyak Rp 1.733.850.868,12 dan untuk Kecamatan Palaran sebanyak Rp 1.530.157.410,03.

Tahun 2002 Kecamatan Samarinda Ilir sebanyak Rp 5.413.215.034,66, selanjutnya Samarinda Utara sebanyak Rp 5.587.229.091,66, kemudian Samarinda Ulu sebanyak Rp 4.260.747.833,33, Sungai Kunjang Rp 3.396.989.133,33, Samarinda Seberang sebanyak Rp 10.539.093.733,33 dan Kecamatan Palaran sebanyak Rp 3.807.098.566,66.

Pada tahun 2003 Kecamatan Samarinda Ilir sebanyak Rp 9.266.632.310,00 untuk Kecamatan Samarinda Utara sebanyak Rp 9.665.348.260,00 Kecamatan Samarinda Ulu Rp 7.375.076.480,00 kemudian untuk Kecamatan Sungai Kunjang sebanyak Rp 5.883.554.440,00 untuk Kecamatan Samarinda Seberang sebanyak Rp 18.216.905.120,00 dan selanjutnya untuk Kecamatan Palaran sebanyak Rp 6.592.483.390,00

3. Sosial Ekonomi

Kota Samarinda yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda Seberang dan Kecamatan Palaran memiliki karakteristik kegiatan sosial ekonomi yang berbeda terutama dilihat dari letak geografis, penduduk, perkembangan ekonomi, kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan.

a) Letak Geografis

Kota Samarinda terletak pada posisi $0^{\circ} 21' 18'' - 1^{\circ} 09' 18''$ LU dan $116^{\circ} 15' 16'' - 117^{\circ} 24' 16''$ BT dengan batas wilayah

sebelah Utara Kecamatan Muara Badak; sebelah Timur Kecamatan Muara Badak dan Anggana serta Kecamatan Sanga-Sanga; sebelah Selatan Kecamatan Loa Janan serta sebelah Barat Kecamatan Muara Badak dan Tenggarong Seberang sehingga Kota Samarinda dikelilingi oleh kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara.

1) Kecamatan Samarinda Ilir

Kecamatan Samarinda Ilir merupakan bagian dari Kota Samarinda terletak pada kedudukan $0^{\circ} 21' 18'' - 1^{\circ} 9' 6''$ LS dan $116^{\circ} 15' 36'' - 117^{\circ} 24' 16''$ BT dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Anggana (Kabupaten Kutai Kertanegara); sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Seberang / Kecamatan Palaran dan sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Samarinda Seberang/ Kecamatan Samarinda Ulu dengan luas wilayah $\pm 102,96 \text{ Km}^2$ yang terbagi ke dalam 13 Desa dan Kelurahan, yaitu Kelurahan Pasar Pagi, Pelabuhan, Karang Mumus, Selili, Sungai Dama, Sidomulyo, Sungai Pinang Luar serta Sidodamai dan Desa Sungai Kapih, Pulau Atas, Sambutan, Makroman dan Desa Sindang Sari.

2) Kecamatan Samarinda Utara

Secara geografis Kecamatan Samarinda Utara merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah sekitar $294,31 \text{ Km}^2$ atau 40,99% dari luas total Kota Samarinda. Sedangkan menurut

pembagian administratif maka Kecamatan Samarinda Utara terbagi menjadi 6 desa / kelurahan, yakni Sungai Pinang Dalam (19,96 Km²), Temindung Permai (5,78 Km²), Lempake (53,31 Km²), Sungai Siring (87,42 Km²), Pelita (1,96 Km²), Sempaja (83,29 Km²). Berdasarkan klasifikasinya maka keenam desa / kelurahan tersebut seluruhnya mempunyai klasifikasi Swa Sembada.

3) Kecamatan Samarinda Ulu

Kecamatan Samarinda Ulu merupakan bagian dari Kota Samarinda terletak pada kedudukan 0° 21' 18" – 1° 9' 6" LS dan 116° 15' 36" – 117° 24' 16" BT dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Ilir, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sanga-sanga (Kabupaten Kutai Kertanegara), sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan (Kabupaten Kutai Kertanegara) dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Seberang, dengan luas wilayah ± 15,52 Km² yang terbagi ke dalam 8 kelurahan, yaitu Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa, Bugis, Sidodadi, Air Putih, Dadi Mulya, Gunung Kelua dan Air Hitam.

4) Kecamatan Sungai Kunjang

Kecamatan Sungai Kunjang merupakan bagian dari Kota Samarinda terletak pada kedudukan 0° 21' 18" – 1° 9' 6" LS dan 116° 15' 36" – 117° 24' 16" BT dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Ulu, sebelah timur

berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Ulu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara, dengan luas wilayah $\pm 57,84 \text{ Km}^2$ yang terbagi ke dalam 5 desa / kelurahan, yaitu Kelurahan Karang Asam, Telok Lerong Ulu dan Desa Loa Buah serta Desa Lok Bahu.

5) Kecamatan Samarinda Seberang

Kecamatan Samarinda Seberang merupakan bagian dari Kota Samarinda terletak pada kedudukan $0^{\circ} 21' 18'' - 1^{\circ} 9' 6'' \text{ LS}$ dan $116^{\circ} 15' 36'' - 117^{\circ} 24' 16'' \text{ BT}$ dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Ilir, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Palaran, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan (Kabupaten Kutai Kertanegara) dan sebelah barat berbatasan dengan Loa Janan (Kabupaten Kutai Kertanegara), dengan luas wilayah $\pm 40,48 \text{ Km}^2$ yang terbagi ke dalam 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Loa Janan Ilir, Sungai Keledang, Baka / Rapak Dalam, Mesjid dan Harapan Baru.

b) Penduduk

Dalam 3 tahun terakhir (2001-2003) jumlah penduduk Kota Samarinda telah meningkat dari 529.767 jiwa tahun 2001 menjadi 558.928 jiwa tahun 2003 sehingga rata-rata tiap tahun telah meningkat sebanyak 2,72% dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Samarinda Utara sebanyak 137.348 jiwa dan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Palaran sebanyak 38.899 jiwa.



1) Kecamatan Samarinda Ilir

Jumlah penduduk Kecamatan Samarinda Ilir berdasarkan data tahun 2001 sebanyak 97.302 jiwa dan pada tahun 2002 sebanyak 97.808 jiwa serta tahun 2003 sebanyak 97.902 jiwa yang tersebar di 13 kelurahan / desa. Secara umum pertumbuhan penduduk Kecamatan Samarinda Ilir relatif kecil yaitu sebanyak 0,27 % pertahun jauh dibawah pertumbuhan penduduk secara nasional.

2) Kecamatan Samarinda Utara

Berdasarkan data Registrasi Penduduk Tahun 2001 maka jumlah penduduk di Kecamatan Samarinda Utara adalah sebanyak 132.343 jiwa, pada tahun 2002 sebanyak 135.876 jiwa dan tahun 2003 sebanyak 137.348 jiwa yang tersebar di 6 kelurahan / desa.

3) Kecamatan Samarinda Ulu

Berdasarkan data Registrasi Penduduk Tahun 2001 maka jumlah penduduk di Kecamatan Samarinda Ulu adalah sebanyak 102.691 jiwa, pada tahun 2002 sebanyak 104.063 jiwa dan tahun 2003 sebanyak 108.697 jiwa yang tersebar di 8 kelurahan / desa.

4) Kecamatan Sungai Kunjang

Jumlah penduduk Kecamatan Sungai Kunjang berdasarkan data tahun 2001 sebanyak 80.448 jiwa, pada tahun 2002 sebanyak 82.569 jiwa dan tahun 2003 sebanyak 86.948 jiwa yang tersebar di 5 kelurahan / desa.

5) Kecamatan Samarinda Seberang

Jumlah penduduk Kecamatan Samarinda Seberang berdasarkan data tahun 2001 sebanyak 80.114 jiwa, pada tahun 2002 sebanyak 81.980 jiwa dan tahun 2003 sebanyak 89.124 jiwa yang tersebar di 5 kelurahan / desa.

6) Kecamatan Palaran

Berdasarkan data tahun 2001 jumlah penduduk Kecamatan Palaran sebanyak 36.869 jiwa, pada tahun 2002 sebanyak 37.430 jiwa dan pada tahun 2003 sebanyak 38.899 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan ekonomi masyarakat Kota Samarinda diukur berdasarkan PDRB dan pendapatan perkapita rata-rata penduduk / masyarakat Kota Samarinda dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 dapat dilihat pada Lampiran Va, Vb, dan Vc serta VIa, VIb dan VIc.

PDRB penduduk / masyarakat Kota Samarinda atas dasar harga konstan tahun 1993 terus meningkat dari Rp 3.079.665,85 (dalam juta) pada tahun 2001 menjadi Rp 4.054.460.617,52 pada tahun 2003.

Untuk PDRB Kota Samarinda dari tahun 2001 sampai dengan 2003 atas dasar harga konstan tahun 1993 terbesar berada di Kecamatan Samarinda Ilir dan yang terendah berada di Kecamatan Palaran. Sedangkan PDRB Kota Samarinda atas dasar harga berlaku pada tahun 2001 dan 2002 terbesar berada di Kecamatan Samarinda

Iilir dan terendah berada di Kecamatan Palaran tetapi pada tahun 2003 terjadi perubahan di mana PDRB terbesar berada di Kecamatan Samarinda Iilir dan terendah di Kecamatan Samarinda Utara.

Perkembangan ekonomi Kota Samarinda secara umum ditentukan oleh 9 sektor yang sangat berperan dalam memberikan kontribusinya yaitu sektor pertanian ; pertambangan dan penggalian ; industri pengolahan ; listrik, gas dan air minum; bangunan ; perdagangan, hotel dan restoran ; pengangkutan dan komunikasi ; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa.

Pada tahun 2001, PDRB Kota Samarinda atas dasar harga konstan tahun 1993 mendapat kontribusi terbesar pertama dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak Rp 948.987,21 (dalam juta), kedua sektor industri pengolahan sebanyak Rp 922.669,66 dan ketiga sektor pengangkutan dan komunikasi sebanyak Rp 409.384,99. Pada tahun 2002 dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak Rp 1.107.281.864,00 (dalam juta), kemudian dari sektor industri pengolahan sebanyak Rp 1.000.265.937,00 dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebanyak Rp 501.299.631,00.

Pada tahun 2003 dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak Rp 1.367.296.312,00 (dalam juta), sektor industri pengolahan sebanyak Rp 1.209.257.311,00 dan untuk sektor pengangkutan dan komunikasi sebanyak Rp 612.776.513,00

1) Kecamatan Samarinda Ilir

Pada tahun 2001 PDRB yang dihitung atas harga konstan tahun 1993 di Kecamatan Samarinda Ilir sebanyak Rp 752.217,94 (dalam juta). Beberapa kegiatan ekonomi yang turut memberikan kontribusi terbesar untuk 3 sektor ekonomi di Kecamatan Samarinda Ilir diukur berdasarkan jumlah nilai tambah sektor terhadap PDRB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak Rp 374.111,88 (dalam juta), disusul dari sektor industri pengolahan sebanyak Rp 141.949,18, kemudian diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebanyak Rp 70.102,84.

Selanjutnya atas dasar harga konstan tahun 1993 sektor yang sangat berperan dalam memberikan kontribusi terbesarnya pada tahun 2002 melalui sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak Rp 436.490.510,79 (dalam juta), lalu diikuti oleh sektor industri pengolahan sebanyak Rp 153.840.901,11, kemudian sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebanyak Rp 73.579.310,28. Pada tahun 2003 sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak Rp 538.988.206,19 (dalam juta), lalu sektor industri pengolahan sebanyak Rp 185.983.774,44, namun sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan digantikan peranannya sebagai kegiatan ekonomi terbesar ketiga yaitu oleh sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebanyak Rp 83.827.826,98. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran Va, Vb, Vc dan Lampiran VIa, VIb, VIc.

2) Kecamatan Samarinda Utara

Pada tahun 2001 PDRB yang dihitung atas harga konstan tahun 1993 di Kecamatan Samarinda Utara sebanyak Rp 345.060,37 (dalam juta). Tahun 2002 PDRB sebanyak Rp 351.990.798,28 dan tahun 2003 sebanyak Rp 415.194.379,35. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2001 mencapai sebanyak Rp 780.288,99, kemudian tahun 2002 mencapai sebanyak Rp 1.402.522.487,75. Selanjutnya pada tahun 2003 sebanyak Rp 818.250.104,09.

3) Kecamatan Samarinda Ulu

Pada tahun 2001 PDRB yang dihitung atas harga konstan tahun 1993 di Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak Rp 700.399,69 (dalam juta). Kemudian tahun 2002 PDRB sebanyak Rp 787.067.281,00 dan tahun 2003 sebanyak Rp 936.269.042,01. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2001 sebanyak Rp 1.410.321,77, kemudian tahun 2002 meningkat sebanyak Rp 1.592.944.406,25. Selanjutnya pada tahun 2003 terjadi peningkatan sebanyak Rp 1.743.367.303,60.

4) Kecamatan Sungai Kunjang

Pada tahun 2001 PDRB yang dihitung atas harga konstan tahun 1993 di Kecamatan Sungai Kunjang sebanyak Rp 530.754,75 (dalam juta). Tahun 2002 PDRB sebanyak Rp 583.905.651,71 dan tahun 2003 sebanyak Rp 700.916.995,15.

PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2001 sebanyak Rp 1.184.827,31, kemudian pada tahun 2002 meningkat sebanyak Rp 1.354.712.765,00 Selanjutnya pada tahun 2003 terjadi peningkatan sebanyak Rp 1.415.481.793,70.

5) Kecamatan Samarinda Seberang

Pada tahun 2001 PDRB yang dihitung atas harga konstan tahun 1993 di Kecamatan Samarinda Seberang sebanyak Rp 393.450,87 (dalam juta). Tahun 2002 PDRB sebanyak Rp 436.712.044,25 dan tahun 2003 sebanyak Rp 521.803.828,74.

PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2001 sebanyak Rp 884.715,95, kemudian pada tahun 2002 meningkat sebanyak Rp 1.002.897.433,00 Selanjutnya pada tahun 2003 terjadi peningkatan sebanyak Rp 1.096.284.181,87.

6) Kecamatan Palaran

Pada tahun 2001 PDRB yang dihitung atas harga konstan tahun 1993 di Kecamatan Palaran sebanyak Rp 357.782,22 (dalam juta). Tahun 2002 PDRB sebanyak Rp 381.223.659,90 dan tahun 2003 sebanyak Rp 456.262.732,65.

PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2001 sebanyak Rp 839.205,20, kemudian pada tahun 2002 meningkat sebanyak Rp 925.422.808,83. Selanjutnya pada tahun 2003 terjadi peningkatan sebanyak Rp 1.030.135.738,30.

d) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita adalah Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk Kota Samarinda. Memperhatikan Lampiran Va, Vb, Vc dan VIa, VIb dan VIc.

Pada tahun 2001 PDRB harga konstan sebanyak Rp 3.079.665,84 (dalam juta), tahun 2002 sebanyak Rp 3.392.781,40 dan tahun 2003 sebanyak Rp 4.054.460.617,52. Untuk PDRB harga berlaku pada tahun 2001 sebanyak Rp 6.606.119,41, pada tahun 2002 sebanyak Rp 8.019.820.551,83 dan tahun 2003 sebanyak Rp 8.026.672.390,56

Untuk jumlah penduduk Kota Samarinda pada tahun 2001 sebanyak 529.767 jiwa, tahun 2002 sebanyak 539.726 jiwa dan tahun 2003 sebanyak 558.918 jiwa.

Dengan demikian pendapatan per kapita berdasarkan harga konstan tahun 2001 sebanyak Rp 5.813.246,00, pada tahun 2002 sebanyak Rp 6.286.119,00, dan pada tahun 2003 sebanyak Rp 7.254.124,00. Sedangkan pendapatan per kapita penduduk Kota Samarinda berdasarkan harga berlaku pada tahun 2001 sebanyak Rp 12.469.858,00 kemudian pada tahun 2002 sebanyak Rp 14.859.059,00 dan tahun 2003 sebanyak Rp 14.361.091,00.

e) Kesempatan Kerja

Di Kota Samarinda, penduduk yang bekerja sebagian besar diserap oleh sektor perdagangan, kemudian disusul oleh sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan. Dari Lampiran VIIa kesempatan

kerja penduduk menurut lapangan usaha pada tahun 2001 sebanyak 240.501 jiwa, pada tahun 2002 sebanyak 238.265 jiwa (Lampiran VIIb) dan pada tahun 2003 sebanyak 233.511 jiwa (Lampiran VIIc).

1) Kecamatan Samarinda Ilir

Dari Lampiran VIIa, VIIb dan VIIc, kesempatan kerja menurut lapangan usaha di Kecamatan Samarinda Ilir pada tahun 2001 sebanyak 68.247 jiwa di mana lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor perdagangan sebanyak 28.274 jiwa, kemudian sektor jasa-jasa sebanyak 22.713 jiwa, disusul sektor pengangkutan dan komunikasi sebanyak 6.134 jiwa.

Selanjutnya pada tahun 2002 sebanyak 67.549 jiwa dan lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor perdagangan sebanyak 28.164 jiwa, kemudian sektor jasa-jasa sebanyak 22.471 jiwa, disusul sektor pengangkutan dan komunikasi sebanyak 5.984 jiwa, dan pada tahun 2003 sebanyak 66.140 jiwa di mana lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor perdagangan sebanyak 27.752 jiwa, kemudian sektor jasa-jasa sebanyak 21.991 jiwa, disusul sektor pengangkutan dan komunikasi sebanyak 5.775 jiwa.

2) Kecamatan Samarinda Utara

Kesempatan kerja menurut lapangan usaha di Kecamatan Samarinda Utara pada tahun 2001 sebanyak 21.658 jiwa di mana lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor

pertanian sebanyak 10.443 jiwa, kemudian sektor perdagangan sebanyak 3.534 jiwa, disusul sektor jasa-jasa sebanyak 2.839 jiwa.

Selanjutnya pada tahun 2002 sebanyak 21.502 jiwa dan lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor pertanian sebanyak 10.369 jiwa, kemudian sektor perdagangan sebanyak 3.521 jiwa, disusul sektor jasa-jasa sebanyak 2.809 jiwa,, kemudian tahun 2003 sebanyak 21.120 jiwa di mana lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor pertanian sebanyak 10.184 jiwa, kemudian sektor perdagangan sebanyak 3.469 jiwa, disusul sektor jasa-jasa sebanyak 2.749 jiwa.

3) Kecamatan Samarinda Ulu

Kesempatan kerja menurut lapangan usaha di Kecamatan Samarinda Ulu pada tahun 2001 sebanyak 55.920 jiwa di mana lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor perdagangan sebanyak 21.205 jiwa, kemudian sektor jasa-jasa sebanyak 17.035 jiwa, disusul sektor pengangkutan komunikasi sebanyak 4.600 jiwa, selanjutnya pada tahun 2002 sebanyak 55.390 jiwa dan lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor perdagangan sebanyak 21.123 jiwa, kemudian sektor jasa-jasa sebanyak 16.853 jiwa, disusul sektor industri pengolahan sebanyak 4.545 jiwa.

Kemudian tahun 2003 sebanyak 54.275 jiwa di mana lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor perdagangan sebanyak 20.814 jiwa, kemudian sektor jasa-jasa

sebanyak 16.493 jiwa, disusul sektor industri pengolahan sebanyak 4.461 jiwa.

4) Kecamatan Sungai Kunjang

Kesempatan kerja menurut lapangan usaha di Kecamatan Sungai Kunjang pada tahun 2001 sebanyak 19.828 jiwa di mana lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor industri pengolahan sebanyak 11.451 jiwa, kemudian sektor pertanian sebanyak 2.611 jiwa, disusul sektor perdagangan sebanyak 2.121 jiwa, selanjutnya pada tahun 2002 sebanyak 19.656 jiwa dan lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor industri pengolahan sebanyak 11.363 jiwa, kemudian sektor perdagangan sebanyak 2.592 jiwa, disusul sektor perdagangan sebanyak 2.112 jiwa.

Kemudian tahun 2003 sebanyak 19.275 jiwa di mana lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor industri pengolahan sebanyak 11.154 jiwa, kemudian sektor pertanian sebanyak 2.546 jiwa, disusul sektor perdagangan sebanyak 2.080 jiwa.

5) Kecamatan Samarinda Seberang

Kesempatan kerja menurut lapangan usaha di Kecamatan Samarinda Seberang pada tahun 2001 sebanyak 20.635 jiwa di mana lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor perdagangan sebanyak 4.948 jiwa, kemudian sektor jasa-jasa sebanyak 3.975 jiwa, disusul sektor pertanian sebanyak 3.916 jiwa,

selanjutnya pada tahun 2002 sebanyak 20.429 jiwa dan lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor perdagangan sebanyak 4.929 jiwa, kemudian sektor jasa-jasa sebanyak 3.932 jiwa, disusul sektor pertanian sebanyak 3.888 jiwa.

Kemudian tahun 2003 sebanyak 20.009 jiwa di mana lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor perdagangan sebanyak 4.856 jiwa, kemudian sektor jasa-jasa sebanyak 3.848 jiwa, disusul sektor pertanian sebanyak 3.819 jiwa.

6) Kecamatan Palaran

Kesempatan kerja menurut lapangan usaha di Kecamatan Palaran pada tahun 2001 sebanyak 54.213 jiwa di mana lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor industri pengolahan sebanyak 22.903 jiwa, kemudian sektor perdagangan sebanyak 10.603 jiwa, disusul sektor jasa-jasa sebanyak 8.517 jiwa.

Selanjutnya pada tahun 2002 sebanyak 53.739 dan lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor industri pengolahan sebanyak 22.726 jiwa, kemudian sektor perdagangan sebanyak 10.562 jiwa, disusul sektor jasa-jasa sebanyak 8.427 jiwa.

Kemudian tahun 2003 sebanyak 52.692 jiwa di mana lapangan usaha yang terbesar menyerap tenaga kerja yaitu di sektor industri pengolahan sebanyak 22.307 jiwa, kemudian sektor perdagangan sebanyak 10.408 jiwa, disusul sektor jasa-jasa sebanyak 8.248 jiwa.

f) Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Karena dengan pendidikan yang baik orang memiliki tingkat wawasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik, sehingga ia lebih mampu melihat dan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk oeningkatan kesejahteraan hidupnya.

Indikator tingkat pendidikan penduduk atau sumber daya manusia (SDM) dapat diukur dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Dari Lampiran 8a, 8b dan 8c, dapat dilihat tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk kota Samarinda dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003. Pada tahun 2001 dari 452.014 jiwa penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi di kota Samarinda terdapat sebanyak 101.454 jiwa yang tidak / belum tamat, 105.652 jiwa penduduk yang tamat SD / MI, 93.011 jiwa telah menamatkan SLTP / MTs, kemudian sebanyak 115.566 jiwa yang menyelesaikan SMU / SMK / MA serta sebanyak 36.331 jiwa penduduk telah tamat perguruan tinggi.

Pada tahun 2002 dari 484.701 jiwa penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi di kota Samarinda terdapat sebanyak 105.456 jiwa yang tidak / belum tamat, 115.954 jiwa penduduk yang tamat SD / MI, 97.799 jiwa telah menamatkan SLTP / MTs, kemudian sebanyak 129.145 jiwa yang menyelesaikan SMU / SMK / MA serta sebanyak 36.347 jiwa penduduk telah tamat perguruan tinggi.

Kemudian pada tahun 2003 dari 513.583 jiwa penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi di kota Samarinda terdapat sebanyak 109.278 jiwa yang tidak / belum tamat, 124.322 jiwa penduduk yang tamat SD / MI, 99.825 jiwa telah menamatkan SLTP / MTs, kemudian sebanyak 139.770 jiwa yang menyelesaikan SMU / SMK / MA serta sebanyak 40.388 jiwa penduduk telah tamat perguruan tinggi.

1) Kecamatan Samarinda Ilir

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk Kecamatan Samarinda Ilir pada tahun 2001 sebanyak 75.399 jiwa (Lampiran VIIIa), kemudian pada tahun 2002 sebanyak 88.289 jiwa (Lampiran VIIIb) dan pada tahun 2003 sebanyak 83.173 jiwa (Lampiran VIIIc).

2) Kecamatan Samarinda Utara

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk Kecamatan Samarinda Utara pada tahun 2001 sebanyak 112.834 jiwa (Lampiran VIIIa), kemudian pada tahun 2002 sebanyak 122.118 jiwa (Lampiran VIIIb) dan pada tahun 2003 sebanyak 139.082 jiwa (Lampiran VIIIc).

3) Kecamatan Samarinda Ulu

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk Kecamatan Samarinda Ulu pada tahun 2001 sebanyak 90.489 jiwa (Lampiran VIIIa), kemudian pada tahun 2002 sebanyak 94.233 jiwa (Lampiran VIIIb) dan pada tahun 2003 sebanyak 99.904 jiwa (Lampiran VIIIc).

4) Kecamatan Sungai Kunjang

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk Kecamatan Sungai Kunjang pada tahun 2001 sebanyak 68.255 jiwa (Lampiran VIIIa), kemudian pada tahun 2002 sebanyak 73.623 jiwa (Lampiran VIIIb) dan pada tahun 2003 sebanyak 75.684 jiwa (Lampiran VIIIc).

5) Kecamatan Samarinda Seberang

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk Kecamatan Samarinda Seberang pada tahun 2001 sebanyak 73.852 jiwa (Lampiran VIIIa), kemudian pada tahun 2002 sebanyak 73.084 jiwa (Lampiran VIIIb) dan pada tahun 2003 sebanyak 81.446 jiwa (Lampiran VIIIc).

6) Kecamatan Palaran

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk Kecamatan Palaran pada tahun 2001 sebanyak 31.185 jiwa (Lampiran VIIIa), kemudian pada tahun 2002 sebanyak 33.354 jiwa (Lampiran VIIIb) dan pada tahun 2003 sebanyak 34.294 jiwa (Lampiran VIIIc).

g) Kesehatan

Penduduk kota Samarinda jika dilihat dari rata-rata usia harapan hidup pria dan wanita seperti pada Lampiran 8 yaitu pada tahun 2001 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 65 tahun dan wanita berusia rata-rata 69 tahun, selanjutnya pada tahun 2002 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 66 tahun dan wanita berusia rata-rata

69 tahun. Kemudian pada tahun 2003 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 67 tahun dan wanita berusia rata-rata 69 tahun. Dari data selama 3 tahun terakhir ini terlihat usia harapan hidup bagi pria relatif bertambah jika dibanding dengan wanita yang cenderung tetap. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran penduduk akan kesehatan lebih tinggi dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di kota Samarinda terus dikembangkan dan ditingkatkan.

1) Kecamatan Samarinda Ilir

Penduduk Kecamatan Samarinda Ilir jika dilihat dari rata-rata usia harapan hidup pria dan wanita seperti pada Lampiran 8 yaitu pada tahun 2001 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 65 tahun dan wanita berusia rata-rata 69 tahun, selanjutnya pada tahun 2002 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 65 tahun dan wanita berusia rata-rata 69 tahun. Kemudian pada tahun 2003 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 66 tahun dan wanita berusia rata-rata 69 tahun.

2) Kecamatan Samarinda Utara

Penduduk Kecamatan Samarinda Utara jika dilihat dari rata-rata usia harapan hidup pria dan wanita seperti pada Lampiran 9 yaitu pada tahun 2001 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 64 tahun dan wanita berusia rata-rata 69 tahun, selanjutnya pada tahun 2002 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 65 tahun dan wanita berusia rata-rata 69 tahun. Kemudian pada tahun 2003

rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 66 tahun dan wanita berusia rata-rata 69 tahun.

3) Kecamatan Samarinda Ulu

Penduduk Kecamatan Samarinda Ulu jika dilihat dari rata-rata usia harapan hidup pria dan wanita seperti pada Lampiran 8 yaitu pada tahun 2001 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 64 tahun dan wanita berusia rata-rata 68 tahun, selanjutnya pada tahun 2002 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 65 tahun dan wanita berusia rata-rata 68 tahun. Kemudian pada tahun 2003 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 67 tahun dan wanita berusia rata-rata 68 tahun.

4) Kecamatan Sungai Kunjang

Penduduk Kecamatan Sungai Kunjang jika dilihat dari rata-rata usia harapan hidup pria dan wanita seperti pada Lampiran 8 yaitu pada tahun 2001 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 65 tahun dan wanita berusia rata-rata 69 tahun, selanjutnya pada tahun 2002 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 66 tahun dan wanita berusia rata-rata 69 tahun. Kemudian pada tahun 2003 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 67 tahun dan wanita berusia rata-rata 69 tahun.

5) Kecamatan Samarinda Seberang

Penduduk Kecamatan Samarinda Seberang jika dilihat dari rata-rata usia harapan hidup pria dan wanita seperti pada Lampiran 8 yaitu pada tahun 2001 rata-rata usia harapan hidup bagi pria

adalah 65 tahun dan wanita berusia rata-rata 69 tahun, selanjutnya pada tahun 2002 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 66 tahun dan wanita berusia rata-rata 69 tahun. Kemudian pada tahun 2003 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 66 tahun dan wanita berusia rata-rata 69 tahun.

6) Kecamatan Palaran

Penduduk Kecamatan Palaran jika dilihat dari rata-rata usia harapan hidup pria dan wanita seperti pada Lampiran 8 yaitu pada tahun 2001 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 66 tahun dan wanita berusia rata-rata 70 tahun, selanjutnya pada tahun 2002 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 67 tahun dan wanita berusia rata-rata 69 tahun. Kemudian pada tahun 2003 rata-rata usia harapan hidup bagi pria adalah 68 tahun dan wanita berusia rata-rata 70 tahun.

5.2 Analisis dan Hasil Penelitian

5.2.1 Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*)

1. Pemeriksaan Asumsi yang Melandasi Analisis Jalur

a. Linieritas

Hasil pemeriksaan asumsi linieritas selengkapnya disajikan pada Lampiran XIII. Pendekatan yang digunakan merujuk pada konsep *parsimony*, yaitu bilamana seluruh model yang digunakan sebagai dasar pengujian signifikan atau nonsignifikan berarti model dikatakan linier. Spesifikasi model yang digunakan sebagai dasar

pengujian adalah model linier, kuadratik, kubik, *inverse*, *logarithmic*, *power*, *S*, *compound*, *growth* dan eksponensial. Hasil pemeriksaan asumsi linieritas untuk setiap hubungan antar variabel disajikan secara ringkas sebagai berikut.

Tabel 5.2
PENGUJIAN ASUMSI LINIERITAS

Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Pengujian ($\alpha = 0.05$)	Keputusan
Struktur Pendapatan	Struktur Belanja	Model linier signifikan	Linier
Struktur Pendapatan	Kemandirian Wilayah	Semua model nonsignifikan	Linier
Struktur Belanja	Kemandirian Wilayah	Semua model nonsignifikan	Linier
Struktur Belanja	Perkembangan SOSEK	Semua model nonsignifikan	Linier
Kemandirian Wilayah	Perkembangan SOSEK	Semua model signifikan	Linier

Berdasarkan Tabel 5.1 didapatkan bahwa semua bentuk hubungan antar variabel yang terdapat di dalam model struktural adalah linier. Dengan demikian asumsi linieritas pada Analisis Jalur terpenuhi.

b. Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran causal ke satu arah

Sesuai dengan kerangka konseptual Gambar 3.2 dan hipotesis penelitian, maka model struktural di dalam penelitian ini tidak mengandung jenis hubungan resiprokal (pengaruh timbal balik). Dengan kata lain, model struktural di dalam penelitian ini adalah model kausal satu arah, sehingga asumsi model rekursif terpenuhi.

c. Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval

Semua variable di dalam penelitian ini adalah variable laten, sehingga sebelum dilakukan analisis path, terlebih dahulu dilakukan analisis faktor pada Lampiran X untuk mendapatkan data dari variable laten tersebut. Data variable laten hasil analisis faktor adalah berupa skor faktor, di mana data ini berskala interval dan berdistribusi normal standart. Sehingga asumsi variable endogen berskala interval terpenuhi.

d. Observed variables diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan reliabel)

Di dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif, hasil pengukuran dan bukan data kualitatif berdasarkan persepsi. Di samping itu, data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari dinas pendapatan, sehingga data dianggap valid. Dengan demikian asumsi ini tidak bersifat kritis dan dapat terpenuhi.

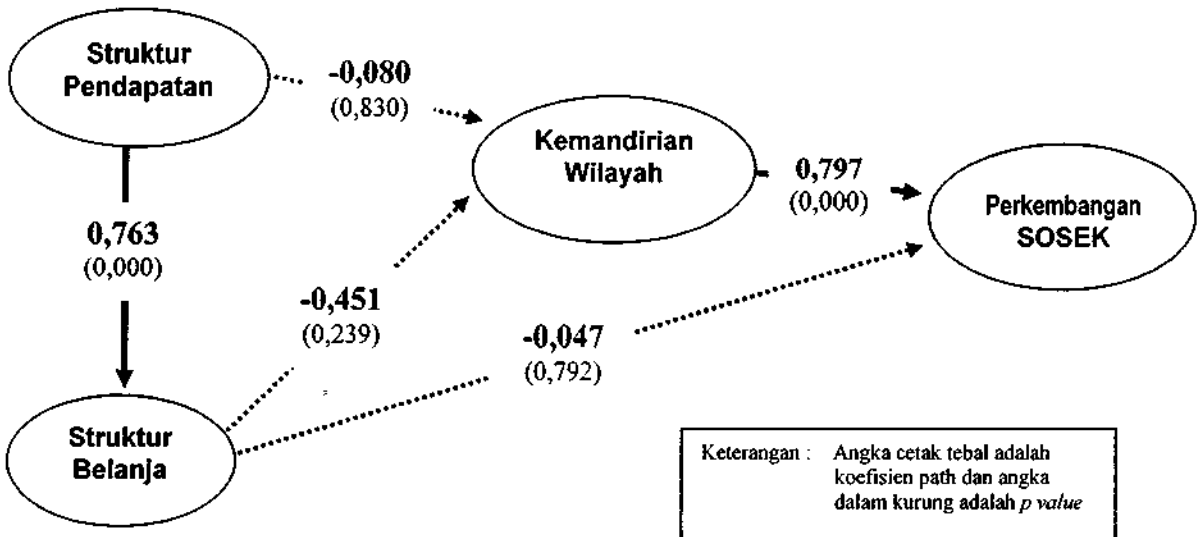
e. Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan

Perancangan model di dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka konseptual penelitian. Sehingga asumsi ini dapat dipastikan terpenuhi.

2. Model Struktural Pengaruh Struktur Pendapatan dan Belanja Terhadap Kemandirian Wilayah dan Perkembangan Sosial Ekonomi

Analisis Model Struktural Pengaruh Struktur Pendapatan dan Belanja Terhadap Kemandirian Wilayah dan Perkembangan

Sosial Ekonomi dilakukan dengan Analisis Path, secara lengkap disajikan pada Lampiran XIII. Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan cara melihat jalur-jalur pada model struktural yang signifikan. Untuk mengetahui jalur-jalur hubungan (pengaruh) yang signifikan dapat dilihat pada uji koefisien path secara parsial, menggunakan uji t (*t test*). Hasil uji secara parsial terhadap koefisien path pada setiap jalur dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut.



Gambar 5.1 MODEL STRUKTURAL HASIL ANALISIS PATH

Berdasarkan hasil analisis path seperti pada Gambar 5.1, diperoleh hasil pengujian hipotesis seperti pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.3
PENGUJIAN HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis	Variabel Independen	Variabel Dependen	Koefisien Path (<i>p value</i>)	Keterangan
H-1	Struktur Pendapatan	Struktur Belanja	0,763 (0,000)*	<i>signifikan</i>
H-2	Struktur Pendapatan	Kemandirian Wilayah	-0,080 (0,830)	<i>non signifikan</i>
H-3	Struktur Belanja	Kemandirian Wilayah	-0,451 (0,139)	<i>non signifikan</i>
H-4	Struktur Belanja	Perkembangan SOSEK	-0,047 (0,792)	<i>non signifikan</i>
H-5	Kemandirian Wilayah	Perkembangan SOSEK	0,797 (0,000)*	<i>signifikan</i>
Keterangan :		* = <i>signifikan</i> pada $\alpha = 0,05$ (5%)		

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 5.2, diperoleh bahwa pengaruh Struktur Pendapatan terhadap Struktur Belanja adalah signifikan. Di mana pengaruh tersebut positif dengan koefisien path = 0,763, berarti semakin besar Struktur Pendapatan semakin tinggi juga struktur belanjanya. Pengaruh Struktur Belanja terhadap kemandirian wilayah adalah non signifikan, namun demikian ada kecenderungan pengaruhnya negatif dengan koefisien path = -0,451. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar Struktur Belanja, mengakibatkan kemandirian wilayah semakin kurang. Pengaruh kemandirian wilayah terhadap perkembangan kegiatan sosial ekonomi adalah signifikan dengan koefisien path = 0,797. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian wilayah, semakin tinggi pula tingkat perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

5.2.2 Hasil Analisis Deskriptif

Berdasarkan struktur pendapatan dan belanja daerah di mana :

1. Struktur Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah terdiri dari bagian pendapatan dan pembiayaan. Pada bagian pendapatan terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Bagian Laba Badan Usaha Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Secara keseluruhan, Pendapataan Asli Daerah pada tahun 2001 sebanyak Rp 29.977.874.986,00 pada tahun 2002 Rp 45.507.021.903,00 kemudian pada tahun 2003 sebanyak Rp 55.188.761.708,89.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil dari Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Bantuan serta Subsidi Pembangunan di mana penerimaan pada tahun 2001 Pemerintah Kota Samarinda memperoleh dana perimbangan sebanyak Rp 46.090.116.505,00 kemudian pada tahun 2002 sebanyak Rp 34.715.632.988,28, dan pada tahun 2003 Rp 66.869.508.347,45

Sedangkan yang bersumber Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan, Pajak Penghasilan, Penerimaan dari Sektor Kehutanan, Sektor Pertambangan, Sektor Perikanan, Sektor Minyak Bumi, sektor Gas Alam dan Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus dengan penerimaan tahun 2001 sebanyak Rp 385.065.990.422,98, kemudian pada tahun 2002 sebanyak Rp 434.326.451.519,71 dan pada tahun 2003 sebanyak Rp 502.234.633.128,12.

Secara keseluruhan Dana Perimbangan pada tahun 2001 sebanyak Rp 431.156.106.927,98, kemudian tahun 2002 sebanyak Rp 469.042.084.507,99 dan selanjutnya pada tahun 2003 sebanyak Rp 569.104.141.475,57.

c. Pembiayaan

Pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan serta urusan kas dan perhitungan. Penerimaan pada tahun 2001 sebanyak Rp 33.506.824.869,00 kemudian pada tahun 2002 sebanyak Rp 106.039.705.003,96 dan selanjutnya pada tahun 2003 sebanyak Rp 107.765.609.595,52

Jadi secara keseluruhan struktur pendapatan daerah pada tahun 2001 adalah sebanyak Rp 461.133.981.913,98, tahun 2002 sebanyak Rp 514.549.106.410,99 dan pada tahun 2003 sebanyak Rp 624.292.903.184,46. Perincian atas struktur pendapatan daerah tersebut dapat dilihat pada Lampiran IIa, IIb dan IIc.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Data PDRB tahun 2001, 2002 dan 2003 sebagaimana dijelaskan Lampiran Va, Vb, Vc untuk harga konstan dan Lampiran VIa, VIb, VIc untuk harga berlaku.

Untuk mengetahui di mana tingkat keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam mewujudkan kemandirian wilayah dapat diketahui melalui dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbanding dengan APBD, PAD berbanding PDRB dan APBD berbanding PDRB dengan standardisasi posisi otonomi dalam menuju kemandirian wilayah yang dikemukakan oleh Zadjuli (2002) dalam Bulletin Restrukturisasi Pembangunan Ekonomi Dalam Era Reformasi, seperti yang terlihat pada Tabel 1.2 halaman 13.

Mencermati data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik harga konstan maupun harga berlaku dalam Lampiran IIa, IIb, IIc dan Va, Vb, Vc serta VIa, VIb, VIc dapat dianalisis sebagai berikut :

a) PAD / APBD

Tahun 2001	=	$\frac{29.977.874.986,00}{494.640.806.782,98}$	x 100 % = 6,06 %
Tahun 2002	=	$\frac{45.507.021.903,00}{620.588.811.414,95}$	x 100 % = 7,33 %
Tahun 2003	=	$\frac{55.188.761.708,89}{732.058.512.799,98}$	x 100 % = 7,54 %

b) PAD / PDRB (harga konstan 1993)

$$\text{Tahun 2001} = \frac{29.977.874.986,00}{3.079.665.840.000,00} \times 100 \% = 0,97 \%$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{45.507.021.903,00}{3.392.781.877.400,00} \times 100 \% = 1,34 \%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{55.188.761.708,89}{4.054.460.617.520,00} \times 100 \% = 1,36 \%$$

c) PAD / PDRB (harga berlaku)

$$\text{Tahun 2001} = \frac{29.977.874.986,00}{6.606.119.410.000,00} \times 100 \% = 0,45 \%$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{45.507.021.903,00}{8.019.820.551.830,00} \times 100 \% = 0,57 \%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{55.188.761.708,89}{8.026.672.390.560,00} \times 100 \% = 0,69 \%$$

d) APBD / PDRB (harga konstan 1993)

$$\text{Tahun 2001} = \frac{494.640.806.782,98}{3.079.665.840.000,00} \times 100 \% = 16,06 \%$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{620.588.811.414,95}{3.392.781.877.400,00} \times 100 \% = 18,29 \%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{732.058.512.799,98}{4.054.460.617.520,00} \times 100 \% = 18,06 \%$$

e) APBD / PDRB (harga berlaku)

$$\text{Tahun 2001} = \frac{494.640.806.782,98}{6.606.119.410.000,00} \times 100 \% = 7,49 \%$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{620.588.811.414,95}{8.019.820.551.830,00} \times 100 \% = 7,74 \%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{732.058.512.799,98}{8.026.672.390.560,00} \times 100 \% = 9,12 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, untuk mudahnya dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.4
KEMANDIRIAN WILAYAH

TAHUN	Indikator Kemandirian Wilayah (%)				
	PAD/APBD	APBD/PDRB Harga Konstan	APBD/PDRB Harga Berlaku	PAD/PDRB Harga Konstan	PAD/PDRB Harga Berlaku
2001	6,06	16,06	7,49	0,97	0,45
2002	7,33	18,29	7,74	1,34	0,57
2003	7,54	18,06	9,12	1,36	0,69
Rata 2	6,98	17,47	8,17	1,22	0,57

Hasil perhitungan pada Tabel tersebut, dibahas pada Bab 6 Pembahasan Sub Bab 6.2 Analisis Kemandirian Wilayah.

BAB 6

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian, dilakukan dengan dua cara pembahasan, untuk pengujian hipotesis penelitian kuantitatif dengan menggunakan Analisis Jalur (*Path Analysis*) dan penelitian kualitatif posisi tingkat kemandirian wilayah dengan menggunakan Analisis Deskriptif yang dilakukan pembahasan sebagai berikut :

6.1 Pengaruh Struktur Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Terhadap Kemandirian Wilayah dan Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda

1. Hipotesis Kesatu

“Struktur Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dari Provinsi dan Pusat berpengaruh terhadap Struktur Belanja Rutin dan Pembangunan yang terdiri dari Pembangunan Kepentingan Sosial / *Social Overhead Capital* (SOC) dan Pembangunan Menghasilkan Pendapatan / *Directly Productivity Investment* (DPI) Kota Samarinda”.

Dari hipotesis tersebut terdapat pengaruh signifikan struktur pendapatan terhadap Struktur Belanja. Dengan koefisien path = 0,763 dan $p = 0,000$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Struktur Pendapatan semakin tinggi pula Struktur Belanja.

Dengan demikian hipotesis penelitian kesatu adalah signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan digunakan untuk Anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda. Sedianya dalam penyusunan APBD dapat dimasukkan sebagai pendapatan untuk Cadangan Anggaran Pembangunan yang dialokasikan pada Bank yang bisa mendapatkan hasil jasa giro dan deposito mobile dan juga dapat digunakan sebagai dana cadangan untuk mengatasi hal-hal yang bersifat darurat di daerah, baik pada tahun berjalan maupun pada awal tahun anggaran di mana sumber dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Daerah ditransfer setiap triwulan bahkan terjadinya keterlambatan dari yang telah ditetapkan.

Hal ini didukung pendapat "daerah perlu menggali sumber penerimaan rupiah yang lebih banyak apabila ia ingin mempertahankan otonomi daerah. Kunci dari otonomi terletak pada kemampuan dan kedewasaan dalam pembuatan keputusan dan penggalan sumber pembelanjaan dalam rupiah". (Salim, 1976 : 26) dan pendapat "Data empiris menyajikan pola sumber penerimaan pada 277 Dati II (tidak termasuk DKI dan Timor Timur). Hal ini menunjukkan ketergantungan yang lebih besar lagi pada sumbangan dari atas, dibandingkan dengan Provinsi 73 % dari anggaran rutin dan 87 % dari anggaran pembangunan berasal dari Pemerintah Pusat. Dari penerimaan Dati II secara keseluruhan, sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri menyumbang 10 % dan penerimaan yang diarahkan 6 %, dibandingkan dengan 82 % yang berasal dari bantuan dan 2 % dari pinjaman" (Devas, 1989 : 26)

2. Hipotesis Kedua

"Struktur Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dari Provinsi dan Pusat berpengaruh terhadap

Kemandirian Wilayah Kota Samarinda yang diukur berdasarkan PAD/APBD, APBD/PDRB dan PAD/PDRB”.

Dari hipotesis tersebut ternyata Struktur Penerimaan berpengaruh non signifikan terhadap Kemandirian Wilayah. Dengan koefisien path = -0,080 dan $p = 0,830$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %). Dengan demikian hipotesis penelitian kedua adalah non signifikan. Hal ini konsisten dengan hasil pengujian hipotesis satu, yang mengindikasikan adanya keterbatasan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan kepada daerah jika dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh Kota Samarinda.

Dari *statement* tersebut didukung pula oleh pendapat

“Dengan tuntutan semangat reformasi, terutama setelah pelaksanaan Sidang Istimewa MPR 1999, maka dirasakan penyelenggaraan otonomi daerah dan pembagian sumber daya alam sangat memotivasi aspirasi daerah. Satu diantara tuntutan reformasi adalah adanya keadilan dalam bidang ekonomi, khususnya sumber daya alam yang ada di daerah setempat dikembalikan secara proporsional bagi masyarakat di daerah. Kurangnya rasa keadilan ini memicu munculnya ketidakpuasan daerah yang dalam beberapa hal menjurus menjadi tuntutan untuk diberikan otonomi penuh bahkan timbul beberapa keinginan daerah untuk membentuk negara federasi dan menjadi tuntutan untuk memisahkan diri dari negara Kesatuan RI. Daerah merasakan setelah lima puluh tahun Indonesia merdeka, otonomi bagi daerah masih sangat terbatas. Sentralisasi yang terjadi semakin kuat, sehingga menimbulkan kesenjangan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dampak yang lebih berkembang di daerah adalah perasaan bahwa daerah hanya menjadi obyek pemerasan pusat atau dalam kata lain membangun di daerah bukan membangun daerah” (Swasono, 2001 : 4).

3. Hipotesis Ketiga

“Struktur Belanja Rutin dan Pembangunan yang terdiri dari Pembangunan Kepentingan Sosial / *Social Overhead Capital* (SOC) dan Pembangunan Menghasilkan Pendapatan / *Directly Productivity Investment* (DPI) Kota Samarinda berpengaruh terhadap Kemandirian Wilayah Kota Samarinda yang diukur berdasarkan PAD/APBD, APBD/PDRB dan PAD/PDRB”.

Pengaruh Struktur Belanja terhadap kemandirian wilayah adalah non signifikan. Dengan koefisien path = -0,451 dan $p = 0,239$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %). Dengan demikian hipotesis ketiga adalah non signifikan. Satu diantaranya disebabkan oleh banyaknya dana yang diprogramkan dan dilaksanakan untuk kepentingan belanja *Social Overhead Capital* (SOC) di mana dana tersebut dalam jangka pendek relatif tidak menghasilkan pendapatan, walaupun dalam jangka panjang ada program yang bisa menghasilkan pendapatan.

Seyogyanya dana tersebut lebih banyak diarahkan untuk kepentingan *Directly Productivity Investment* (DPI) seperti pembangunan pasar, sebab dapat menghasilkan pendapatan daerah dalam jangka pendek yang pada akhirnya dapat mendukung APBD Kota Samarinda.

Hal ini didukung oleh pendapat :

“Keleluasaan Daerah untuk memanfaatkan sumber keuangannya sendiri tercermin dari keleluasaan untuk menetapkan jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang potensial di Daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Khusus untuk pengaturan lebih lanjut mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang penting bagi masyarakat kota ialah bahwa penyaluran dana haruslah didasarkan pada pemanfaatan perhitungan / analisa manfaat

dan biaya sosial (social benefit-cost analysis) yang konsekuen. Proyek-proyek Pemerintah Kota yang memang tak dapat dipertanggungjawabkan, lebih baik tidak dilaksanakan. Harus diingat bahwa sumber dana kota itu jelas terbatas. Proyek-proyek yang biasanya berupa pelayanan umum, seperti penanggulangan urbanisasi, lingkungan, kemiskinan, kejahatan, kesehatan dan pendidikan berorientasi sosial yang mungkin tidak atau sukar memperhitungkan manfaat dan biaya sosial dan diputuskan, karena itu tidak harus dilaksanakan tanpa melihat segi ekonominya. Konsekuensinya proyek menjadi mahal sekali dan hanya sebagian saja yang dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana” (Reksohadiprodjo, 1993 : 140).

4. Hipotesis Keempat

“Struktur Belanja Rutin dan Pembangunan yang terdiri dari Pembangunan Kepentingan Sosial / *Social Overhead Capital* (SOC) dan Pembangunan Menghasilkan Pendapatan / *Directly Productivity Investment* (DPI) Kota Samarinda berpengaruh terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Per Kapita, Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan”.

Struktur Belanja berpengaruh non signifikan terhadap perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda. Dengan koefisien path = -0.047 dan $p = 0,792$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %). Dengan demikian hipotesis keempat adalah non signifikan.

Belanja pembangunan relatif kurang melibatkan keterkaitan dalam komponen masyarakat yang dikenal dengan segitiga yang tidak dapat dipisahkan antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah. Dalam program sosial pun sebaiknya diarahkan pada istilah lebih baik memberi

pancing dibandingkan memberi ikan. Untuk keberlanjutan perkembangan kegiatan sosial ekonomi.

Hal ini ditegaskan oleh “Pola pembangunan *community base development* ialah pola pembangunan yang berlandaskan kepada kompetisi masyarakat itu sendiri. Konsep awalnya adalah kesepakatan bahwa tak ada satupun entitas yang bisa sama persis di muka bumi ini. Begitu juga dengan kondisi alam masyarakat. Setiap daerah, di mana pun di muka bumi, memiliki potensi yang berbeda-beda. Berdasarkan perbedaan potensi inilah muncul kebutuhan yang beragam. Artinya, pembangunan yang dibutuhkan juga harus disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan di dalam masyarakat. Inilah yang disebut *community based development* (pembangunan masyarakat). Pelaksanaan pembangunan di segala bidang sebenarnya dapat menerapkan prinsip pembangunan yang mendasar (Based Development). Yakni, bagaimana pembangunan serta tujuan utama pembangunan itu tumbuh dari masyarakat dan dilakukan demi masyarakat sendiri. Pembangunan yang mengacu kepada kekuatan masyarakat berjalan secara paralel dengan konsep pembangunan demi kesejahteraan masyarakat” (Soedarsono, 2000 : 30-31).

5. Hipotesis Kelima

“Kemandirian Wilayah yang diukur berdasarkan PAD/APBD, APBD/PDRB dan PAD/PDRB berpengaruh terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Kota Samarinda yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Per Kapita, Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan”.

Kemandirian wilayah berpengaruh Signifikan dan negatif terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda. Dengan koefisien path = 0,797 dan $p = 0,000$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %). Dengan demikian hipotesis kelima adalah signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian wilayah berdampak pada

perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda. Perlu diketahui bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Samarinda tidak saja dilakukan oleh Pemerintah tapi juga dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta yang dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda.

Sebagaimana “Dalam menghitung Pendapatan Nasional, dapat digunakan tiga macam metode, yaitu (1) metode produksi (*production approach*) adalah total output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dengan formulasi $NT = NO - NI$ di mana $NT =$ Nilai Tambah, $NO =$ Nilai Produksi dan $NI =$ Nilai Input Antara; (2) metode pendapatan (*income approach*) adalah nilai total balas jasa atas produksi yang digunakan dalam proses produksi dengan formulasi $Q = f(L, K, U, E)$ di mana $Q =$ Output, $L =$ Tenaga Kerja, $K =$ Barang Modal, $U =$ Uang / Financial dan $E =$ kemampuan *entrepreneur* atau kewirausahaan; (3) metode pengeluaran (*expenditure approach*) adalah total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu dengan formulasi $PDB = C + G + I + (X - M)$ di mana $C =$ Konsumsi Rumah Tangga, $G =$ Konsumsi Pemerintah, $I =$ Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, $X =$ Ekspor dan $M =$ Impor. Secara teoritis, ketiga metode pendekatan tersebut dalam perhitungan saling melengkapi” (Rahardja, 2001 : 25-33).

6.2 Analisis Kemandirian Wilayah

Dengan merujuk standarisasi posisi otonomi dalam menuju kemandirian wilayah yang dikemukakan oleh Zadjuli (2002, 2004 dan 2005) dalam Restrukturisasi Pembangunan Ekonomi Dalam Era Reformasi, sebagaimana telah disebutkan pada Tabel 1.2 halaman 13.

Setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dijabarkan dalam Bab 5, dan dikompilasi pada Tabel 5.3 halaman 148 dibahas sebagai berikut :

Pada tahun 2001, kondisi nyata yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda, PAD/APBD 6,06 % dan tahun 2002 sebesar 7,33 % serta tahun

2003 sebesar 7,54 % atau rata-rata dalam kurun waktu 3 tahun 6,98 %. Dengan membandingkan standardisasi posisi otonomi dalam menuju kemandirian wilayah, maka Kota Samarinda selama pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 sampai dengan 2003 masih dalam posisi *otonomi konsolidasi*, karena PAD/APBD belum mencapai 15 %.

Posisi otonomi dalam menuju kemandirian wilayah apabila ditinjau dari PAD/PDRB harga konstan, pada tahun 2001 sebesar 0,97 %, tahun 2002 sebesar 1,34 % dan tahun 2003 sebesar 1,36 % atau rata-rata 1,22 %. Melihat angka tersebut dapat dikategorikan Samarinda masuk dalam posisi *Otonomi Rendah*. Akan tetapi jika dilihat dari PAD/PDRB harga berlaku pada tahun 2001 sebesar 0,45 %, tahun 2002 sebesar 0,57 % dan tahun 2003 sebesar 0,96 %, atau rata-rata dalam kurun waktu 3 tahun sebesar 0,57 %, maka otonomi dalam menuju kemandirian wilayah masih mencapai posisi *otonomi konsolidasi* karena < 5 %.

Kemudian APBD/PDRB harga konstan, tahun 2001 sebesar 16,06 %, tahun 2002 sebesar 18,29 % dan 2003 sebesar 18,06 % dan rata-rata sebesar 17,47 %, dapat dikatakan pada posisi *otonomi tinggi*, karena telah mencapai > 15 %. Namun dengan memperhatikan APBD/PDRB harga berlaku tahun 2001 sebesar 7,49 %, tahun 2002 sebesar 7,74 % dan 2003 sebesar 9,12 %, atau rata-rata 8,17 %, termasuk dalam posisi *otonomi rendah*, karena masih belum mencapai 10 % - 15 %.

Secara keseluruhan dari hasil pembahasan tersebut diatas, PAD/APBD rata-rata dalam kurun waktu 3 tahun 6,98 %. masih dalam posisi *otonomi konsolidasi*, karena PAD/APBD belum mencapai 15 %. Hal ini disebabkan

pembagian kewenangan atas pendapatan daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, selain dibatasi obyek pungutan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kecilnya potensi yang memungkinkan untuk diperoleh.

PAD/PDRB harga konstan rata-rata dalam kurun waktu 3 tahun 1,22 %. Melihat angka tersebut dapat dikategorikan Samarinda masuk dalam posisi *Otonomi Rendah*. Akan tetapi jika dilihat dari PAD/PDRB harga berlaku pada kurun waktu 3 tahun rata-rata sebesar 0,57 %, maka otonomi dalam menuju kemandirian wilayah belum mencapai posisi *otonomi konsolidasi* karena masih < 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Samarinda terjadi tingkat inflasi relatif tinggi sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak dapat mengimbangi kondisi inflasi tersebut.

APBD/PDRB harga konstan dalam kurun waktu 3 tahun rata-rata sebesar 17,47 %, dapat dikatakan pada posisi *otonomi tinggi*, karena telah mencapai > 15 %. Namun dengan memperhatikan APBD/PDRB harga berlaku dalam kurun waktu 3 tahun rata-rata 8,17 %, termasuk dalam posisi *otonomi rendah*, karena masih belum mencapai 10 % - 15 %. Kondisi tersebut juga memperlihatkan inflasi yang cukup tinggi sehingga kemampuan APBD tidak dapat mengimbangi laju Produk Domestik Regional Bruto.

Dengan demikian rumusan masalah keenam yang berbunyi apakah Otonomi Daerah merubah standarisasi posisi otonomi dari konsolidasi ke

otonomi rendah, sedang atau tinggi, dengan standardisasi yang ditetapkan dapat dinyatakan PAD/APBD mencapai posisi konsolidasi, PAD/PDRB harga konstan Otonomi Rendah dan PAD/PDRB harga berlaku posisi konsolidasi serta APBD/PDRB harga konstan Otonomi Rendah dan APBD/PDRB harga berlaku posisi Otonomi Rendah.

Otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 diharapkan mampu meningkatkan kemandirian wilayah. Namun demikian dalam implementasinya menemui beberapa kendala, salah satunya seperti

“Penyerahan urusan kepada Daerah, kadang kala tidak disertai penyerahan kewenangan, sumber dana dan sumber daya manusia, sehingga dalam kenyataannya Daerah tidak bisa berbuat apa-apa, karena masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut dirasakan oleh daerah sebagai suatu ketidakadilan, sehingga menimbulkan berbagai tuntutan yang disampaikan dengan berbagai cara, yang pada puncaknya melahirkan tuntutan Reformasi, yang bergema di seluruh pelosok tanah air”. (Abdullah, 2000 : 73-74)

Di sisi lain, sumberdaya di Samarinda memberikan peluang pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan, berimplikasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2001 sebanyak Rp 29.977.874.986,00, tahun 2002 mengalami kenaikan menjadi Rp 45.507.021.903,00, kemudian tahun 2003 juga terjadi kenaikan sebanyak Rp 55.188.761.708,89.

Namun demikian terdapat ketidakseimbangan antara porsi PAD dengan APBD. Kondisi riil di Samarinda APBD pada tahun 2001 sebanyak Rp 494.640.806.782,98 dan mengalami kenaikan pada tahun 2002 menjadi Rp 620.588.811.414,95 serta juga mengalami kenaikan pada tahun 2003 menjadi Rp 732.058.512.799,98.

6.3 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga tingkat validitas data sangat ditentukan oleh sumber data berupa dokumentasi. Peneliti hanya bisa melakukan triangulasi secara terbatas dengan melakukan *cross check* berupa observasi pada kecamatan se Kota Samarinda.
2. Terdapat interkoneksi antar kota, kabupaten dan provinsi dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap Kota Samarinda. Di dalam penelitian ini, interkoneksi tersebut tidak dapat dibatasi dan diukur.
3. Dalam aktivitas ekonomi di Kota Samarinda yang diukur adalah keuangan Pemerintah Kota dan pengaruhnya terhadap kemandirian wilayah dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Realitanya faktor-faktor konsumsi, investasi dan ekspor impor yang dapat membentuk Produk Domestik Regional Bruto tidak dimasukkan dalam perhitungan.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Analisis Hasil Penelitian yang dikemukakan pada Bab 5 dan Pembahasan yang diuraikan pada Bab 6 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

7.1 Kesimpulan

1. Struktur Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dari Provinsi dan Pusat berpengaruh terhadap Struktur Belanja Rutin dan Pembangunan yang terdiri dari Pembangunan Kepentingan Sosial / *Social Overhead Capital* (SOC) dan Pembangunan Menghasilkan Pendapatan/ *Directly Productivity Investment* (DPI) Kota Samarinda. Dari hipotesis tersebut terdapat pengaruh signifikan struktur pendapatan terhadap Struktur Belanja, dengan koefisien path = 0,763 dan $p = 0,000$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Struktur Pendapatan semakin tinggi pula Struktur Belanja. Dengan demikian hipotesis penelitian kesatu adalah signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan digunakan untuk Anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda.
2. Struktur Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dari Provinsi dan Pusat berpengaruh terhadap Kemandirian Wilayah Kota Samarinda yang diukur berdasarkan PAD/APBD, APBD/PDRB dan PAD/PDRB. Dari hipotesis tersebut ternyata Struktur Pendapatan berpengaruh non signifikan terhadap

Kemandirian Wilayah, dengan koefisien path = -0,080 dan $p = 0,830$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %). Dengan demikian hipotesis penelitian kedua adalah non signifikan. Hal ini konsisten dengan hasil pengujian hipotesis kesatu, yang mengindikasikan adanya keterbatasan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan kepada daerah jika dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh Kota Samarinda.

3. Struktur Belanja Rutin dan Pembangunan yang terdiri dari Pembangunan Kepentingan Sosial / *Social Overhead Capital* (SOC) dan Pembangunan Menghasilkan Pendapatan / *Directly Productivity Investment* (DPI) Kota Samarinda berpengaruh terhadap Kemandirian Wilayah Kota Samarinda yang diukur berdasarkan PAD/APBD, APBD/PDRB dan PAD/PDRB. Pengaruh Struktur Belanja terhadap kemandirian wilayah adalah non signifikan, dengan koefisien path = -0,451 dan $p = 0,239$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %). Dengan demikian hipotesis ketiga adalah non signifikan . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan semakin besar Struktur Belanja semakin berkurang kemandirian wilayah. Satu diantaranya disebabkan oleh banyaknya dana yang diprogramkan dan dilaksanakan untuk kepentingan belanja *Social Overhead Capital* (SOC) di mana dana tersebut dalam jangka pendek relatif tidak menghasilkan pendapatan, walaupun dalam jangka panjang ada program yang dapat menghasilkan pendapatan.

4. Struktur Belanja Rutin dan Pembangunan yang terdiri dari Pembangunan Kepentingan Sosial / *Social Overhead Capital* (SOC) dan Pembangunan Menghasilkan Pendapatan / *Directly Productivity Investment* (DPI) Kota Samarinda berpengaruh terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Per Kapita, Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan. Struktur Belanja berpengaruh non signifikan terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda, dengan koefisien path = -0,047 dan $p = 0,792$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %). Dengan demikian hipotesis keempat adalah non signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembangunan di segala bidang sebenarnya dapat menerapkan prinsip pembangunan yang mendasar (*Based Development*). Yakni, bagaimana pembangunan serta tujuan utama pembangunan itu tumbuh dari masyarakat dan dilakukan demi masyarakat sendiri.
5. Kemandirian Wilayah yang diukur berdasarkan PAD/APBD, APBD/PDRB dan PAD/PDRB berpengaruh terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Kota Samarinda yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Per Kapita, Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan. Kemandirian Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Kegiatan Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda, dengan koefisien path = 0,797 dan $p = 0,000$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %). Dengan demikian hipotesis kelima adalah signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat

Kemandirian Wilayah berdampak pada Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda. Dalam pelaksanaannya terdapat tiga komponen *stage holder* dan dikenal dengan segitiga pelaku pembangunan yang tidak dapat dipisahkan antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah.

6. PAD/APBD rata-rata dalam kurun waktu 3 tahun 6,98 % masih dalam posisi *otonomi konsolidasi*, karena PAD/APBD belum mencapai 15 %. PAD/PDRB harga konstan rata-rata dalam kurun waktu 3 tahun 1,22 %. Melihat angka tersebut dapat dikategorikan Samarinda masuk dalam posisi *Otonomi Rendah*. Akan tetapi jika dilihat dari PAD/PDRB harga berlaku pada kurun waktu 3 tahun rata-rata sebesar 0,57 %, maka otonomi dalam menuju kemandirian wilayah belum mencapai posisi *otonomi konsolidasi* karena masih < 5 %. APBD/PDRB harga konstan dalam kurun waktu 3 tahun rata-rata sebesar 17,47 %, dapat dikatakan pada posisi *otonomi tinggi*, karena telah mencapai > 15 %. Namun dengan memperhatikan APBD/PDRB harga berlaku dalam kurun waktu 3 tahun rata-rata 8,17 %, termasuk dalam posisi *otonomi rendah*, karena masih belum mencapai 10 % - 15 %. Dengan demikian rumusan masalah keenam yang berbunyi apakah Otonomi Daerah merubah standarisasi posisi otonomi dari konsolidasi ke otonomi rendah, sedang atau tinggi, dengan standarisasi yang ditetapkan dapat dinyatakan PAD/APBD mencapai posisi konsolidasi, PAD/PDRB harga konstan Otonomi Rendah dan PAD/PDRB harga berlaku posisi konsolidasi serta

APBD/PDRB harga konstan Otonomi Rendah dan APBD/PDRB harga berlaku posisi Otonomi Rendah.

7. Alokasi Belanja Publik Pemerintah Kota Samarinda masih didominasi oleh pengeluaran jenis SOC, sehingga pengaruh keterkaitan ke depan dan ke belakang dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kota masih kecil.
8. Model Pembangunan IBRD yang membedakan jenis pengeluaran Pembangunan Pemerintah dalam bentuk SOC yang makin menurun dan diikuti oleh makin meningkatnya DPI belum dilaksanakan secara penuh di Kota Samarinda.
9. Berdasarkan kedelapan kesimpulan tersebut dapat disusun kesimpulan umum bahwa pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan penggalan dana Pendapatan Asli Daerah belum dapat dilakukan secara optimal karena adanya keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan ketergantungan terhadap dana perimbangan cukup tinggi. Arah penggunaan dana lebih banyak pada *Sosial Overhead Capital (SOC)* dibandingkan dengan *Directly Productivity Investment (DPI)*. Di sisi lain, terdapat pelaksanaan belanja untuk pembangunan yang dilakukan di Samarinda dalam jangka pendek relatif belum mengacu pada *Based Development*. Meningkatnya Kemandirian Wilayah terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi, dalam pelaksanaannya terdapat tiga komponen *stage holder* dan dikenal dengan segitiga pelaku pembangunan yang tidak dapat dipisahkan antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah.

7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka di saran sebagai berikut :

1. Dalam Penyusunan APBD, dapat dialokasikan pendapatan untuk Cadangan Anggaran Pembangunan yang disimpan pada Bank yang bisa mendapatkan hasil jasa giro dan deposito *mobile* dan juga dapat digunakan sebagai dana cadangan untuk mengatasi hal-hal yang bersifat darurat di daerah, baik pada tahun berjalan maupun pada awal tahun anggaran di mana sumber dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Daerah ditransfer setiap triwulan bahkan terjadinya keterlambatan dari yang telah ditetapkan.
2. Diberikannya kewenangan kepada Pemerintah Daerah di dalam menggali potensi Pendapatan Daerah. Sedangkan sektor bisnis perlu mendapat dukungan pemerintah dalam mengembangkan kegiatannya guna mendukung pembangunan yang berefek penggandaan (*multiplier effect*) dengan mengacu pada Pembangunan yang berkekuatan masyarakat. Kemudian Struktur Belanja lebih banyak diarahkan pada pengeluaran yang bersifat *Directly Productivity Investment (DPI)* di mana secara langsung dapat mempercepat Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang pada gilirannya mampu meningkatkan Kemandirian Wilayah, seperti pembangunan pasar, sebab dapat menghasilkan pendapatan daerah dalam jangka pendek yang pada akhirnya dapat mendukung APBD Kota Samarinda.
3. Dalam pembangunan *Social Overhead Capital (SOC)*, diarahkan pada istilah lebih baik memberi pancing dibandingkan memberi ikan. Untuk

keberlanjutan Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi, terkecuali pada hal-hal yang secara manusiawi harus mendapat perhatian pemerintah. Selain itu perlu melibatkan masyarakat dan pihak swasta yang dapat mempengaruhi Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda.

4. Terjadinya interkoneksi pembangunan baik konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor-impor antar kota, kabupaten, provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal ini memberi isyarat manajemen pembangunan dan keuangan di Kota Samarinda tidak bisa terlepas dari interkoneksi tersebut, sehingga harus memperhatikan dan mempertimbangkan perencanaan pembangunan dengan sumber daya dan kekuatan yang ada di daerah masing-masing.
5. Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kota Samarinda, Proporsi Pendapatan dari Dana Perimbangan sangat besar terutama berasal dari dana hasil sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini menjadi tantangan tersendiri pada masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali, 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta; Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. 2001. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Kecamatan-Kecamatan Di Kota Samarinda*.
- , 2002. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Kecamatan-Kecamatan Di Kota Samarinda*.
- , 2003. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Kecamatan-Kecamatan Di Kota Samarinda*.
- , 2001. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kecamatan-Kecamatan Di Kota Samarinda*.
- , 2002. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kecamatan-Kecamatan Di Kota Samarinda*.
- , 2003. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kecamatan-Kecamatan Di Kota Samarinda*.
- Bagian Keuangan Sekretariat Kota Samarinda. 2001. *Struktur Belanja Setiap Kecamatan Dalam Kota Samarinda*, Perhitungan APBD.
- , 2002. *Struktur Belanja Setiap Kecamatan Dalam Kota Samarinda*, Perhitungan APBD.
- , 2003. *Struktur Belanja Setiap Kecamatan Dalam Kota Samarinda*, Perhitungan APBD.
- Boediono. 1988. *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta; Penerbit Balai Pustaka Fakultas Ekonomi.
- Christensen, 1992. *Population and Sample*, New York; Mc. Graw Hill Book Company.
- Dinas Kesehatan Kota Samarinda. 2001. *Angka Rata-Rata Usia Harapan Hidup Pria dan Wanita Setiap Kecamatan Kota Samarinda*.
- , 2002. *Angka Rata-Rata Usia Harapan Hidup Pria dan Wanita Setiap Kecamatan Kota Samarinda*.

- , 2003. *Angka Rata-Rata Usia Harapan Hidup Pria dan Wanita Setiap Kecamatan Kota Samarinda.*
- Dinas Pendapatan Kota Samarinda. 2001. *Struktur Pendapatan Kota Samarinda Setiap Kecamatan Dalam Kota Samarinda*, Perhitungan APBD.
- , 2002. *Struktur Pendapatan Kota Samarinda Setiap Kecamatan Dalam Kota Samarinda*, Perhitungan APBD.
- , 2003. *Struktur Pendapatan Kota Samarinda Setiap Kecamatan Dalam Kota Samarinda*, Perhitungan APBD.
- Dinas Pendidikan Kota Samarinda. 2001. *Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Setiap Kecamatan Kota Samarinda.*
- , 2002. *Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Setiap Kecamatan Kota Samarinda.*
- , 2003. *Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Setiap Kecamatan Kota Samarinda.*
- Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. 2001. *Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Setiap Kecamatan Kota Samarinda.*
- , 2002. *Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Setiap Kecamatan Kota Samarinda.*
- , 2003. *Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Setiap Kecamatan Kota Samarinda.*
- Devas N. Binder, B. Booth, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta; Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Due, F.J. 1968. *Keuangan Negara, Perekonomian dari Sektor Pemerintah*, Penerjemah Iskandarsyah dan Arief Jamin, Jakarta; Penerbit Yayasan UI.
- Effendi Bachtiar, 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Jakarta; Penerbit Media Offset
- Elmi Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia*. Jakarta; Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Gany Radi A, 2001. *Menyongsong Abad Baru Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal*, Makassar; Penerbit Hasanuddin University Press.

- Goedhart C. 1973. *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Diterjemahkan Ratmoko, Jakarta; Penerbit Djambatan.
- Haz Hamzah. 2001. *Mengkaji Ulang Politik Ekonomi Indonesia (Strategi Mewujudkan Keadilan Sosial)*. Jakarta; Penerbit Pustaka Ciganjur.
- Josef R.K., 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta; Penerbit CV. Rajawali.
- Kadariah. 1981. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Jakarta; Penerbit Bina Aksara.
- Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. 2001. *Jumlah Penduduk Pria dan Wanita Setiap Kecamatan Dalam Kota Samarinda*.
- , 2002. *Jumlah Penduduk Pria dan Wanita Setiap Kecamatan Dalam Kota Samarinda*.
- , 2003. *Jumlah Penduduk Pria dan Wanita Setiap Kecamatan Dalam Kota Samarinda*.
- Kartasasmita Ginandjar, 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta; Penerbit Cides.
- Kelana Said, 1996. *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta; Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Larasati Endang, 1986. *Materi Pokok Keuangan Negara*, Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka.
- Mulia, 1987. *Bunga Rampai Keuangan Daerah*, Jakarta; Penerbit Tamita Raya.
- Mubyarto, 2001. *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta; Penerbit Balai Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Pamudji S., 1980. *Pembinaan Perkotaan Di Indonesia (Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan)*, Jakarta; Penerbit dan Balai Buku Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Partadiredja Ace. 1977. *Perhitungan Pendapatan Nasional*, Jakarta; Penerbit LP3ES.
- Pasaribu Amudi. 1976. *Ekonometrika*, Medan; Penerbit Borta Gorat.
- Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda. 1978. *Kotamadya Samarinda dan Pembangunan*, Samarinda; Penerbit Maruhum.

- Reksohadiprodjo Sukanto, 1993. *Ekonomi Perkotaan*, Yogyakarta; Penerbit Balai Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Rahardja Pratama dan Mandala Manurung. 2001. *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Richardson, W, Harry. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Jakarta; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Salim Emil. 1976. *Masalah Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta ; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soedarsono W., 2000. *Pembangunan Berbasis Rakyat*, Jakarta; Penerbit Melati Bhakti Pertiwi..
- Soeratno dan Arsyad Lincolin. 1999. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta; Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Solimun. 2004. *Pengukuran Variabel dan Pemodelan Statistika Aplikasi SEM-AMOS dan WaSo*, Malang; Fakultas MIPA dan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Sukirno Sadono. 1976. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, Jakarta; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Sumantri Suria. 1988. *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suparmoko, M., 1979. *Azas-Azas Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta; Fakultas Ekonomi UGM.
- Suryabrata Sumadi. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta; Penerbit CV. Rajawali.
- Syamsi I., 1988. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta; PT. Bina Aksara.
- Swasono Sri Edi, 2001. *Ekspose Ekonomika Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi*. Yogyakarta; Penerbit Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep) UGM.
- Tjiptoherijanto Prijono. 1997. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*. Jakarta; Penerbit Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo Bintoro. 2001. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta; Penerbit Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

- Wibowo Arief. 2003. *Pengantar Analisis Jalur (Path Analysis)*. Surabaya; Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Wilkinson Thomas O., 1965. *The Urbanization of Japanese Labor, 1868 – 1955*, Massachusetts; The University of Massachusetts Press, Amherst.
- Wojang J., 1995. *Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta; Penerbit Ichtiar.
- Zadjuli Imam S., 1986. *Pola Pembangunan Berimbang dalam Struktur Ekonomi Daerah Jawa Timur*, Surabaya.
- , 2002. *Restrukturisasi Pembangunan Ekonomi Dalam Era Reformasi*. Surabaya; Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- , 2004. *Langkah-Langkah dan Perencanaan Program Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik Jatim*. Surabaya; Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- , 2005. *Prospek dan Kendala Ekonomi Indonesia*. Surabaya; Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

Lampiran I : PETA TEORI

PETA TEORI

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
1	Abdullah Rozali, 2000	<i>Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif</i>	“Kondisi tersebut dirasakan oleh Daerah sebagai suatu ketidak adilan, sehingga menimbulkan berbagai tuntutan yang disampaikan dengan berbagai cara, yang pada puncaknya melahirkan tuntutan Reformasi, yang bergema di seluruh pelosok tanah air”.	Buku
2	Swasono Sri Edi, 2001	<i>Ekspose Ekonomika Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi</i>	“Daerah merasakan setelah lima puluh tahun Indonesia merdeka, otonomi bagi daerah masih sangat terbatas. Sentralisasi yang terjadi semakin kuat, sehingga menimbulkan kesenjangan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dampak yang lebih berkembang di daerah adalah perasaan bahwa daerah hanya menjadi obyek pemerasan pusat atau dalam kata lain membangun di daerah bukan membangun daerah”	Buku

dilanjutkan

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
3	Josef R.K., 1991	<i>Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia</i>	<p>“Kemudian sejauh ini ada tiga pertimbangan yang menunjuk titik berat otonomi pada Dati II. Pertama, pertimbangan politis. Kedua, pertimbangan administratif. Ketiga, pertimbangan pembangunan. Sedangkan secara community base resources management, ada tiga alasan teoritis arti penting titik berat otonomi daerah pada Dati II, yakni local variety, local resources, dan local accountability. Local Variety menyangkut keanekaragaman berbagai potensi daerah; local resources menyangkut keanekaragaman sumber daya yang dimiliki Dati II; dan local accountability menyangkut kemampuan pertanggungjawaban Dati II dalam Otonomi Daerah. Bahwa Dati II paling sesuai dengan idealisme otonomi daerah. Pertama, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksible ketimbang yang tersentralisasi. Kedua, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih efektif dan inovatif daripada yang tersentralisasi. Ketiga, lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi.”</p>	Buku
4	Kelana Said, 1996	<i>Teori Ekonomi Makro</i>	<p>“Sukses pelaksanaan otonomi daerah akan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, termasuk kesiapan aparat dan masyarakat.”</p>	Buku

dilanjutkan

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
5	Syamsi I., 1988	<i>Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara</i>	<p>“Pertama, Kemampuan Struktur Organisasinya : Struktur organisasi pemerintah daerah mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggungjawabnya. Kedua, Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah : Menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Ketiga, Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat : Dengan struktur organisasi dan kelincahan aparatnya. Keempat : Kemampuan Keuangan Daerah : Semua kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, memerlukan banyak biaya. Oleh karena itu perlu diperkirakan apakah pemerintah daerah mampu membiayai semua kegiatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri.”</p>	Buku
6	Josef R.K., 1991	<i>Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia</i>	<p>“Faktor pertama yaitu manusia pelaksanaannya harus baik adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor kedua adalah keuangan yang baik. Istilah keuangan mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup dan baik, pengertian peralatan adalah setiap benda atau alat yang dapat</p>	Buku

dilanjutkan

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
			dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Faktor keempat adalah organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi adalah dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain”	
7	Salim Emil, 1976	<i>Masalah Pembangunan Ekonomi Indonesia</i>	“Daerah perlu menggali sumber penerimaan rupiah yang lebih banyak apabila ia ingin mempertahankan otonomi daerah. Kunci dari otonomi terletak pada kemampuan dan kedewasaan dalam pembuatan keputusan dan penggalan sumber pembelanjaan dalam rupiah”.	Buku
8	Suparmoko, M, 1979	<i>Azas-Azas Ilmu Keuangan Negara</i>	“Keuangan Negara merupakan studi mengenai pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja.”	Buku
9	Larasati Endang, 1986	<i>Materi Pokok Keuangan Negara</i>	“Keuangan Negara atau Anggaran adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan dalam bentuk angka-angka. Didalamnya dinyatakan tentang jumlah penerimaan-	Buku

dilanjutkan

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
10	Haz Hamzah, 2001	<i>Mengkaji Ulang Politik Ekonomi Indonesia (Strategi Mewujudkan Keadilan Sosial)</i>	“Secara teoritis terdapat 3 macam sistem anggaran yakni anggaran <i>surplus</i> , anggaran <i>balance</i> , anggaran <i>defisit</i> . Disebut anggaran <i>balance</i> jika pengeluarannya sama dengan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran tertentu. Sedangkan sistem anggaran <i>defisit</i> memungkinkan pemerintah mempunyai pengeluaran yang melebihi pendapatannya. Kekurangan atau defisit kemudian ditutup melalui pinjaman, baik dari / melalui masyarakat (<i>obligasi</i>) maupun pinjaman luar negeri (<i>hutang</i>). Sedangkan anggaran <i>surplus</i> adalah penerimaan diupayakan lebih tinggi dari pengeluaran, sehingga terdapat <i>surplus</i> (tabungan)”.	Buku
11	Partadiredja Ace, 1977	<i>Perhitungan Pendapatan Nasional</i>	“Kemudian dapat dipahami bahwa semua kegiatan pemerintah itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya ini berasal dari berbagai sumber seperti pajak, cukai, sumbangan, penghasilan dari perusahaan-perusahaan pemerintah, pinjaman dari dalam dan luar negeri dan pungutan lain sesuai dengan ketentuannya. Ilmu yang khusus mempelajari	Buku

dilanjutkan

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
12	Goedhart C, 1973	<i>Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Diterjemahkan Ratmoko</i>	penerimaan dan pengeluaran ini adalah ilmu keuangan negara". "Ilmu keuangan negara dalam arti luas, tidak terbatas pada aspek-aspek sosial, ekonomis tentang masalah keuangan dari pada hukum publik keuangan negara, seperti pula halnya semua urusan yang tampak dalam kejadian masyarakat, dapat dirinjau dari berbagai sudut. Dengan demikian maka keuangan negara selain dapat ditinjau dari berbagai sudut. Misalnya dari sudut hukum publik, sudut administratif organisatoris dan sudut sosial".	Buku
13	Mulia, 1987	<i>Bunga Rampai Keuangan Daerah</i>	"Suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan daerah, pada suatu masa depan dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa yang akan datang".	Buku
14	Wojang J., 1995	<i>Administrasi Keuangan Daerah</i>	"Keuangan daerah secara sederhana dapat dirumuskan, semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasi oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundangan yang bertaku."	Buku

dilanjutkan

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
15	Kartasasmita Ginandjar, 1996	<i>Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan</i>	"Kebijaksanaan dan program pembangunan SDM yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan pemerataannya yaitu berupa program-program pendidikan dan kesehatan terutama bagi wilayah-wilayah kabupaten/pedesaan. Misalnya angka persentase anak sekolah yang menamatkan pendidikan SMP berbeda sangat jauh antara Balikpapan-Samarinda (53,9%) dibanding Kabupaten Pasir (21,8%) dan Berau (31,9%). Demikian pula dalam bidang kesehatan angka kematian bayi (AKB) masih 48 per 1000 kelahiran hidup untuk Kabupaten Pasir dibanding 41 untuk Balikpapan, dan 42 untuk Samarinda. Rasio dokter dan penduduk juga sangat buruk untuk Berau dan Kutai (masing-masing 6.698 dan 5.570 penduduk per dokter) untuk tahun 1999 dibanding 2.616 per dokter untuk Balikpapan, dan 3.809 untuk rata-rata provinsi Kaltim."	Buku
16	Rahardja Pratama dan Mandala Manurung, 2001	<i>Teori Ekonomi Makro</i>	"Dalam menghitung Pendapatan Nasional, dapat digunakan tiga macam metode, yaitu (1) metode produksi (<i>production approach</i>) adalah total output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dengan formulasi $NT = NO - NI$ di mana $NT =$ Nilai Tambah, $NO =$ Nilai Produksi dan $NI =$ Nilai Input Antara; (2) metode pendapatan (<i>income approach</i>) adalah nilai total balas jasa atas produksi yang	

dijanjutkan

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
17	Bosdiono, 1988	<i>Ekonomi Moneter</i>	<p>digunakan dalam proses produksi dengan formulasi $Q = f(L, K, U, E)$ di mana $Q = \text{Output}$, $L = \text{Tenaga Kerja}$, $K = \text{Barang Modal}$, $U = \text{Uang / Financial dan E} = \text{kemampuan } \textit{entrepreneur}$ atau kewirausahaan;</p> <p>(3) metode pengeluaran (<i>expenditure approach</i>) adalah total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu dengan formulasi $PDB = C + G + I + (X - M)$ di mana $C = \text{Konsumsi Rumah Tangga}$, $G = \text{Konsumsi Pemerintah}$, $I = \text{Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto}$, $X = \text{Ekspor}$ dan $M = \text{Impor}$. Secara teoritis, ketiga metode pendekatan tersebut dalam perhitungan saling melengkapi”.</p>	Buku

dilanjutkan

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
18	Zadjuli Imam S., 1986	<i>Pola Pembangunan Berimbang dalam Struktur Ekonomi Daerah Jawa Timur</i>	“Selanjutnya dikatakan bahwa teori tentang perubahan struktur ekonomi tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh Kuznets, Hagen, Hawrylyshyn (1969) dan Chenery, Elkington dan Sims (1970) dengan memasukkan ke dalam pola struktur yang diteliti itu, bukan hanya penyerapan tenaga kerja tetapi juga nilai tambah (added value) dari masing-masing sektor, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan komposisi atau distribusi sektoral di semua negara yang diamati sangat ditentukan oleh besarnya jumlah pembentukan modal terhadap Gross National Product (GNP), dan produksi dari sektor sekunder serta komposisi ekspor barang produksi sektor primer terhadap GNP, karena ketiga faktor tersebut berpengaruh pula pada tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dari suatu negara.”	Buku
19	Tjiptoherijanto Priyono, 1997	<i>Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi</i>	“Pemerintah harus melakukan desentralisasi pembangunan, terutama berkaitan dengan beberapa sektor pembangunan yang dipandang sudah mampu dilaksanakan oleh daerah masing-masing, pada kenyataannya bahwa masing-masing daerah memiliki potensi, baik sumber daya alam, manusia maupun kondisi geografis yang berbeda-beda menyebabkan ada daerah yang memiliki potensi untuk berkembang secara cepat dan sebaliknya, ada daerah yang kurang dapat berkembang karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya”	Buku

dilanjutkan

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
20	Richardson, W, Harry, 1991	Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional	"Ciri paling jelas dari perekonomian ruang adalah ketidakhomogenannya, kita melihat bahwa terdapat aglomerasi kegiatan ekonomi dan distribusi penduduk pada lokasi-lokasi tertentu. Aglomerasi ini dapat dilihat terlepas dari apa yang menjadi pusat perhatian kita di dalam perekonomian nasional terdapat beberapa daerah yang penduduknya lebih dapat, bagiannya dalam kegiatan industri lebih besar dan pendangannya lebih kosmopolitan dari pada daerah-daerah di dalam sesuatu daerah terdapat pusat-pusat yang dominan"	Buku
21	Wilkinson Thomas O., 1965	The Urbanization of Japanese Labor, 1868 – 1955	"Bahwa fungsi spesialisasi suatu wilayah ditentukan berdasarkan suatu index yang menunjukkan ratio persentase distribusi tenaga kerja di sejumlah kota di Jepang, melalui suatu penelitian. Selanjutnya berdasarkan penelitian tersebut Wilkinson menggambarkan komposisi tenaga kerja dalam struktur ketenagakerjaan di masing-masing kota di Jepang. Parameter yang digunakan dalam menambah sektor dan penyerapan tenaga kerja sektor yang bersangkutan. Rasio yang diperhitungkan untuk memperoleh angka indeks tersebut didasarkan pada peranan dari empat sektor terbesar. Sektor-sektor yang dianggap berperan dalam fungsi spesialisasi tersebut adalah sektor-sektor yang diklasifikasikan telah mempunyai Indeks Wilkinson lebih dari 0,3 atau $WI > 0,3$; yang diukur dari nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja."	Buku

dijanjutkan

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
22	Zadjudi Imam S., 1986.	<i>Pola Pembangunan Berimbang dalam Struktur Ekonomi Daerah Jawa Timur</i>	“Hasil pengamatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, seperti halnya pola nasional tanpa sektor pertumbuhan dan galian, menunjukkan pertumbuhan dengan pola tingkat ketidak stabilan yang makin rendah disertai oleh laju pertumbuhan ekonomi yang makin meningkat. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan hipotesa balanced-growth. Di Jawa Timur seperti halnya ditingkat nasional, juga telah terjadi pergeseran struktur yang meloncat tidak berurutan dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, melainkan penurunan peran sektor primer banyak diambil oleh sektor tersier”	Buku
23	Gany Radi A, 2001.	<i>Menyongsong Abad Baru Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal</i>	“Konsep pembangunan Kemandirian Lokal, eksploitasi sumber daya alam pada suatu tatanan harus dibarengi dengan upaya-upaya agar kualitas tatanan meningkat. Hal ini antara lain dilakukan dengan meningkatkan kualitas elemen-elemen tatanan yang lain, seperti manusia / masyarakat, teknostruktur dan kelembagaan dan lainnya dalam jumlah yang sebanding, agar tatanan mampu berkembang secara mandiri di masa-masa yang akan datang”	Buku
24	Effendi Bachtiar, 2002.	<i>Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan</i>	“Pergeseran dari era sentralisasi ke desentralisasi itu menandakan tengah terjadi perubahan paradigma baru seiring masa transisi dari otoritarianisme	Buku

dijanjutkan

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
25	Sukirno Sadono, 1976.	<i>Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah</i>	menuju demokrasi dalam konteks kehidupan bernegara, kebangsaan dan bermasyarakat. Sehingga ada kecenderungan yang semakin memandangi Negara tidak lagi sebagai monster yang menakutkan melainkan sebagai institusi yang harus dikelola bersama-sama demi mewujudkan kebaikan bersama. Semakin berkembang pula kecenderungan di mana masyarakat memandangi negara tidak lagi sebagai dewa yang serba tahu dan kepadanya segala sesuatu bergantung. Melainkan sebagai fasilitator, pelayanan publik dan pemelihara stabilitas”	Buku

dilanjutkan

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
26	Devas N. Binder, B. Booth, 1989.	<i>Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia</i>	“Data empiris menyajikan pola sumber penerimaan pada 277 Dati II (tidak termasuk DKI dan Timor Timur). Hal ini menunjukkan ketergantungan yang lebih besar lagi pada sumbangan dari atas, dibandingkan dengan Provinsi 73 % dari anggaran rutin dan 87 % dari anggaran pembangunan berasal dari Pemerintah Pusat. Dari penerimaan Dati II secara keseluruhan, sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri menyumbang 10 % dan penerimaan yang diarahkan 6 %, dibandingkan dengan 82 % yang berasal dari bantuan dan 2 % dari pinjaman”	Buku
27	Reksohadiprojo Sukanto, 1993.	<i>Ekonomi Perkotaan</i>	“Khusus untuk pengaturan lebih lanjut mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang penting bagi masyarakat kota ialah bahwa penyaluran dana haruslah didasarkan pada pemanfaatan perhitungan / analisa manfaat dan biaya sosial (social benefit-cost analysis) yang konsekuen. Proyek-proyek Pemerintah Kota yang memang tak dapat dipertanggungjawabkan, lebih baik tidak dilaksanakan. Harus diingat bahwa sumber dana kota itu jelas terbatas. Proyek-proyek yang biasanya berupa pelayanan umum, seperti penanggulangan urbanisasi, lingkungan, kemiskinan, kejahatan, kesehatan dan pendidikan berorientasi sosial yang mungkin tidak atau sukar memperhitungkan manfaat dan biaya sosial dan diputuskan, karena itu tidak	Buku

dilanjutkan

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
28	Devas N. Binder, B. Booth, 1989.	<i>Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia</i>	"Dalam upaya menggali pendapatan daerah harus menggunakan tolok ukur untuk menilai Pajak Daerah dalam mendorong Kemandirian Daerah digunakan ukuran yaitu : Pertama, Hasil (Yield) : memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya. Kedua, Keadilan (Equity) : dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Ketiga, Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency): pajak hendaknya mendorong (atau tidak-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi. Keempat, Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement): suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan. Kelima, Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a Local Revenue Source":	Buku
29	Gany Radi A, 2001.	<i>Menyongsong Abad Baru Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal</i>	"Indonesia akan terwujud sebagai negara yang kuat dan utuh karena didukung oleh pilar-pilar daerah atau tatanan yang kuat dan mandiri tetapi harus memperhatikan perbedaan gejala sosial kedalam tiga tingkat, yaitu tingkat perilaku individu; tingkat pola umum yang ditarik dari kebiasaan perilaku individu	Buku

dilanjutkan

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
30	Gany Radi A, 2001.	<i>Menyongsong Abad Baru Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal</i>	"Dengan pendekatan seperti ini pembangunan kualitas manusia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan pertanian untuk menyediakan pangan yang memadai, sistem nilai masyarakat agar menyadari pentingnya gizi bagi kesehatan dan pertumbuhan anak, serta pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi."	Buku
31	Soedarsono W., 2000.	<i>Pembangunan Berbasis Rakyat</i>	"Pola pembangunan community base development ialah pola pembangunan yang berlandaskan kepada kompetensi masyarakat itu sendiri. Konsep awalnya adalah kesepakatan bahwa tak ada satupun entitas yang bisa sama persis di muka bumi ini. Begitu juga dengan kondisi alam masyarakat. Setiap daerah, di mana pun di muka bumi, memiliki potensi yang berbeda-beda. Berdasarkan perbedaan potensi inilah muncul kebutuhan yang beragam. Artinya, pembangunan yang dibutuhkan juga harus disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan di dalam masyarakat. Inilah yang disebut community based development (pembangunan masyarakat)"	Buku

dilanjutkan

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
32	Soedarsono W., 2000.	Pembangunan Berbasis Rakyat	Pelaksanaan pembangunan di segala bidang sebenarnya dapat menerapkan prinsip pembangunan yang mendasar (Based Development). Yakni, bagaimana pembangunan serta tujuan utama pembangunan itu tumbuh dari masyarakat dan dilakukakan demi masyarakat sendiri. Pembangunan yang mengacu kepada kekuatan masyarakat berjalan secara paralel dengan konsep pembangunan demi kesejahteraan masyarakat”	Buku
33	Sumantri Suria, 1988.	Metodologi Penelitian	“Studi empiris adalah canggung dan tidak mudah dipergunakan karena berhubungan dengan gejala yang terpisah dan menimbulkan kesukaran untuk mengerti dan memahami setiap gejala sehingga sangat terbatas dalam hal peramalan yang merupakan tujuan akhir dari ilmu”	Buku
34	Soeratio dan Arsyad Lincoln, 1999.	Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis	“yang merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya sementara, belum benar-benar berstatus sebagai tesis”	Buku
35	Wibowo Arief, 2003.	Pengantar Analisis Jalur (Path Analysis)	“Analisis Jalur (<i>path analysis</i>) digunakan untuk menelaah hubungan antara model kausal yang telah dirumuskan peneliti atas dasar pertimbangan teoritis dan pengetahuan tertentu”	Buku

dijanjutkan

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
36	Pasaribu Amudi, 1976.	<i>Ekonometrika</i>	“Variabel eksogen atau variabel otonomi ditentukan oleh kekuatan yang berada diluar model. Variabel eksogen hanya bertindak sebagai variabel penjelaskan, tidak pernah bertindak sebagai variabel yang hendak dijelaskan”	Buku
37	Suryabrata Sumadi, 1988.	<i>Metodelogi Penelitian</i>	“Variabel intervening tidak pernah dapat diamati dan hanya dapat disimpulkan adanya berdasarkan pada variabel tergantung dan variabel sebab”	Buku
38	Solimun, 2004.	<i>Pengukuran Variabel dan Pemodelan Statistika Aplikasi SEM-AMOS dan WaSo</i>	“Suatu variabel yang tercakup didalam hipotesis penelitian, yang keragamannya ditentukan atau tergantung atau dipengaruhi oleh variabel lainnya”	Buku
39.	Rachim Abd., 2005	<i>Pengaruh Struktur Pendapatan dan Pemerintahan Kota Terhadap Kemungkinan Wilayah dan Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda (Disertasi)</i>	“Pendapatan Cadangan Anggaran Pembangunan yang disimpan pada Bank, untuk mengatasi hal-hal yang bersifat darurat di daerah.Kewenangan kepada Pemerintah Daerah di dalam menggali potensi Pendapatan Daerah, dan sektor bisnis perlu mendapat dukungan pemerintah dalam mengembangkan kegiatan pembangunan yang berefek penggandaan (<i>multiplier effect</i>) dengan mengacu pada Pembangunan yang berkekuatan masyarakat.Belanja lebih banyak diarahkan pada pengeluaran yang bersifat <i>Directly Productivity Investment (DPI)</i> . Pembangunan <i>Social Overhead Capital (SOC)</i> ,”	Disertasi

dilanjutkan

..... lanjutan 17

No	Pengarang / Peneliti / Tahun	Judul	Uraian Pendapat	Keterangan
			<p>diarahkan pada istilah lebih baik memberi pancing dibandingkan memberi ikan, terkecuali pada hal-hal yang secara manusiawi harus mendapat perhatian pemerintah. Terjadinya interkoneksi pembangunan baik konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor-impor antar kota, kabupaten, provinsi dan Pemerintah Pusat. Sehingga harus memperhatikan dan mempertimbangkan perencanaan pembangunan dengan sumber daya dan kekuatan yang ada di daerah masing-masing”.</p>	

Lampiran Ila : STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH SETIAP KECAMATAN DALAM KOTA SAMARINDA TAHUN 2001

No	Pendapatan	Realisasi Setiap Kecamatan										Jumlah									
		Samarinda Ilir	Samarinda Utara	Samarinda Ulu	Sungai Kunjang	Samarinda Seberang	Palaran														
A.	PENDAPATAN																				
1.	Pendapatan Asli Daerah	109.534.202.810,06	62.073.903.688,98	8.193.747.421,72	50.816.295.835,93	52.566.805.001,84	87.926.105.308,18	481.133.981.913,98													
a.	Pajak Daerah	10.876.074.079,98	7.440.170.071,53	6.193.747.421,72	3.757.440.804,62	3.483.346.052,83	2.233.094.615,92	29.977.874.956,00													
b.	Retribusi Daerah	4.937.645.347,77	4.714.101.274,12	3.561.578.163,87	2.109.443.858,07	726.623.706,89	854.230.424,28	12.760.931.793,00													
c.	Bagian Laba Badan Usaha Daerah	4.040.282.104,23	674.212.848,48	3.367.044.093,08	1.347.450.059,63	2.693.836.081,94	1.347.420.059,64	13.470.215.247,00													
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56.457.329,50	31.444.132,00	25.013.197,50	31.444.132,00	62.868.264,00	31.444.132,00	238.691.187,00													
2.	Dana Perimbangan	1.841.719.298,48	263.102.756,93	1.140.111.946,67	263.102.756,92	1.140.111.946,67	85.693.070.692,26	3.508.036.799,00													
a.	Bagi Hasil dari Provinsi	98.658.218.790,10	60.633.733.677,45	90.002.231.848,05	47.064.855.031,31	49.103.456.948,81	85.693.070.692,26	431.166.106.927,98													
	1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB)	12.480.814.979,37	6.913.485.853,12	8.953.323.161,62	5.257.991.678,38	7.584.583.328,88	5.789.987.503,63	46.090.116.505,00													
	2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.674.115.955,00	445.685.992,50	1.762.743.970,00	891.371.985,00	1.762.743.970,00	1.337.057.977,50	6.913.719.850,00													
	3) Pajak Pengambilan dan Pemeliharaan Air Bawah Tanah / Permukaan (PABT)	474.199.024,37	67.799.860,62	393.079.191,62	149.119.693,36	311.759.358,88	230.439.526,13	1.626.396.655,00													
	4) Bantuan / Subsidi Pembangunan	9.332.500.000,00	5.500.000.000,00	6.777.500.000,00	4.217.500.000,00	5.500.000.000,00	4.222.500.000,00	35.550.000.000,00													
b.	Bagi Hasil dari Pusat	96.177.403.750,73	54.620.247.824,33	81.049.508.888,43	41.806.863.352,93	41.508.953.619,93	79.903.013.188,63	385.065.980.422,95													
1)	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.007.598.668,00	801.519.733,60	3.206.078.934,40	2.404.559.208,80	1.603.039.487,20	4.007.598.661,00	16.030.384.673,00													
2)	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.055.892.670,00	150.841.810,00	754.209.050,00	150.841.810,00	603.367.240,00	301.683.620,00	3.016.836.200,00													
3)	Pajak Penghasilan (PPh)	3.534.520.500,00	504.931.500,00	2.019.728.000,00	1.009.863.000,00	1.009.863.000,00	2.019.728.000,00	10.098.630.000,00													
4)	Sektor Kebutuhan	298.915.421,40	547.830.843,60	423.373.132,10	247.830.842,80	298.915.421,40	672.288.563,50	2.489.154.215,00													
5)	Sektor Pertambangan	-	3.870.096.504,40	7.187.322.078,00	-	-	-	11.087.418.583,00													
6)	Sektor Perikanan	-	-	-	-	-	-	-													
7)	Sektor Minyak Bumi	-	10.751.258.941,20	-	-	-	-	35.837.529.804,00													
8)	Sektor Gas Alam	18.350.414.491,33	18.350.414.491,33	18.350.414.491,33	18.350.414.491,33	18.350.414.491,33	18.350.414.491,33	110.102.486.947,98													
9)	Dana Alokasi Umum (DAU)	58.930.062.000,00	19.643.354.000,00	49.108.385.000,00	19.643.354.000,00	19.643.354.000,00	29.485.031.000,00	196.433.540.000,00													
10)	Dana Alokasi Umum (DAK)	-	-	-	-	-	-	-													
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-	-	-	-													
B.	PEMBIAYAAN																				
1.	Penerimaan Daerah	9.819.933.415,09	3.466.826.574,49	8.231.656.708,94	3.466.826.574,49	3.466.826.574,49	5.054.929.182,57	33.506.824.869,06													
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	5.646.620.822,59	2.075.722.376,99	4.753.896.317,19	2.075.722.376,99	2.075.722.376,99	2.968.272.886,32	19.595.782.894,00													
b.	Transfer dari Dana Cadangan	5.356.347.668,40	1.785.449.222,80	4.463.623.057,00	1.785.449.222,80	1.785.449.222,80	2.678.173.833,20	17.854.492.227,00													
c.	Penanaman Pinjaman dan Obligasi	290.273.154,19	290.273.154,19	290.273.154,19	290.273.154,19	290.273.154,19	290.099.025,12	1.741.290.667,00													
d.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	4.173.312.592,60	1.391.104.197,50	3.477.760.495,75	1.391.104.197,50	1.391.104.197,50	2.086.656.294,25	13.971.047.975,00													
2.	Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)	119.354.226.225,17	65.540.730.263,47	106.428.235.976,11	54.283.122.410,42	56.053.457.447,06	92.981.034.480,75	494.640.808.782,98													
	J U M L A H																				

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda Dinas Pendapatan, Perhitungan APBD Tahun 2001 (Data di olah kembali)

Lampiran IIb : STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH SETIAP KECAMATAN DALAM KOTA SAMARINDA TAHUN 2002

No	Pendapatan	Realisasi Setiap Kecamatan							Jumlah
		Samarinda Ilir	Samarinda Utara	Samarinda Ulu	Sungai Kurung	Samarinda Seberang	Palaran		
A.	PENDAPATAN								
1.	Pendapatan Asli Daerah	121.853.140.679,26	69.953.982.975,03	128.412.118.439,56	53.472.231.539,41	57.066.201.055,66	83.791.411.722,07	514.549.106.410,99	
a.	Retribusi Daerah	17.710.056.994,02	2.277.360.697,79	12.840.959.463,43	3.956.628.050,26	5.394.032.956,78	3.327.983.750,72	45.507.021.963,00	
b.	Retribusi Daerah	6.728.100.329,90	841.012.541,24	5.044.472.646,87	1.682.825.082,48	1.177.417.557,73	1.345.620.065,98	16.819.448.224,00	
c.	Bagian Laba Badan Usaha Daerah	5.024.738.927,34	837.454.821,22	4.187.274.106,11	1.674.909.642,45	3.310.349.031,43	1.674.980.642,45	16.709.707.171,00	
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.822.076,09	15.852.759,28	110.969.314,24	15.852.759,26	31.705.518,52	15.852.759,26	317.055.186,63	
2.	Dana Perimbangan	5.830.405.660,69	583.040.566,07	3.498.243.396,41	583.040.566,07	874.560.849,10	291.520.283,03	11.660.811.321,37	
a.	Bagi Hasil dari Provinsi	104.143.083.685,24	67.676.622.287,24	115.571.158.976,13	49.515.623.489,15	51.672.166.098,88	80.463.427.871,35	489.042.084.507,99	
1)	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB)	2.071.798.402,50	345.299.733,75	3.874.549.649,41	6.981.867.192,44	3.425.430.704,04	4.332.963.327,37	34.715.632.988,28	
2)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.653.487.925,29	275.581.320,88	2.755.581.320,88	1.102.325.283,53	1.102.325.283,53	826.743.962,64	5.511.626.417,63	
3)	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah / Permukaan (P3ABT)	174.674.379,13	43.668.594,78	218.342.973,91	43.668.594,78	87.337.189,57	330.320.163,48	698.011.895,65	
4)	Bantuan / Subsidi Pembangunan	6.420.000.000,00	3.210.000.000,00	4.280.000.000,00	2.140.000.000,00	3.210.000.000,00	2.140.000.000,00	21.400.000.000,00	
b.	Bagi Hasil dari Pusat	93.823.122.878,32	63.802.072.637,83	108.589.291.783,69	46.090.192.785,11	45.891.306.690,78	76.130.464.643,98	434.328.451.518,71	
1)	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.207.851.773,25	1.041.570.354,65	4.166.293.418,60	3.124.720.063,95	2.083.179.709,30	5.207.851.773,25	20.831.467.093,00	
2)	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.724.238.241,95	246.319.746,85	1.231.598.744,25	246.319.746,85	985.278.955,40	492.639.497,70	4.926.394.977,00	
3)	Pajak Penghasilan (PPh)	5.320.119.000,00	760.017.000,00	3.040.068.000,00	182.034.000,00	152.034.000,00	5.776.068.000,00	15.200.340.000,00	
4)	Sektor Kehutanan	172.823.022,95	691.300.091,82	345.650.045,91	241.955.032,14	345.650.045,91	1.659.120.220,36	3.456.500.459,09	
5)	Sektor Pertambangan	-	5.692.907.589,84	8.539.361.394,76	-	-	-	14.232.268.974,60	
6)	Sektor Perikanan	17.222.958,84	17.222.958,84	17.222.958,84	17.222.958,84	17.222.958,84	17.222.958,84	103.337.753,04	
7)	Sektor Minyak Bumi	13.044.793.912,50	-	-	-	-	30.437.852.462,50	43.482.646.375,00	
8)	Sektor Gas Alam	22.771.478.481,33	22.771.478.481,33	22.771.478.481,33	22.771.478.481,33	22.771.478.481,33	22.771.478.481,33	136.628.870.887,98	
9)	Dana Alokasi Umum (DAU)	58.609.387.500,00	19.538.462.500,00	68.477.618.750,00	19.538.462.500,00	19.538.462.500,00	9.768.231.250,00	195.464.625.000,00	
10)	Dana Alokasi Umum (DAK)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Lain-lain Penerimaan yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	
B.	PEMBIAYAAN								
1.	Penerimaan Daerah	31.820.986.184,80	10.272.277.003,60	26.308.808.889,50	10.272.277.003,60	13.080.901.623,56	14.284.454.298,90	106.039.705.003,96	
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	25.797.394.240,20	9.099.746.358,40	21.677.482.269,00	9.099.746.358,40	10.856.309.186,36	13.269.658.376,60	89.726.326.732,08	
b.	Transfer dari Dana Cadangan	25.043.471.827,20	8.347.823.942,40	20.069.569.856,00	8.347.823.942,40	10.108.386.773,36	12.521.735.913,60	85.238.802.254,95	
c.	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	747.922.413,00	747.922.413,00	747.922.413,00	747.922.413,00	747.922.413,00	747.922.413,00	4.487.534.478,00	
d.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)	6.029.591.944,60	1.176.530.648,20	4.691.326.620,50	1.176.530.648,20	2.224.592.437,20	1.014.795.972,30	16.313.368.271,00	
	JUMLAH	153.874.126.864,06	80.226.259.878,63	154.720.927.329,06	63.744.528.543,01	70.147.102.679,22	98.075.866.020,97	620.588.811.414,95	

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda Dinas Pendapatan, Perhitungan APBD Tahun 2002 (Data diolah kembali)

Lampiran IIc : STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH SETIAP KECAMATAN DALAM KOTA SAMARINDA TAHUN 2003

No	Pendapatan	Realisasi Setiap Kecamatan										Jumlah
		Samarinda Ilir	Samarinda Utara	Samarinda Ulu	Sungai Kunjang	Samarinda Seberang	Pelataran					
A.	PENDAPATAN	140.821.619,007,73	85.932.855,807,53	136.635.484.794,84	66.068.562.204,24	81.734.851.270,39	113.079.330.304,93					624.292.903.184,46
1.	Pendapatan Asli Daerah	19.549.848.100,16	2.928.105,961,61	16.482.042.054,87	5.087.152.408,00	6.840.927.134,67	4.259.792.049,58					55.188.767.708,89
a.	Pajak Daerah	8.856.612.016,40	1.107.076.502,06	6.508.735.241,92	2.214.153.004,10	1.549.907.102,67	1.771.322.403,58					22.107.806.270,63
b.	Retribusi Daerah	6.311.618.688,10	1.051.969.944,35	5.259.849.721,75	2.103.939.888,70	4.137.424.759,00	2.103.939.888,70					20.968.943.869,60
c.	Bagian Laba Badan Usaha Daerah	-	-	-	-	-	-					-
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.421.416.417,66	769.059.515,20	4.614.357.091,20	769.059.515,20	1.153.589.272,80	384.529.757,60					12.112.011.569,66
2.	Dana Perimbangan	121.231.770.907,57	83.024.748.840,92	120.152.542.739,77	60.981.409.796,24	74.893.930.135,72	108.819.738.255,35					569.104.141.475,57
a.	Bagi Hasil dari Provinsi	19.991.035.966,40	7.443.475.412,60	13.408.809.940,45	6.852.042.565,60	11.254.085.131,20	8.120.059.331,20					66.869.508.347,45
1)	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB)	4.321.964.651,40	720.327.441,90	2.881.309.767,60	1.440.654.883,80	2.881.309.767,60	2.160.982.325,70					14.406.548.836,00
2)	Pejak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	3.228.438.236,60	538.239.701,10	2.152.958.824,40	1.076.479.412,20	2.152.958.824,40	1.614.719.118,30					10.764.794.117,00
3)	Pejak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah / Permukaan (P3ABT)	139.633.078,40	34.908.269,60	174.541.348,45	34.908.269,60	69.616.539,20	244.357.887,20					698.165.392,45
4)	Bantuan / Subsidi Pembangunan	12.300.000.000,00	6.150.000.000,00	6.200.000.000,00	4.100.000.000,00	6.150.000.000,00	4.100.000.000,00					41.000.000.000,00
b.	Bagi Hasil dari Pusat	101.240.734.941,17	75.581.274.228,32	106.743.732.789,32	54.329.367.230,64	63.639.845.004,52	100.699.678.924,15					502.234.633.128,12
1)	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.931.685.254,25	1.386.337.050,85	5.545.348.203,40	4.159.011.152,22	2.772.674.101,70	6.931.685.254,58					27.726.741.017,00
2)	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.422.073.232,25	346.010.461,75	1.730.052.308,75	346.510.461,75	1.383.541.841,00	692.020.923,50					6.920.209.235,00
3)	Pajak Penghasilan (PPh)	4.546.738.875,00	649.534.125,00	2.598.136.500,00	5.198.273.000,00	5.196.273.000,00	2.598.136.500,00					20.785.082.000,00
4)	Sektor Kebudayaan	1.380.574.881,00	2.761.149.774,00	2.070.862.330,50	2.761.149.774,00	4.403.980.513,15	5.451.437.217,50					18.829.154.496,15
5)	Sektor Pertambangan	-	12.078.925.497,95	18.860.861.839,00	-	-	-					30.939.787.136,95
6)	Sektor Perikanan	-	-	-	-	-	-					-
7)	Sektor Minyak Bumi	-	12.484.418.128,10	-	-	-	28.130.308.960,90					41.614.727.087,00
8)	Sektor Gas Alam	25.008.813.942,67	25.008.813.942,67	25.008.813.942,67	25.008.813.942,67	25.008.813.942,67	25.008.813.942,67					150.040.883.856,02
9)	Dana Alokasi Umum (DAU)	60.127.145.250,00	20.042.381.750,00	50.105.954.375,00	16.033.905.400,00	24.050.858.100,00	30.083.572.625,00					200.423.817.500,00
10)	Dana Alokasi Umum (DAK)	825.703.500,00	825.703.500,00	825.703.500,00	825.703.500,00	825.703.500,00	825.703.500,00					4.954.221.000,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-	-	-					-
B.	PEMBIAYAAN	32.328.682.878,66	10.776.560.959,55	26.941.402.398,68	10.776.560.959,55	10.776.560.959,55	16.164.841.439,33					107.765.609.595,52
1.	Penerimaan Daerah	26.890.441.498,66	8.963.480.499,55	22.408.701.248,88	8.963.480.499,55	8.963.480.499,55	13.445.220.749,33					82.634.804.995,52
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	26.890.441.498,66	8.963.480.499,55	22.408.701.248,88	8.963.480.499,55	8.963.480.499,55	13.445.220.749,33					89.834.804.995,52
b.	Transfer dari Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-					-
c.	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-	-	-	-	-					-
d.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-					-
2.	Urusan Kas dan Perimbangan (UKP)	5.438.241.380,00	1.813.080.460,00	4.532.701.150,00	1.813.080.460,00	1.813.080.460,00	2.719.620.690,00					18.130.804.600,00
J U M L A H		173.151.301.896,39	96.729.416.562,08	163.576.887.193,52	76.845.123.163,52	92.511.412.229,94	129.244.371.744,28					732.056.512.779,98

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda Dinas Pendapatan, Perhitungan APBD Tahun 2003 (Data di olah Kembali)

Lampiran IIIa : STRUKTUR BELANJA SETIAP KECAMATAN DALAM KOTA SAMARINDA TAHUN 2001

No	Struktur Pengeluaran	Kecamatan									Jumlah
		Samarinda Ilir	Samarinda Utara	Samarinda Ulu	Sungai Kunjang	Samarinda Seberang	Palaran				
B.	BELANJA / PENGGUNAAN DANA	215.384.572.851,12	54.327.400.169,19	91.150.923.807,59	44.751.906.530,81	55.933.154.996,69	33.092.845.427,83	494.640.806.782,03			
	1. Belanja Rutin / Aparatur	75.935.609.633,39	26.800.803.400,72	55.835.007.094,84	20.100.602.550,54	32.597.004.250,91	11.167.001.416,97	223.340.028.339,37			
	a. Gaji	45.692.848.208,84	16.126.887.603,12	33.597.682.506,50	12.095.165.702,34	20.158.609.903,90	6.719.536.501,30	134.390.730.026,09			
	b. Barang	10.719.730.267,22	3.783.434.211,96	7.882.154.608,25	2.837.575.688,97	4.729.292.784,95	1.576.430.921,65	31.528.618.433,09			
	c. Pemeliharaan	2.244.540.950,88	792.190.923,84	1.660.397.758,00	594.143.192,88	990.238.654,80	330.079.551,60	6.601.591.032,00			
	d. Perjalanan Dinas	1.472.460.134,00	519.691.812,00	1.082.691.275,00	389.768.859,00	649.614.765,00	216.538.255,00	4.330.765.100,00			
	e. Lain-lain	15.806.030.074,45	5.578.598.849,80	11.622.080.937,09	4.183.949.137,35	6.973.248.562,26	2.324.416.187,42	48.488.323.748,37			
	2. Pembangunan / Publik	139.448.963.215,73	27.526.596.769,47	35.315.916.722,75	24.651.306.980,07	22.432.150.744,78	21.925.844.010,86	271.300.778.442,66			
	a. Pembangunan Kepentingan Umum / Sosial (Social Overhead Capital / SOC)	133.434.578.255,16	25.207.189.458,83	32.205.137.827,66	20.181.984.800,83	20.698.299.876,66	20.395.686.600,83	252.122.876.919,97			
	1) Industri										
	2) Pertanian dan Kehutanan	252.833.800,00	252.833.800,00			86.636.500,00	252.833.800,00	845.137.900,00			
	3) Sumber Daya Air dan Irigasi										
	4) Tenaga Kerja	8.705.600,00	8.705.600,00		8.705.600,00	8.705.600,00	8.705.600,00	43.528.000,00			
	5) Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	416.304.315,50	416.304.315,50	160.000.000,00	168.705.600,00	168.705.600,00	168.705.600,00	1.498.725.431,00			
	6) Transportasi	8.218.415.092,16	7.980.924.258,83	8.218.415.092,16	7.980.924.258,83	8.218.415.092,16	7.980.924.258,83	48.598.018.062,97			
	7) Pertambangan dan Energi										
	8) Pariwisata dan Telekomunikasi		1.856.369.300,00					1.856.369.300,00			
	9) Pembangunan Daerah dan Pemukiman	279.571.666,67	284.166.666,67	284.166.666,67	284.166.666,67	284.166.666,67	284.034.666,67	1.700.273.000,02			
	10) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	109.172.018.729,83	5.045.905.966,83	5.320.333.517,83	2.377.503.124,33	2.869.690.866,83	2.377.503.124,33	128.962.955.329,98			
	11) Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Olah Raga	2.047.547.848,50	1.956.247.848,50	4.255.547.848,50	1.956.247.848,50	1.956.247.848,50	1.917.247.848,50	14.089.087.091,00			
	12) Kependudukan dan Keluarga Berencana	20.833.333,33	20.833.333,33	20.833.333,33	20.833.333,33	20.833.333,33	20.833.333,33	124.999.999,98			
	13) Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peran Wanita, Anak dan Remaja	326.428.366,67	326.428.366,67	326.428.366,67	326.428.366,67	326.428.366,67	326.428.366,67	1.958.570.200,02			
	14) Perumahan dan Pemukiman	9.482.808.916,67	3.914.413.416,67	9.482.808.916,67	3.914.413.416,67	3.914.413.416,67	3.914.413.416,67	34.623.271.500,02			
	15) Agama	64.833.333,33	64.833.333,33	64.833.333,33	64.833.333,33	64.833.333,33	64.833.333,33	388.999.999,98			
	16) IPTEK	263.170.533,33	263.170.533,33	1.105.818.033,33	263.170.533,33	263.170.533,33	263.170.533,33	2.421.870.699,98			
	17) Hukum	22.916.666,67	22.916.666,67	22.916.666,67	22.916.666,67	22.916.666,67	22.916.666,67	137.500.000,02			
	18) Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan	2.812.273.365,83	2.747.219.365,83	2.897.119.365,83	2.747.219.365,83	2.747.219.365,83	2.747.219.365,83	16.698.270.314,96			
	19) Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	45.916.666,67	45.916.666,67	45.916.666,67	45.916.666,67	45.916.666,67	45.916.666,67	275.500.000,02			

dilanjutkan

..... lanjutan 1

b. Pembangunan Menghasilkan Pendapatan (Directly Productivity Investment / DPI)	6.014.384.960,57	2.319.407.309,64	3.110.778.895,09	4.469.322.179,24	1.733.850.868,12	1.530.157.410,03	19.177.901.622,69
1) Industri	633.805.833,33	33.805.833,33	433.805.833,33	33.805.833,33	33.805.833,33	33.805.833,33	1.202.834.999,98
2) Pertanian dan Kehutanan	759.469.180,00	1.024.181.980,00	-	-	121.994.875,00	394.122.980,00	2.299.769.015,00
3) Sumber Daya Air dan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-
4) Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-
5) Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	3.665.593.227,67	644.904.727,67	1.644.904.727,67	644.904.727,67	644.904.727,67	644.904.727,67	7.890.116.866,02
6) Transportasi	337.049.900,00	176.652.900,00	337.049.900,00	337.049.900,00	588.949.450,00	160.397.000,00	1.935.149.050,00
7) Pertambangan dan Energi	-	-	-	-	-	-	-
8) Pariwisata dan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-
9) Pembangunan Daerah dan Pemukiman	492.691.130,90	164.230.376,97	410.575.942,42	131.394.301,57	246.345.565,45	197.076.452,36	1.642.303.769,67
10) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-
11) Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-
12) Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-
13) Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peran Wanita, Anak dan Remaja	125.775.688,67	275.631.491,67	284.442.491,67	99.850.416,67	99.850.416,67	99.850.416,67	985.400.922,02
14) Perumahan dan Pemukiman	-	-	-	3.222.327.000,00	-	-	3.222.327.000,00
15) Agama	-	-	-	-	-	-	-
16) IPTEK	-	-	-	-	-	-	-
17) Hukum	-	-	-	-	-	-	-
18) Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-
19) Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H	215.384.572.851,12	54.327.400.169,19	91.150.923.807,59	44.751.909.530,61	55.933.154.995,69	33.092.845.427,83	494.640.806.782,03

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Bagian Keuangan Sekretariat Kota Samarinda), Perhitungan APBD Tahun 2001 (Data diolah kembali)

Lampiran IIB : STRUKTUR BELANJA SETIAP KECAMATAN DALAM KOTA SAMARINDA TAHUN 2002

No	Struktur Pengeluaran	Kecamatan									Jumlah
		Samarinda Ilir	Samarinda Utara	Samarinda Ulu	Sungai Kunjang	Samarinda Seberang	Palaran				
B.	BELANJA / PENGGUNAAN DANA	189.267.659.063,92	82.761.112.499,42	139.367.530.306,45	78.428.731.630,42	94.854.351.996,73	55.909.425.917,87				620.588.811.414,81
	1. Belanja Rutin / Aparatur	96.463.267.491,48	34.045.859.114,64	70.926.873.155,50	25.534.394.335,98	42.557.323.893,30	14.185.774.631,10				263.715.492.622,00
	a. Gaji	51.365.101.653,14	18.135.918.230,82	37.783.162.980,25	13.601.938.672,89	22.669.897.788,15	7.556.632.596,05				151.132.651.921,00
	b. Barang	11.604.263.274,34	4.095.622.332,12	8.532.546.525,25	3.071.716.749,09	5.119.527.915,15	1.706.509.305,05				34.130.186.101,00
	c. Pemeliharaan	2.519.402.183,82	889.200.770,76	1.852.501.605,75	666.900.578,07	1.111.500.963,45	370.500.321,15				7.410.006.423,00
	d. Perjalanan Dinas	2.018.530.217,20	712.422.429,60	1.484.213.395,00	534.316.822,20	890.528.037,00	296.842.679,00				5.936.853.580,00
	e. Lain-lain	28.935.970.162,98	10.212.695.551,64	21.276.448.649,25	7.659.521.513,73	12.765.869.189,55	4.255.289.729,85				85.105.794.597,00
	2. Pembangunan / Publik	72.804.391.572,44	48.715.253.384,78	68.438.657.150,95	52.894.337.294,44	52.287.028.103,43	41.723.651.266,77				336.873.316.792,81
	a. Pembangunan Kepentingan Umum / Sosial (Social Overhead Capital : SOC)	67.391.176.537,78	43.128.024.293,12	64.177.909.317,62	49.497.351.161,11	41.757.934.370,10	37.916.552.720,11				303.868.948.399,84
	1) Industri	-	-	-	-	-	-				-
	2) Pertanian dan Kehutanan	704.374.733,33	1.161.844.000,00	682.727.000,00	-	704.374.733,33	1.183.491.733,33				4.436.812.189,99
	3) Sumber Daya Air dan Irigasi	1.604.253.530,00	1.604.253.530,00	1.604.253.530,00	1.604.253.530,00	1.604.253.530,00	1.604.253.530,00				9.625.521.180,00
	4) Tenaga Kerja	865.721.666,66	865.721.666,66	865.721.666,66	865.721.666,66	865.721.666,66	865.721.666,66				5.194.329.999,96
	5) Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	966.244.341,66	966.244.341,66	966.244.341,66	966.244.341,66	966.244.341,66	966.244.341,66				5.797.466.049,96
	6) Transportasi	5.909.919.740,33	5.829.919.740,33	7.602.128.930,33	5.829.919.740,33	7.522.128.930,33	5.829.919.740,33				38.523.936.821,98
	7) Pertambangan dan Energi	48.697.300,00	48.697.300,00	48.697.300,00	48.697.300,00	48.697.300,00	48.697.300,00				292.183.800,00
	8) Pariwisata dan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-				10.807.965.300,00
	9) Pembangunan Daerah dan Pemukiman	24.092.583.195,34	1.754.083.333,34	4.298.150.696,34	1.716.589.333,34	2.716.583.333,34	2.254.040.333,34				36.832.024.226,04
	10) Lingkungan Hidup dan Tala Ruang	9.241.445.723,80	11.306.746.008,80	9.452.138.908,80	4.657.443.252,46	4.868.136.437,46	5.573.669.702,46				45.099.580.033,78
	11) Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga	8.996.199.041,67	7.332.635.541,67	8.996.199.041,67	8.416.068.875,00	8.339.675.708,33	7.332.635.541,67				49.413.203.750,01
	12) Kependudukan dan Keluarga Berencana	124.998.333,33	24.998.333,33	124.998.333,33	24.998.333,33	24.998.333,33	24.998.333,33				349.989.999,96
	13) Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peran Wanita, Anak dan Remaja	1.618.104.340,83	1.618.104.340,83	1.618.104.340,83	1.618.104.340,83	1.618.104.340,83	1.618.104.340,83				9.708.626.044,98
	14) Perumahan dan Pemukiman	8.579.910.869,00	5.982.819.102,34	8.181.467.869,00	19.127.269.393,34	7.840.291.984,00	5.982.819.102,34				55.714.578.330,02
	15) Agama	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00				585.000.000,00
	16) IPTEK	204.775.000,00	204.775.000,00	1.906.350.455,00	204.775.000,00	204.775.000,00	204.775.000,00				2.930.225.465,00
	17) Hukum	33.333.333,33	33.333.333,33	33.333.333,33	33.333.333,33	33.333.333,33	33.333.333,33				199.999.999,98
	18) Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan	4.236.449.387,50	4.219.782.720,83	7.025.262.270,67	4.219.782.720,83	4.236.449.387,50	4.219.782.720,83				28.157.509.206,16
	19) Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	66.666.000,00	66.666.000,00	66.666.000,00	66.666.000,00	66.666.000,00	66.666.000,00				399.996.000,00

dilanjutkan

..... lanjutan 1

	b. Pembangunan Menghasilkan Pendapatan (Directly Productivity Investment / DPT)	5.413.215.034,66	5.587.229.091,66	4.260.747.833,33	3.396.986.133,33	10.539.093.733,33	3.807.096.566,66	33.004.370.392,97
1) Industri	248.695.000,00	-	248.695.000,00	-	-	248.695.000,00	-	746.085.000,00
2) Pertanian dan Kehutanan	1.050.198.901,33	2.574.636.158,33	105.066.700,00	-	-	105.066.700,00	689.857.033,33	4.524.825.492,99
3) Sumber Daya Air dan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	2.370.183.333,33	2.312.848.333,33	2.312.848.333,33	2.312.848.333,33	2.312.848.333,33	2.312.848.333,33	2.312.848.333,33	13.934.424.999,98
6) Transportasi	844.137.800,00	399.744.600,00	844.137.800,00	844.137.800,00	844.137.800,00	7.422.483.700,00	444.393.200,00	10.799.034.900,00
7) Perambangan dan Energi	-	-	-	-	-	-	-	-
8) Pariwisata dan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
9) Pembangunan Daerah dan Pemukiman	900.000.000,00	300.000.000,00	750.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	450.000.000,00	360.000.000,00	3.000.000.000,00
10) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-
11) Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	-
12) Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-
13) Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peran Wanita, Anak dan Remaja	-	-	-	-	-	-	-	-
14) Perumahan dan Pemukiman	-	-	-	-	-	-	-	-
15) Agama	-	-	-	-	-	-	-	-
16) IPTEK	-	-	-	-	-	-	-	-
17) Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-
18) Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-
19) Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	-	-	-	-	-	-	-	-
	169.267.659.063,92	82.761.112.499,42	139.367.530.306,45	78.428.731.630,42	94.854.351.996,73	55.909.425.917,87	620.588.811.414,81	
	J U M L A H							

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Bajian Keuangan Sekretariat Kota Samarinda), Perhitungan APBD Tahun 2002 (Data di olah kembali)

Lampiran IIIc : STRUKTUR BELANJA SETIAP KECAMATAN DALAM KOTA SAMARINDA TAHUN 2003

No	Struktur Pengeluaran	Kecamatan									Jumlah
		Samarinda Ilir	Samarinda Utara	Samarinda Ulu	Sungai Kunjang	Samarinda Seberang	Paliran				
B.	BELANJA (PENGUNAAN DANA	170.133.158.528,14	114.765.341.722,47	152.799.374.271,94	89.208.845.036,39	121.735.270.295,57	83.386.522.965,43	732.058.512.779,94			
	1. Belanja Rutin / Aparatur	73.793.813.165,62	26.044.875.234,92	54.260.156.739,42	19.533.656.426,20	32.566.064.043,65	10.652.031.347,88	217.040.626.957,69			
	a. Gaji	41.767.721.762,66	14.741.548.857,41	30.711.560.119,60	11.058.161.643,06	18.426.936.071,76	6.142.312.023,92	122.846.240.478,41			
	b. Barang	6.881.701.150,78	2.428.835.700,27	5.060.074.375,57	1.821.626.775,21	3.036.044.625,34	1.072.014.875,11	20.240.297.502,28			
	c. Pemeliharaan	2.330.438.185,38	822.507.594,84	1.713.557.489,25	616.860.696,13	1.028.134.493,55	342.711.497,85	6.854.229.957,00			
	d. Perjalanan Dinas	1.840.224.959,00	649.491.162,00	1.353.106.587,50	487.118.371,50	811.863.952,50	270.621.317,50	5.412.426.350,00			
	e. Lain-lain	20.973.727.107,80	7.402.491.920,40	15.421.858.167,50	5.551.868.940,30	9.253.114.900,50	3.084.371.633,50	61.687.432.670,00			
	2. Pembangunan / Publik	96.339.345.362,52	88.740.466.487,55	98.539.217.532,52	69.675.188.610,19	89.179.176.211,92	72.544.491.617,55	515.017.865.822,25			
	a. Pembangunan Kepentingan Umum / Sosial (Social Overhead Capital / SOC)	87.072.713.052,52	79.075.118.227,55	91.164.141.052,52	63.791.634.170,19	70.962.271.091,92	65.952.008.227,55	458.077.885.822,25			
	1) Industri										
	2) Perumahan dan Kehrutanan	1.667.190.000,00	2.749.740.000,00	1.615.740.000,00	-	1.667.190.000,00	2.800.140.000,00	10.500.000.000,00			
	3) Sumber Daya Air dan Irigasi	2.419.861.163,43	2.419.861.163,43	2.419.861.163,43	2.419.861.163,43	2.419.861.163,43	2.419.861.163,43	14.519.166.980,58			
	4) Tenaga Kerja	335.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00	2.010.000.000,00			
	5) Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	1.683.333.333,33	1.683.333.333,33	1.683.333.333,33	1.683.333.333,33	1.683.333.333,33	1.683.333.333,33	10.099.999.999,98			
	6) Transportasi	17.397.450.000,00	17.159.310.000,00	22.375.710.000,00	17.159.310.000,00	22.148.910.000,00	17.159.310.000,00	113.400.000.000,00			
	7) Pertambangan dan Energi	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	1.710.000.000,00			
	8) Pariwisata dan Telekomunikasi			2.140.000.000,00				2.140.000.000,00			
	9) Pembangunan Daerah dan Pemukiman	10.105.845.000,00	735.420.000,00	1.803.015.000,00	719.970.000,00	1.440.210.000,00	945.540.000,00	15.450.000.000,00			
	10) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	21.575.970.000,00	26.398.710.000,00	22.070.880.000,00	10.877.490.000,00	11.361.870.000,00	13.015.080.000,00	105.300.000.000,00			
	11) Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga	22.353.227.139,10	18.216.069.814,13	22.353.227.139,10	20.904.615.256,77	20.720.469.678,50	18.216.069.814,13	122.763.718.847,73			
	12) Kependudukan dan Keluarga Berencana	477.968.750,00	389.506.250,00	477.968.750,00	446.993.750,00	443.056.250,00	389.506.250,00	2.625.000.000,00			
	13) Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peran Wanita, Anak dan Remaja	3.552.500.000,00	3.552.500.000,00	3.552.500.000,00	3.552.500.000,00	3.552.500.000,00	3.552.500.000,00	21.315.000.000,00			
	14) Perumahan dan Pemukiman	167.860.000,00	117.284.000,00	160.012.000,00	374.197.000,00	153.363.000,00	117.284.000,00	1.090.000.000,00			
	15) Agama	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	780.000.000,00			
	16) IPTEK	222.229.000,00	222.229.000,00	206.885.000,00	222.229.000,00	222.229.000,00	222.229.000,00	3.180.000.000,00			
	17) Hukum	90.833.333,33	90.833.333,33	90.833.333,33	90.833.333,33	90.833.333,33	90.833.333,33	544.999.999,98			
	18) Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan	4.550.112.000,00	4.531.968.000,00	7.543.872.000,00	4.531.968.000,00	4.550.112.000,00	4.531.968.000,00	30.240.000.000,00			
	19) Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	58.333.333,33	58.333.333,33	58.333.333,33	58.333.333,33	58.333.333,33	58.333.333,33	349.999.999,98			

dilanjutkan

.....lanjutan I

b. Pembangunan Menghasilkan Pendapatan (Directly Productivity Investment / DPI)	9.266.632.310,00	9.665.348.260,00	7.375.076.480,00	5.883.554.440,00	18.216.905.120,00	6.592.483.390,00	57.000.000.000,00
1) Industri	429.400.000,00	-	429.400.000,00	-	429.400.000,00	-	1.288.200.000,00
2) Pertanian dan Kehutanan	1.813.791.870,00	4.446.564.300,00	181.301.040,00	-	181.301.040,00	1.191.741.750,00	7.814.700.000,00
3) Sumber Daya Air dan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-
4) Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-
5) Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	4.010.900.000,00	4.010.900.000,00	4.010.900.000,00	4.010.900.000,00	4.010.900.000,00	4.010.900.000,00	24.065.400.000,00
6) Transportasi	1.458.150.440,00	688.753.960,00	1.458.150.440,00	1.458.150.440,00	12.818.109.080,00	768.085.640,00	18.650.400.000,00
7) Pertambangan dan Energi	-	-	-	-	-	-	-
8) Pariwisata dan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-
9) Pembangunan Daerah dan Pemukiman	1.554.390.000,00	518.130.000,00	1.296.325.000,00	414.504.000,00	777.196.000,00	621.756.000,00	5.161.300.000,00
10) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-
11) Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olak Raga	-	-	-	-	-	-	-
12) Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-
13) Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peran Wanita, Anak dan Remaja	-	-	-	-	-	-	-
14) Perumahan dan Pemukiman	-	-	-	-	-	-	-
15) Agama	-	-	-	-	-	-	-
16) IPTEK	-	-	-	-	-	-	-
17) Hukum	-	-	-	-	-	-	-
18) Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-
19) Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H	170.133.158.528,14	114.785.341.722,47	152.799.374.271,94	89.208.845.036,39	121.735.270.255,57	83.396.522.965,43	732.058.512.779,94

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Bagian Keuangan Sekretariat Kota Samarinda), Perhitungan APBD Tahun 2003 (Data di olah kembali)

Lampiran IV : JUMLAH PENDUDUK PRIA DAN WANITA SETIAP
KECAMATAN DALAM KOTA SAMARINDA TAHUN 2001
S/D 2003.

(jwa)

No.	Kecamatan	2001			2002			2003		
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Samarinda Ilir	49.760	47.542	97.302	50.020	47.788	97.808	50.067	47.835	97.902
2.	Samarinda Utara	67.813	64.530	132.343	69.626	66.250	135.876	70.377	66.971	137.348
3.	Samarinda Ulu	52.937	49.754	102.691	53.644	50.419	104.063	56.033	52.664	108.697
4.	Sungai Kunjang	41.117	39.331	80.448	42.199	40.370	82.569	44.439	42.509	86.948
5.	Samarinda Seberang	40.025	40.089	80.114	40.955	41.025	81.980	44.526	44.598	89.124
6.	Palaran	18.707	18.162	36.869	18.991	18.439	37.430	19.737	19.162	38.899
	J U M L A H	270.359	259.408	529.767	275.435	264.291	539.726	285.179	273.739	558.918

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil) Tahun 2001 s/d 2003 (Data diolah)

Lampiran Va: PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR
HARGA KONSTAN 1993 KECAMATAN-KECAMATAN DI
KOTA SAMARINDA TAHUN 2001

(dalam juta)

No.	Lapangan Usaha	Kecamatan						Jumlah
		Samarinda Iir	Samarinda Utara	Samarinda Ulu	Sungai Kunjang	Samarinda Seberang	Palaran	
1.	Pertanian	567,55	20.169,63	105,89	14.486,86	529,33	7.587,70	43.446,96
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	18.048,32	6.016,11	-	-	-	24.064,43
3.	Industri Pengolahan	141.949,18	23.658,20	47.316,39	236.581,96	189.265,57	283.898,36	922.669,66
4.	Listrik, Gas & Air Minum	1.208,36	805,57	38.241,37	1.611,14	805,57	805,57	43.477,58
5.	Bangunan	46.208,80	15.402,93	38.507,33	11.552,20	19.253,67	3.850,73	134.775,66
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	374.111,88	84.189,79	353.959,31	68.495,80	50.800,44	17.429,99	948.987,21
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	56.005,50	81.437,96	67.171,02	132.732,34	67.152,95	4.885,22	409.384,99
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	70.102,84	54.621,85	104.230,45	34.777,21	35.177,70	15.539,66	314.449,71
9.	Jasa - Jasa	62.063,83	46.726,12	44.851,82	30.517,24	30.465,64	23.784,99	238.409,64
	PDRB	752.217,94	345.060,37	700.399,69	538.754,75	393.450,67	357.782,22	3.079.665,84

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Badan Pusat Statistik) Tahun 2001 (Data diolah)

Lampiran Vb: PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 KECAMATAN-KECAMATAN DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2002

(dalam juta)

No.	Lapangan Usaha	Kecamatan						Jumlah
		Samarinda Iir	Samarinda Utara	Samarinda Ulu	Sungai Kunjang	Samarinda Seberang	Palaran	
1.	Pertanian	581,33	20.599,44	106,50	14.795,03	545,83	7.748,09	44.376,22
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	20.494,64	6.831,55	-	-	-	27.326,19
3.	Industri Pengolahan	153.840.901,11	25.706.834,58	51.313.642,57	256.468.186,25	205.154.543,68	307.781.828,81	1.000.265.937,00
4.	Listrik, Gas & Air Minum	1.688.889,79	1.263.234,64	40.702.701,63	2.114.544,54	-	-	45.769.371,80
5.	Bangunan	47.756.124,66	15.918.708,22	39.789.806,98	11.935.549,38	19.901.867,06	3.969.231,70	139.271.288,00
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	436.490.510,79	98.215.901,34	413.016.135,27	79.945.750,58	59.239.579,72	20.373.986,30	1.107.281.864,80
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	68.577.789,52	99.708.496,61	82.263.269,45	162.521.340,37	82.263.269,45	5.965.465,60	501.299.631,00
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	73.579.310,28	57.338.385,81	109.428.180,17	36.509.070,06	36.938.200,18	16.306.944,50	330.100.091,00
9.	Jasa - Jasa	69.948.334,78	53.798.143,00	50.546.606,88	34.396.415,10	33.214.038,33	26.818.454,90	268.721.992,99
	P D R B	851.882.442,26	351.990.798,28	787.067.281,00	583.905.651,71	436.712.844,25	381.223.659,90	3.392.761.877,40

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Badan Pusat Statistik) Tahun 2002 (Data diolah)

Lampiran Vc: PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 KECAMATAN-KECAMATAN DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2003

(dalam juta)

No.	Lapangan Usaha	Kecamatan						Jumlah
		Samarinda Ilir	Samarinda Utara	Samarinda Ulu	Sungai Kunjang	Samarinda Seberang	Palaran	
1.	Pertanian	593,05	21.014,90	108,65	15.093,43	556,84	7.904,36	45.271,23
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	22.733,47	7.577,82	-	-	-	30.311,29
3.	Industri Pengolahan	185.983.774,44	31.077.912,89	62.034.900,05	310.053.574,54	248.018.674,49	372.088.474,59	1.209.257.311,00
4.	Listrik, Gas & Air Minum	1.797.815,45	1.344.707,49	43.327.839,64	2.250.923,42	-	-	48.721.286,00
5.	Bangunan	58.208.519,38	19.402.839,79	48.498.511,81	14.547.886,01	24.257.793,58	4.837.978,43	169.753.629,00
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	538.988.206,19	121.279.182,87	510.001.524,38	98.718.793,73	73.150.352,69	25.158.252,14	1.367.296.312,00
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	83.827.826,98	121.881.248,44	100.556.625,78	198.662.145,51	100.556.625,78	7.292.040,51	612.776.513,00
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	78.061.878,77	60.831.531,37	116.094.718,76	38.733.260,62	39.188.534,02	17.300.389,46	350.210.313,00
9.	Jasa - Jasa	77.145.025,36	59.333.208,13	55.747.135,12	37.935.317,89	36.631.291,34	29.577.693,16	296.369.671,00
	PDRB	1.024.013.639,62	415.194.379,35	936.269.042,01	700.916.995,15	521.803.828,74	456.262.732,65	4.054.460.617,52

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Badan Pusat Statistik) Tahun 2003 (Data diolah)

Lampiran VIa : PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR
HARGA BERLAKU KECAMATAN - KECAMATAN DI
KOTA SAMARINDA TAHUN 2001

(dalam juta)

No.	Lapangan Usaha	Kecamatan						Jumlah
		Samarinda Ilir	Samarinda Utara	Samarinda Ulu	Sungai Kunjang	Samarinda Seberang	Paikaran	
1.	Pertanian	2.242,33	71.930,81	409,83	52.688,38	2.129,14	28.085,50	157.485,99
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	49.374,28	16.458,09	-	-	-	65.832,37
3.	Industri Pengolahan	324.297,10	54.049,52	108.099,03	540.495,16	432.396,13	648.594,19	2.107.931,13
4.	Listrik, Gas & Air Minum	2.451,76	1.634,51	91.788,92	3.269,01	1.634,51	1.634,51	102.413,22
5.	Bangunan	100.269,30	33.423,10	83.557,75	25.067,33	41.778,88	8.355,78	292.452,14
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	596.640,27	164.015,38	561.601,01	123.104,77	99.120,68	35.600,64	1.580.082,75
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	112.060,97	147.640,79	133.423,42	269.111,90	135.417,95	9.209,02	806.863,45
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	197.020,35	146.596,80	298.034,04	93.803,30	95.037,70	41.801,75	872.293,94
9.	Jasa - Jasa	171.778,11	111.623,80	116.949,68	77.288,06	77.200,96	65.923,81	620.764,42
	PDRB	1.506.760,19	780.288,99	1.410.321,77	1.184.827,31	884.715,95	839.205,20	6.606.119,41

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil) Tahun 2001 (Data diolah)

Lampiran Vlb : PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU KECAMATAN - KECAMATAN DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2002

(dalam juta)

No.	Lapangan Usaha	Kecamatan						Jumlah
		Samarinda Ilir	Samarinda Utara	Samarinda Ulu	Sungai Kunjang	Samarinda Seberang	Palaran	
1.	Pertanian	2.193.974,00	77.743.751,00	401.949,00	56.837.498,00	2.043.243,00	29.241,83	138.249.656,83
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	52.695,75	17.565,25	-	-	-	70.261,00
3.	Industri Pengolahan	374.702.228,00	623.777.161,00	124.981.952,00	624.656.133,00	499.684.180,00	749.648.085,00	2.997.458.738,00
4.	Listrik, Gas & Air Minum	2.929.610,00	1.949.561,00	92.756.943,00	3.909.680,00	1.665.030,00	1.949.561,00	105.160.365,00
5.	Bangunan	108.110.780,00	36.036.927,00	90.076.553,00	27.019.813,00	45.054.040,00	9.017.114,00	315.315.227,00
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	724.248.330,00	162.965.061,00	685.298.395,00	132.650.252,00	98.293.469,00	33.805.604,00	1.837.281.111,00
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	132.864.434,00	193.177.894,00	159.379.047,00	314.873.169,00	159.379.047,00	11.557.652,00	971.231.243,00
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	200.991.543,00	156.627.326,00	298.917.436,00	99.729.316,00	100.901.542,00	44.544.559,00	901.711.722,00
9.	Jasa - Jasa	195.279.752,00	150.192.111,00	141.114.566,00	95.026.924,00	95.876.882,00	74.870.992,00	753.364.227,00
	P D R B	1.741.320.651,00	1.402.522.487,75	1.592.944.406,25	1.354.712.765,00	1.002.897.433,00	925.422.808,83	8.019.820.551,83

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil) Tahun 2002 (Data diolah)

Lampiran VIc : PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU KECAMATAN - KECAMATAN DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2003

(dalam juta)

No.	Lapangan Usaha	Kecamatan						Jumlah
		Samarinda Ilir	Samarinda Utara	Samarinda Ulu	Sungai Kunjang	Samarinda Seberang	Palaran	
1.	Pertanian	2.299,88	81.496,34	421,35	58.532,70	2.141,87	30.653,30	175.545,44
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	56.535,75	18.845,25	-	-	-	75.381,00
3.	Industri Pengolahan	420.943.404,62	70.066.002,00	140.405.699,00	701.754.804,00	561.349.104,00	842.160.504,00	2.736.679.517,62
4.	Listrik, Gas & Air Minum	3.064.428,50	2.039.277,00	97.025.538,00	4.089.579,00	1.741.653,00	2.039.277,00	109.999.752,50
5.	Bangunan	125.426.566,00	41.808.855,00	104.503.849,00	31.347.497,00	52.270.213,00	10.451.358,00	365.818.338,00
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	822.841.016,00	185.149.665,00	778.588.785,00	150.708.070,00	111.674.262,00	38.407.596,00	2.067.369.394,00
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	136.148.458,00	197.952.692,00	163.318.435,00	322.655.921,00	163.318.435,00	11.843.323,00	995.237.264,00
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	209.018.178,00	162.882.268,00	310.854.761,00	103.712.025,00	104.931.064,00	46.323.454,00	937.721.750,00
9.	Jasa - Jasa	205.708.918,00	158.213.313,00	148.650.970,00	101.155.366,00	100.997.309,00	78.869.573,00	793.595.448,00
	P D R B	1.923.153.269,00	818.250.104,09	1.743.367.303,60	1.415.461.793,70	1.096.204.161,87	1.030.135.730,30	8.026.672.390,56

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil) Tahun 2003 (Data diolah)

Lampiran VIIa : KESEMPATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA
SETIAP KECAMATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2001

(jawa)

No.	Lapangan Usaha	Kecamatan						Jumlah
		Samarinda Ilir	Samarinda Utara	Samarinda Ulu	Sungai Kunjang	Samarinda Seberang	Palaran	
1.	Pertanian	1.305	10.443	1.305	2.611	3.916	6.527	26.107
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	1.117	638	-	-	-	1.755
3.	Industri Pengolahan	2.290	916	4.581	11.451	3.664	22.903	45.805
4.	Listrik, Gas & Air Minum	51	31	515	103	72	257	1.029
5.	Bangunan	5.163	1.721	4.303	1.205	2.582	2.237	17.211
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	28.274	3.534	21.205	2.121	4.948	10.603	70.685
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6.134	767	4.600	460	1.073	2.300	15.334
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2.317	290	1.738	174	405	869	5.793
9.	Jasa - Jasa	22.713	2.839	17.035	1.703	3.975	8.517	56.782
JUMLAH		68.247	21.658	55.920	19.828	20.635	54.213	240.501

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Dinas Tenaga Kerja) Tahun 2001 (Data diolah)

Lampiran VIIb : KESEMPATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA
SETIAP KECAMATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2002

(jwa)

No.	Lapangan Usaha	Kecamatan						Jumlah
		Samarinda Iir	Samarinda Ularu	Samarinda Ulu	Sungai Kurjang	Samarinda Seberang	Palaran	
1.	Pertanian	1.296	10.369	1.296	2.592	3.888	6.481	25.922
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	1.147	656	-	-	-	1.803
3.	Industri Pengolahan	2.273	909	4.545	11.363	3.636	22.726	45.452
4.	Listrik, Gas & Air Minum	52	31	525	105	73	262	1.048
5.	Bangunan	5.062	1.687	4.219	1.181	2.531	2.194	16.874
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	28.164	3.521	21.123	2.112	4.929	10.562	70.411
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5.984	748	4.488	449	1.047	2.244	14.960
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2.247	281	1.685	169	393	843	5.618
9.	Jasa - Jasa	22.471	2.809	16.853	1.685	3.932	8.427	56.177
	JUMLAH	67.549	21.502	55.390	19.656	20.429	53.739	238.265

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Dinas Tenaga Kerja) Tahun 2002 (Data diolah)

Lampiran VIIc : KESEMPATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA
SETIAP KECAMATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2003

(jawa)

No.	Lapangan Usaha	Kecamatan						Jumlah
		Samarinda Ilir	Samarinda Utara	Samarinda Ulu	Sungai Kunjang	Samarinda Seberang	Palaran	
1.	Pertanian	1.273	10.184	1.273	2.546	3.819	6.365	25.460
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	1.166	666	-	-	-	1.832
3.	Industri Pengolahan	2.231	892	4.461	11.154	3.569	22.307	44.614
4.	Listrik, Gas & Air Minum	53	32	529	106	74	263	1.057
5.	Bangunan	4.909	1.636	4.091	1.145	2.455	2.128	16.364
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	27.752	3.469	20.814	2.080	4.856	10.408	69.379
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5.775	722	4.331	433	1.011	2.165	14.437
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2.156	270	1.617	162	377	808	5.390
9.	Jasa - Jasa	21.981	2.749	16.493	1.649	3.848	8.248	54.978
	JUMLAH	66.140	21.120	54.275	19.275	20.009	52.692	233.511

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Dinas Tenaga Kerja) Tahun 2003 (Data diolah)

Lampiran VIIIa : PENDUDUK 5 TAHUN KE ATAS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN SETIAP KECAMATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2001

(jwa)

No.	Tingkat Pendidikan	Kecamatan						Jumlah
		Samarinda Ilir	Samarinda Utara	Samarinda Ulu	Sungai Kunjang	Samarinda Seberang	Palaran	
1.	Tidak / Belum Tamat	15.327	22.660	22.498	14.789	17.761	8.419	101.454
2.	SD / MI	20.614	21.629	22.802	15.167	18.065	7.375	105.652
3.	SLTP / MTs	17.164	22.780	14.921	13.485	16.700	7.961	93.011
4.	SMU / SMK / MA	18.538	31.469	20.686	18.240	19.606	7.027	115.566
5.	Perguruan Tinggi	3.756	14.296	9.582	6.574	1.720	403	36.331
	JUMLAH	75.399	112.834	90.489	68.255	73.852	31.185	452.014

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Dinas Pendidikan) Tahun 2001 (Data diolah)

Lampiran VIIIb : PENDUDUK 5 TAHUN KE ATAS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN SETIAP KECAMATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2002

(jwa)

No.	Tingkat Pendidikan	Kecamatan						Jumlah
		Samarinda Ilir	Samarinda Utara	Samarinda Ulu	Sungai Kunjang	Samarinda Seberang	Palaran	
1.	Tidak / Belum Tamat	15.930	23.556	23.386	15.368	18.463	8.753	105.456
2.	SD / MI	28.508	22.244	23.442	15.595	18.576	7.589	115.954
3.	SLTP / MTs	18.054	23.982	15.682	14.177	17.561	8.343	97.799
4.	SMU / SMK / MA	21.742	36.903	24.253	21.385	16.627	8.235	129.145
5.	Perguruan Tinggi	4.055	15.433	7.470	7.098	1.857	434	36.347
	JUMLAH	88.289	122.118	94.233	73.623	73.084	33.354	484.701

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Dinas Pendidikan) Tahun 2002 (Data diolah)

Lampiran VIIIc : PENDUDUK 5 TAHUN KE ATAS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN SETIAP KECAMATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2003

(jwa)

No.	Tingkat Pendidikan	Kecamatan						Jumlah
		Samarinda Ilir	Samarinda Ular	Samarinda Ulu	Sungai Kunjang	Samarinda Seberang	Palaran	
1.	Tidak / Belum Tamat	16.485	24.529	24.210	15.905	19.107	9.042	109.278
2.	SD / MI	21.637	36.129	23.933	15.920	18.962	7.741	124.322
3.	SLTP / MTs	18.477	24.522	16.062	14.516	17.678	8.570	99.825
4.	SMU / SMK / MA	22.405	38.034	25.001	22.046	23.790	8.494	139.770
5.	Perguruan Tinggi	4.169	15.868	10.698	7.297	1.909	447	40.388
	JUMLAH	83.173	139.082	99.904	75.684	81.446	34.294	513.583

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Dinas Pendidikan) Tahun 2003 (Data diolah)

Lampiran IX : ANGKA RATA-RATA USIA HARAPAN HIDUP PRIA DAN WANITA SETIAP KECAMATAN SE KOTA SAMARINDA TAHUN 2001 S/D 2003

(jiwa)

No.	Kecamatan	2001		2002		2003	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1.	Samarinda Ilir	64	68	65	69	66	69
2.	Samarinda Utara	64	69	65	69	66	69
3.	Samarinda Ulu	64	68	65	68	67	68
4.	Sungai Kunjang	65	69	66	69	67	69
5.	Samarinda Seberang	65	69	66	69	66	69
6.	Palaran	66	70	67	69	68	70
	Jumlah	388	413	394	413	400	414
	Rata-Rata	65	69	66	69	67	69

Sumber Data : Pemerintah Kota Samarinda (Dinas Kesehatan) Tahun 2001 s/d 2003 (Data diolah)

Lampiran X : Analisis Faktor Konfirmatori**A. Dimensi Tenaga Kerja****Factor Analysis**

Communalities		
	Initial	Extraction
Pekerja Pertanian	1,000	,481
Pekerja Pertambangan dan Penggalian	1,000	,032
Pekerja Industri Pengolahan	1,000	,049
Pekerja Listrik, Gas dan Air Minum	1,000	,176
Pekerja Bangunan	1,000	,950
Pekerja Perdagangan Hotel dan Restoran	1,000	,975
Pekerja Pengangkutan dan Komunikasi	1,000	,975
Pekerja Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,000	,975
Pekerja Jasa-Jasa	1,000	,975

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained						
Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	5,589	62,104	62,104	5,589	62,104	62,104
2	1,644	18,267	80,372			
3	1,097	12,185	92,557			
4	,610	6,779	99,336			
5	,059	,652	99,988			
6	,001	,011	99,999			
7	,000	,001	100,000			
8	2,451E-08	2,723E-07	100,000			
9	3,162E-09	3,514E-08	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

dilanjutkan

..... lanjutan 1

Component Matrix(a)	
	Component 1
Pekerja Pertanian	-,693
Pekerja Pertambangan dan Penggalian	-,179
Pekerja Industri Pengolahan	-,222
Pekerja Listrik, Gas dan Air Minum	,420
Pekerja Bangunan	,975
Pekerja Perdagangan Hotel dan Restoran	,987
Pekerja Pengangkutan dan Komunikasi	,987
Pekerja Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	,987
Pekerja Jasa-Jasa	,988
Extraction Method: Principal Component Analysis.	
a 1 components extracted.	

B. Dimensi Pendidikan

Factor Analysis

Communalities		
	Initial	Extraction
Tidak / Belum Tamat	1,000	,870
SD / MI	1,000	,851
SLTP / MTs	1,000	,348
SMU / SMK / MA	1,000	,898
Perguruan Tinggi	1,000	,737
Extraction Method: Principal Component Analysis.		

dilanjutkan.....

..... lanjutan 2

Total Variance Explained						
Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3,705	74,098	74,098	3,705	74,098	74,098
2	,878	17,565	91,663			
3	,193	3,861	95,524			
4	,147	2,931	98,455			
5	,077	1,545	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix(a)	
	Component
	1
Tidak / Belum Tamat	,933
SD / MI	,922
SLTP / MTs	,590
SMU / SMK / MA	,948
Perguruan Tinggi	,859

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

C. Variabel Struktur Pendapatan

Factor Analysis

Communalities		
	Initial	Extraction
PAD	1,000	,882
DANA PERIMBANGAN Provinsi	1,000	,803
DANA PERIMBANGAN Pusat	1,000	,704

Extraction Method: Principal Component Analysis.

dilanjutkan

..... lanjutan 3

Total Variance Explained						
Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,390	79,651	79,651	2,390	79,651	79,651
2	,439	14,647	94,298			
3	,171	5,702	100,000			
Extraction Method: Principal Component Analysis.						

Component Matrix(a)	
	Component
	1
PAD	,939
DANA PERIMBANGAN Provinsi	,896
DANA PERIMBANGAN Pusat	,839
Extraction Method: Principal Component Analysis.	
a 1 components extracted.	

D. Variabel Struktur Belanja

Factor Analysis

Communalities		
	Initial	Extraction
RUTIN	1,000	,536
SOC	1,000	,808
DPI	1,000	,421
Extraction Method: Principal Component Analysis.		

Total Variance Explained						
Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1,765	58,821	58,821	1,765	58,821	58,821
2	,882	29,408	88,229			
3	,353	11,771	100,000			
Extraction Method: Principal Component Analysis.						

dilanjutkan

..... lanjutan 4

Component Matrix(a)	
	Component
	1
RUTIN	,732
SOC	,899
DPI	,649
Extraction Method: Principal Component Analysis.	
a 1 components extracted.	

E. Variabel Kemandirian Wilayah

Factor Analysis

Communalities		
	Initial	Extraction
PAD/APBD	1,000	,075
APBD/PDRB Harga Konstan	1,000	,931
PAD/PDRB Harga Konstan	1,000	,829
Extraction Method: Principal Component Analysis.		

Total Variance Explained						
Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1,835	61,171	61,171	1,835	61,171	61,171
2	1,029	34,285	95,456			
3	,136	4,544	100,000			
Extraction Method: Principal Component Analysis.						

dilanjutkan

..... lanjutan 5

Component Matrix(a)	
	Component
	1
PAD/APBD	-.273
APBD/PDRB Harga Konstan	,965
PAD/PDRB Harga Konstan	,911
Extraction Method: Principal Component Analysis.	
a 1 components extracted.	

F. Variabel Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi

Factor Analysis

Communalities		
	Initial	Extraction
PDRB Harga Konstan	1,000	,651
PENDAPATAN PER KAPITA Harga Konstan	1,000	,931
Tenaga Kerja	1,000	,025
Pendidikan	1,000	,138
Kesehatan (Harapan Hidup)	1,000	,569
Extraction Method: Principal Component Analysis.		

Total Variance Explained						
Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,313	46,264	46,264	2,313	46,264	46,264
2	1,585	31,702	77,966			
3	,933	18,662	96,628			
4	,111	2,217	98,845			
5	,058	1,155	100,000			
Extraction Method: Principal Component Analysis.						

dilanjutkan

..... lanjutan 6

	Component
	1
PDRB Harga Konstan	,807
PENDAPATAN PER KAPITA Harga Konstan	,965
Tenaga Kerja	,158
Pendidikan	-,371
Kesehatan (Harapan Hidup)	,754
Extraction Method: Principal Component Analysis.	
A 1 components extracted.	

Lampiran XI : Curve Fit**Curve Fit**

MODEL: MOD_1.

Independent Variable: STPNRM Minimum value: -1,08
 The independent variable contains non-positive values. Models LOGARITHMIC and POWER cannot be calculated.

Variable: STPNGLR Minimum value: -1,48826
 This variable contains non-positive values. Log transform cannot be applied. Models COMPOUND, POWER, S, GROWTH, EXPONENTIAL and LGSTIC cannot be calculated.

Independent: STPNRM

	Dependent	Mth	Rsq	d.f.	F	Sigf	b0	b1	b2	b3
	STPNGLR	LIN	,582	16	22,31	,000	-1,E-16	,7631		
12	STPNGLR	LOG								
	STPNGLR	INV	,180	16	3,52	,079	-,0586	,1360		
	STPNGLR	QUA	,606	15	11,53	,001	,1509	,9034	-,1598	
	STPNGLR	CUB	,616	14	7,49	,003	,0513	1,0300	,0490	-,1177
1	STPNGLR	COM								
1	STPNGLR	POW								
1	STPNGLR	S								
1	STPNGLR	GRO								
1	STPNGLR	EXP								

Notes:

- 1 Dependent variable has non-positive values; no equation estimated.
 12 Independent variable has non-positive values.

Curve Fit

MODEL: MOD_2.

Independent Variable: STPNRM Minimum value: -1,08
 The independent variable contains non-positive values. Models LOGARITHMIC and POWER cannot be calculated.

Variable: KMDRWIL Minimum value: -,89549
 This variable contains non-positive values. Log transform cannot be applied. Models COMPOUND, POWER, S, GROWTH, EXPONENTIAL and LGSTIC cannot be calculated.

..... lanjutan 1

Independent: STPNRM

	Dependent	Mth	Rsqr	d.f.	F	Sigf	b0	b1	b2	b3
	KMDRWIL	LIN	,070	16	1,20	,290	1,1E-16	-,2637		
12	KMDRWIL	LOG								
	KMDRWIL	INV	,012	16	,19	,668	,0150	-,0348		
	KMDRWIL	QUA	,101	15	,84	,450	,1747	-,1013	-,1850	
	KMDRWIL	CUB	,102	14	,53	,669	,2058	-,1408	-,2501	,0367
1	KMDRWIL	COM								
1	KMDRWIL	POW								
1	KMDRWIL	S								
1	KMDRWIL	GRO								
1	KMDRWIL	EXP								

Notes:

- 1 Dependent variable has non-positive values; no equation estimated.
 12 Independent variable has non-positive values.

Curve Fit

MODEL: MOD_3.

Independent Variable: STPNGLR Minimum value: -1,49
 The independent variable contains non-positive values. Models
 LOGARITHMIC
 and POWER cannot be calculated.

Variable: KMDRWIL Minimum value: -,89549
 This variable contains non-positive values. Log transform cannot be
 applied. Models COMPOUND, POWER, S, GROWTH, EXPONENTIAL and LGSTIC
 cannot
 be calculated.

Independent: STPNGLR

	Dependent	Mth	Rsqr	d.f.	F	Sigf	b0	b1	b2	b3
	KMDRWIL	LIN	,152	16	2,86	,110	5,8E-17	-,3895		
12	KMDRWIL	LOG								
	KMDRWIL	INV	,049	16	,82	,379	-,0325	-,1037		
	KMDRWIL	QUA	,609	15	11,68	,101	-,7358	-,6036	,7790	
	KMDRWIL	CUB	,655	14	8,87	,102	-,6846	-1,0163	,6557	,2519
1	KMDRWIL	COM								
1	KMDRWIL	POW								
1	KMDRWIL	S								
1	KMDRWIL	GRO								
1	KMDRWIL	EXP								

Notes:

- 1 Dependent variable has non-positive values; no equation estimated.
 12 Independent variable has non-positive values.

dilanjutkan

..... lanjutan 2

Curve Fit

MODEL: MOD_4.

Independent Variable: STPNGLR Minimum value: -1,49
 The independent variable contains non-positive values. Models
 LOGARITHMIC
 and POWER cannot be calculated.

Variable: PKBBOSEK Minimum value: -1,49470
 This variable contains non-positive values. Log transform cannot be
 applied. Models COMPOUND, POWER, S, GROWTH, EXPONENTIAL and LGSTIC
 cannot
 be calculated.

Independent: STPNGLR

	Dependent	Mth	Rsq	d.f.	F	Sigf	b0	b1	b2	b3
	PKBBOSEK	LIN	,069	16	1,19	,291	2,8E-15	,2634		
12	PKBBOSEK	LOG								
	PKBBOSEK	INV	,000	16	1,8E-03	,967	-,0015	-,0049		
	PKBBOSEK	QUA	,196	15	1,83	,195	,3869	,3760	-,4097	
	PKBBOSEK	CUB	,262	14	1,66	,221	,3256	,8709	-,2617	-,3020
1	PKBBOSEK	COM								
1	PKBBOSEK	POW								
1	PKBBOSEK	S								
1	PKBBOSEK	GRO								
1	PKBBOSEK	EXP								

Notes:

- 1 Dependent variable has non-positive values; no equation estimated.
 12 Independent variable has non-positive values.

Curve Fit

MODEL: MOD_5.

Independent Variable: KMDRWL Minimum value: -,90
 The independent variable contains non-positive values. Models
 LOGARITHMIC
 and POWER cannot be calculated.

Variable: PKBBOSEK Minimum value: -1,49470
 This variable contains non-positive values. Log transform cannot be
 applied. Models COMPOUND, POWER, S, GROWTH, EXPONENTIAL and LGSTIC
 cannot
 be calculated.

dilanjutkan

..... lanjutan 3

Independent: KMDRWL

	Dependent	Mth	Rsq	d.f.	F	Sigf	b0	b1	b2	b3
	PKBSEK	LIN	,607	16	24,68	,000	2,7E-15	-,7789		
12	PKBSEK	LOG								
	PKBSEK	INV	,526	16	17,73	,001	-,4618	-,5922		
	PKBSEK	QUA	,676	15	15,63	,000	-,5170	-1,2054	,5474	
	PKBSEK	CUB	,687	14	10,23	,001	-,3695	-1,3726	,1997	,2458
1	PKBSEK	COM								
1	PKBSEK	POW								
1	PKBSEK	S								
1	PKBSEK	GRO								
1	PKBSEK	EXP								

Notes:

- 1 Dependent variable has non-positive values; no equation estimated.
 12 Independent variable has non-positive values.

Lampiran XII : Hasil Analisis Diskriptif

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
PAD	18	1440170011,53	19589848100,16	130673658597,89	7259647699,8828	5762172625,34234
DANA PERIMBANGAN Provinsi	18	3425430704,04	19991035966,40	147675257840,73	8204180991,1517	4096314193,08897
DANA PERIMBANGAN Pusat	18	41508953619,93	108589291783,69	1321627075070,81	73423726392,8228	22990165480,44302
Valid N (listwise)	18					

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Prosentase Penerimaan dari PAD	18	2,32	14,53	7,4983	3,77496
Prosentase Penerimaan dari Perimbangan Provinsi	18	5,17	14,44	9,2452	2,92042
Prosentase Penerimaan dari Perimbangan Pusat	18	71,89	91,21	83,2564	5,64264
Valid N (listwise)	18				

Means

Report Mean

TAHUN	PAD	DANA PERIMBANGAN Provinsi	DANA PERIMBANGAN Pusat
2001	4996312497,6667	7681686084,1667	64177665070,4967
2002	7584503650,5000	5785938831,3800	72387741919,9517
2003	9198126951,4817	11144918057,9083	83705772188,0200
Total	7259647699,8828	8204180991,1517	73423726392,8228

dilanjutkan

..... lanjutan 1

Means

Report Mean

TAHUN	Prosentase Penerimaan dari PAD	Prosentase Penerimaan dari Perimbangan Provinsi	Prosentase Penerimaan dari Perimbangan Pusat
2001	6,1900	10,2623	83,5477
2002	8,1021	6,8587	85,0392
2003	8,2030	10,6146	81,1824
Total	7,4983	9,2452	83,2564

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
RUTIN	18	10852031347,88	96463267491,48	724096147919,06	40227563773,2811	25334571570,03573
SOC	18	20181984800,83	133434578255,16	1014064143042,06	56336896835,6700	30058103483,51413
DPI	18	1530157410,03	19849395950,00	114337518078,32	6352084337,6844	4394607443,38723
Valid N (listwise)	18					

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Prosentase Pengeluaran Belanja Rutin	18	13,01	61,26	38,7731	13,84781
Prosentase Pengeluaran SOC	18	35,33	79,09	54,8237	12,70165
Prosentase Pengeluaran DPI	18	2,79	16,09	6,4032	3,49928
Valid N (listwise)	18				

dilanjutkan

..... lanjutan 2

Means

Report Mean			
TAHUN	RUTIN	SOC	DPI
2001	37223338056,5617	42020479469,9950	3196316937,1150
2002	47285915437,0000	50644824733,3067	5815772465,9383
2003	36173437826,2817	76345386303,7083	10044163610,0000
Total	40227563773,2811	56336896835,6700	6352084337,6844

Means

Report Mean			
TAHUN	Prosentase Pengeluaran Belanja Rutin	Prosentase Pengeluaran SOC	Prosentase Pengeluaran DPI
2001	47,3997	47,9028	4,6975
2002	41,8384	52,0303	6,1313
2003	27,0812	64,5379	8,3809
Total	38,7731	54,8237	6,4032

Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD/APBD	18	,02	,12	,0646	,03029
APBD/PDRB Harga Konstan	18	,00	,26	,0560	,08618
APBD/PDRB Harga Berlaku	18	,00	,11	,0255	,03886
PAD/PDRB Harga Konstan	18	,00	,01	,0029	,00471
PAD/PDRB Harga Berlaku	18	,00	,01	,0014	,00227
Valid N (listwise)	18				

dilanjutkan

..... lanjutan 3

Report
Mean

TAHUN	PAD/APBD	APBD/PDRB Harga Konstan	APBD/PDRB Harga Berlaku	PAD/PDRB Harga Konstan	PAD/PDRB Harga Berlaku
2001	,0576	,1675	,0764	,0087	,0041
2002	,0666	,0002	,0001	,0000	,0000
2003	,0695	,0002	,0001	,0000	,0000
Total	,0646	,0560	,0255	,0029	,0014

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB Harga Konstan	18	345060,37	1024013639,62	413906786,7033	354107264,59090
PDRB Harga Berlaku	18	780288,99	1923153269,00	891838836,7667	710898989,09932
Jumlah Penduduk Pria	18	18707	70377	46165,17	15624,240
Jumlah Penduduk Wanita	18	18162	66971	44302,11	14618,971
Jumlah Penduduk	18	36869,00	137348,00	90467,2778	30231,44933
PENDAPATAN PER KAPITA Harga Konstan	18	2,61	11729,42	4957,0792	4264,53394
PENDAPATAN PER KAPITA Harga Berlaku	18	5,90	26482,32	10754,6558	9082,25284
Valid N (listwise)	18				

dilanjutkan

..... lanjutan 4

Means

Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PDRB Harga Konstan * TAHUN	18	100,0%	0	,0%	18	100,0%
PDRB Harga Berlaku * TAHUN	18	100,0%	0	,0%	18	100,0%
Jumlah Penduduk Pria * TAHUN	18	100,0%	0	,0%	18	100,0%
Jumlah Penduduk Wanita * TAHUN	18	100,0%	0	,0%	18	100,0%
Jumlah Penduduk * TAHUN	18	100,0%	0	,0%	18	100,0%
PENDAPATAN PER KAPITA Harga Konstan * TAHUN	18	100,0%	0	,0%	18	100,0%
PENDAPATAN PER KAPITA Harga Berlaku * TAHUN	18	100,0%	0	,0%	18	100,0%

Report
Mean

TAHUN	PDRB Harga Konstan	PDRB Harga Berlaku	Jumlah Penduduk Pria	Jumlah Penduduk Wanita	Jumlah Penduduk	PENDAPATAN PER KAPITA Harga Konstan	PENDAPATAN PER KAPITA Harga Berlaku
1	513277,6233	1101019,9017	45059,83	43234,67	88294,5000	6,3952	13,9413
2	565463646,2333	1336636758,6383	45905,83	44048,50	89954,3333	6907,9011	16132,9346
3	675743436,2533	1337778731,7600	47529,83	45623,17	93153,0000	7956,9412	16117,0916
4	413906786,7033	891838836,7667	46165,17	44302,11	90467,2778	4957,0792	10754,6558

dilanjutkan

..... lanjutan 5

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pekerja Pertanian	18	1273	10443	4304,94	3315,555
Pekerja Pertambangan dan Penggalian	18	0	1166	299,44	459,526
Pekerja Industri Pengolahan	18	892	22903	7548,39	7732,452
Pekerja Listrik, Gas dan Air Minum	18	31	529	174,11	178,030
Pekerja Bangunan	18	1145	5163	2802,72	1416,795
Pekerja Perdagangan Hotel dan Restoran	18	2080	28274	11693,06	9957,657
Pekerja Pengangkutan dan Komunikasi	18	433	6134	2485,06	2117,681
Pekerja Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	18	162	2317	933,39	795,533
Pekerja Jasa-Jasa	18	1649	22713	9329,83	7946,355
Valid N (listwise)	18				

Means

Report
Mean

HUN	Prosentase Pekerja Pertanian	Prosentase Pekerja Tambang & Galian	Prosentase Pekerja Industri	Prosentase Pekerja Listrik, Gas & Air Minum	Prosentase Pekerja Bangunan	Prosentase Pekerja Perdagangan, Hotel & Restoran	Prosentase Pekerja Pengangkutan & Komunikasi	Prosentase Pekerja Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Prosentase Pekerja Jasa-jasa
01	16,1081	1,0497	22,2552	,4135	7,6538	24,9834	5,4196	2,0475	20,0691
02	16,1268	1,0865	22,2825	,4247	7,5728	25,1218	5,3375	2,0046	20,0429
03	16,1441	1,1247	22,3092	,4375	7,4924	25,2578	5,2563	1,9626	20,0155
tal	16,1263	1,0869	22,2823	,4253	7,5730	25,1210	5,3378	2,0049	20,0425

dilanjutkan

..... lanjutan 6

Descriptives

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tidak / Belum Tamat	18	8419	24529	17566,00	5280,511
SD / MI	18	7375	36129	19218,22	7265,579
SLTP / MTs	18	2382	24522	14946,39	5385,672
SMU / SMK / MA	18	7027	38034	21360,06	8533,340
Perguruan Tinggi	18	403	15868	6281,44	5153,923
Valid N (listwise)	18				

Means

TAHUN	Prosentase Penduduk Belum Tamat SD	Prosentase Penduduk Berpendidikan SLTP	Prosentase Penduduk Berpendidikan SLTP	Prosentase Penduduk Berpendidikan SLTA	Prosentase Penduduk Berpendidikan Perguruan Tinggi
2001	22,9978	23,6731	21,2234	25,1901	6,9156
2002	23,1124	24,7746	17,9597	27,2605	6,8928
2003	22,0884	23,8060	20,2998	27,0693	6,7364
Total	22,7329	24,0846	19,8276	26,5066	6,8483

Descriptives

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Harapan Hidup Pria	18	64	68	65,67	1,138
Harapan Hidup Wanita	18	68	70	68,89	,583
Kesehatan (Harapan Hidup)	18	66,00	69,00	67,2778	,75190
Valid N (listwise)	18				

dilanjutkan

..... lanjutan 7

Means

Report
Mean

TAHUN	Harapan Hidup Pria	Harapan Hidup Wanita	Kesehatan (Harapan Hidup)
2001	64,67	68,83	66,7500
2002	65,67	68,83	67,2500
2003	66,67	69,00	67,8333
Total	65,67	68,89	67,2778

Lampiran XIII : Hasil Analisis Path (dengan Pendekatan OLS data standardize)

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Struktur Pendapatan (a)		Enter
a All requested variables entered.			
b Dependent Variable: Struktur Belanja			

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,763(a)	,582	,556	,66612962
a Predictors: (Constant), Struktur Pendapatan				

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,900	1	9,900	22,312	,000(a)
	Residual	7,100	16	,444		
	Total	17,000	17			
a Predictors: (Constant), Struktur Pendapatan						
b Dependent Variable: Struktur Belanja						

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,256E-16	,157		,000	1,000
	Struktur Pendapatan	,763	,162	,763	4,724	,000
a Dependent Variable: Struktur Belanja						

dilanjutkan

..... lanjutan 1

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Struktur Belanja, Struktur Pendapatan(a)		Enter
a All requested variables entered.			
b Dependent Variable: Kemandirian Wilayah			

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,393(a)	,154	,042	,97896129
a Predictors: (Constant), Struktur Belanja, Struktur Pendapatan				

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,625	2	1,312	1,369	,284(a)
	Residual	14,375	15	,958		
	Total	17,000	17			
a Predictors: (Constant), Struktur Belanja, Struktur Pendapatan						
b Dependent Variable: Kemandirian Wilayah						

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,130E-16	,231		,000	1,000
	Struktur Pendapatan	,080	,367	-.080	,219	,830
	Struktur Belanja	-.451	,367	-.451	-1,227	,139
a Dependent Variable: Kemandirian Wilayah						

dilanjutkan

..... lanjutan 2

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kemandirian Wilayah, Struktur Belanja(a)		Enter
a All requested variables entered.			
b Dependent Variable: Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi			

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,780(a)	,609	,556	,66603893
a Predictors: (Constant), Kemandirian Wilayah, Struktur Belanja				

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,346	2	5,173	11,661	,001(a)
	Residual	6,654	15	,444		
	Total	17,000	17			
a Predictors: (Constant), Kemandirian Wilayah, Struktur Belanja						
b Dependent Variable: Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi						

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,694E-15	,157		,000	1,000
	Struktur Belanja	-,047	,175	-,047	-,269	,792
	Kemandirian Wilayah	,797	,175	,797	-4,546	,000
a Dependent Variable: Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi						